



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

BAPPEDA KABUPATEN CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.65 Bojong, Karangtengah, Cianjur



LAPORAN AKHIR

**KAJIAN PENATAAN DAERAH DI
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Terkait dengan kewajiban dalam kegiatan **Kajian Penataan Daerah Di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat** tahun anggaran 2021, maka bersama ini kami sebagai pelaksana pekerjaan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyiapkan dan membuat suatu produk Laporan Akhir.

Sistematika Laporan Akhir yang kami susun tersebut akan berisikan tentang Pendahuluan, Tinjauan Kebijakan, Gambaran Umum Wilayah, Metodologi, dan Hasil Analisis, dan Kesimpulan Rekomendasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan Laporan Akhir ini. semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan tema kajian terkait.

Cianjur, 2021

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
----------------------	---

DAFTAR ISI	ii
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud, Tujuan Dan Sasaran	I-4
1.3. Lingkup Lokasi Kegiatan.....	I-5
1.4. Ruang Lingkup Substansi Kegiatan	I-10
1.5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	I-10
1.6. Sistematika Penulisan Laporan	I-10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	II-1
2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah	II-8
2.3. Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah	II-11

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1. Kondisi Geografis Dan Administrasi.....	III-1
3.2. Kondisi Fisik.....	III-5
3.2.1. Topografi	III-5
3.2.2. Geologi	III-6
3.2.3. Jenis Tanah.....	III-8
3.2.4. Curah Hujan	III-10
3.2.5. Penggunaan Lahan.....	III-12
3.2.6. Kerawanan Bencana	III-16
3.3. Kependudukan.....	III-20
3.3.1. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk.....	III-20
3.3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	III-22

3.4.	Kondisi Sarana Dan Prasarana.....	III-24
3.4.1.	Pendidikan.....	III-24
3.4.2.	Kesehatan	III-26
3.4.3.	Agama	III-28
3.5.	Perekonomian	III-31
3.6.	Potensi Daerah	III-32
3.6.1.	Pertanian	III-32
3.6.2.	Pariwisata	III-36

BAB IV METODOLOGI

4.1.	Metodologi Pelaksanaan Kerja	IV-1
4.1.1	Metode Pengumpulan Data.....	IV-1
4.1.2	Metode Analisis	IV-10
4.1.2.1.	Tata Cara Penilaian Persyaratan Teknis	IV-11
4.1.2.2.	Tata Cara Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan	IV-20
4.1.2.3.	Tata Cara Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah	IV-25
4.1.2.4.	Tata Cara Penilaian Persyaratan Administratif.....	IV-38
4.1.3	Metode Perumusan Rekomendasi/Kesimpulan/Rencana	IV-42

BAB V HASIL ANALISIS

5.1.	Analisis Penentuan Jumlah Daerah Otonom Baru	V-1
5.2.	Penilaian Kelayakan Daerah Otonom Baru.....	V-26
5.2.1.	Penilaian Berdasarkan PP No 78 Tahun 2007.....	V-26
5.2.2.	Penilaian Berdasarkan RPP Penataan Daerah (Pembanding Jawa Barat).....	V-55
5.2.3.	Penilaian Berdasarkan RPP Penataan Daerah (Pembanding Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten).....	V-90

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1.	Kesimpulan dan Rekomendasi.....	VI-1
------	---------------------------------	------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembentukan daerah otonom merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam suatu pemerintahan negara. Desentralisasi menjanjikan banyak hal bagi kemanfaatan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Melalui prinsip ini, diharapkan akan berkembang suatu cara pengelolaan kewenangan dan sumber daya.

Dalam telaah konseptual, desentralisasi dipahami secara berganda, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan nasional dan mengaktualisasi representasi lokal. Satu hal yang nyata dari kedua aspek desentralisasi itu adalah keinginan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan kedekatan jarak, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berarti bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan semakin mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi di samping tingkat daya tanggap yang tinggi dalam menyikapi perkembangan di masyarakat. Desentralisasi akan memungkinkan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Semangat otonomi di Indonesia ini tentu saja memberikan dampak yang sangat luas. Salah satu dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran daerahnya. Salah satunya penyebabnya adalah pemahaman yang keliru dikalangan elite yang memandang pemekaran sebagai jalan keluar untuk

mewujudkan bentuk identitasnya yang berbeda atau sebagai akibat reaktif perlakuan daerah induk yang tidak adil.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom yang baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat. Dalam Undang undang tersebut menjelaskan bahwa pemekaran daerah kini sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis. Pasal 33 ayat 2 menyebutkan bahwa pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan kabupaten/kota. Pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dan tahapan pembentukan daerah persiapan diatur di Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 Undang undang No.23 Tahun 2014.

Dalam pasal di atas juga disebutkan bahwa Daerah persiapan tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan kegiatan administrasi yang dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, hasil evaluasi menunjukkan Daerah persiapan tersebut memenuhi syarat, maka dapat ditetapkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Demikian juga sebaliknya jika hasil evaluasi selama 3 (tiga) tahun daerah persiapan tidak bisa memenuhi persyaratan maka daerah persiapan tersebut tidak dapat melakukan pemekaran atau tidak dapat menjadi DOB.

Persyaratan tersebut dimunculkan akibat adanya fakta banyaknya daerah otonomi baru yang yang tidak layak dalam penilaian kinerja dan pelayanan pemerintahan yang buruk. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan bahwa 80 persen daerah otonom baru berkinerja buruk, bahkan beberapa di antaranya dianggap gagal. Menurut hasil evaluasi, kegagalan disebabkan oleh tidak siapnya daerah pada awal masa transisi, terutama di tiga tahun pertama (Kemendagri, 2011).

Adanya aspirasi masyarakat di Kabupaten Cianjur yang menghendaki adanya pemekaran/pembentukan daerah otonom baru perlu mendapat respon dari berbagai pihak utamanya Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wakil rakyat. Persoalannya apakah aspirasi yang muncul ini dapat menjamin peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Cianjur.

Persoalan itu hanya dapat dijawab secara obyektif jika terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap persyaratan dasar pembentukan Daerah persiapan

sesuai dengan Undang undang No.23 tahun 2014. Persyaratan dasar tersebut meliputi :

- a. Persyaratan dasar kewilayahan
- b. Persyaratan dasar kapasitas daerah

A. Persyaratan Dasar Kewilayahan, terdiri :

- a) luas wilayah minimal;
- b) jumlah penduduk minimal;
- c) batas wilayah;
- d) Cakupan Wilayah; dan
- e) batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.

Persyaratan dasar kewilayahan akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri, di mana dibedakan syarat minimal luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan pengelompokan antara pulau atau kepulauan yang ditentukan dengan Batas wilayah dengan titik koordinat pada peta dasar.

Secara umum Cakupan Wilayah untuk pembentukan daerah meliputi:

- a. paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah Provinsi;
- b. paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan Daerah Kabupaten; dan
- c. paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan Daerah Kota.

Selain cakupan wilayah bahwa pembentukan daerah otonom harus mengikuti aturan batas usia minimal penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- a. batas usia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan
- b. batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

B. Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah

Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah didasarkan pada 7 parameter yaitu geografi, demografi, kemandirian, Sosial politik adat dan tradisi, parameter potensi ekonomi, parameter keuangan daerah dan parameter kemampuan penyelenggaraan daerah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Persyaratan Dasar Pembentukan Daerah Persiapan

PERSYARATAN DASAR		
A	PERSYARATAN DASAR KEWILAYAHAN	
1	Luas wilayah minimal	
2	Jumlah penduduk minimal	
3	Batas wilayah	
4	Cakupan wilayah	
5	Batas usia minimal daerah kabupaten	
B	PERSYARATAN DASAR KAPASITAS DAERAH	
1	Geografi	
	a. Lokasi ibukota	
	b. Hidrografi	
	c. Kerawanan Bencana	
2	Demografi	
	a. Kualitas sumberdaya penduduk	
	b. Distribusi penduduk	
3	Keamanan	
	a. Tindakan kriminal umum	
	b. Konflik sosial	
4	Sosial politik, adat dan tradisi	
	a. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	
	b. Konektivitas sosial	
	c. Organisasi kemasyarakatan	
5	Potensi Ekonomi	
	a. Pertumbuhan ekonomi	
	b. Potensi unggulan daerah	
6	Keuangan daerah	
	a. Kapasitas pendapatan asli daerah induk	
	b. Potensi pendapatan asli calon daerah persiapan	
	c. Pengelolaan keuangan dan aset daerah	
7	Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan	
	a. Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan	
	b. Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan	
	c. Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur	
	d. Jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk	
	e. Rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan	

Berdasarkan hal di atas, Kabupaten Cianjur akan melakukan penyusunan **Kajian Penataan Daerah di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat**”. Kajian ilmiah ini sebagai dasar proses pembentukan Daerah persiapan kabupaten dengan fokus pemekaran wilayah berdasarkan **kedua persyaratan dasar** di atas. Kajian ini nantinya menghasilkan sebuah rekomendasi layak atau tidaknya pembentukan

Daerah persiapan di Kabupaten Cianjur sesuai dengan persyaratan pembentukan Daerah Otonom Baru sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud penyusunan kajian ini adalah tersedianya sebuah kajian akademik yang digunakan sebagai bahan acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk menentukan pilihan terbaik Pemekaran Daerah, dan guna melakukan pendayagunaan potensi menuju peningkatan kemampuan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat kemampuan daerah Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Untuk mengetahui kelayakan pembentukan daerah otonom baru berdasarkan kriteria pemekaran daerah sebagai dasar penentuan rekomendasi kebijakan dapat atau tidaknya dibentuk daerah otonom baru dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang merujuk pada UU No.23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dan RPP tentang Penataan Daerah Tahun 2017.
3. Untuk mengetahui gambaran tingkat partisipasi masyarakat terhadap wacana pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Cianjur.

Adapun sasaran untuk Kegiatan Kajian Penataan Daerah di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat adalah 32 (Tiga Puluh Dua) Kecamatan, 354 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Cianjur.

1.3. LINGKUP LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Cianjur secara geografis terletak pada koordinat 106o 42'-107o 25' Bujur Timur dan 6o 21'-7o 25' Lintang Selatan, dengan ketinggian 7-2.962 mdpl dan memiliki kemiringan 0- 40%.

Batas-batas wilayah daerah meliputi:

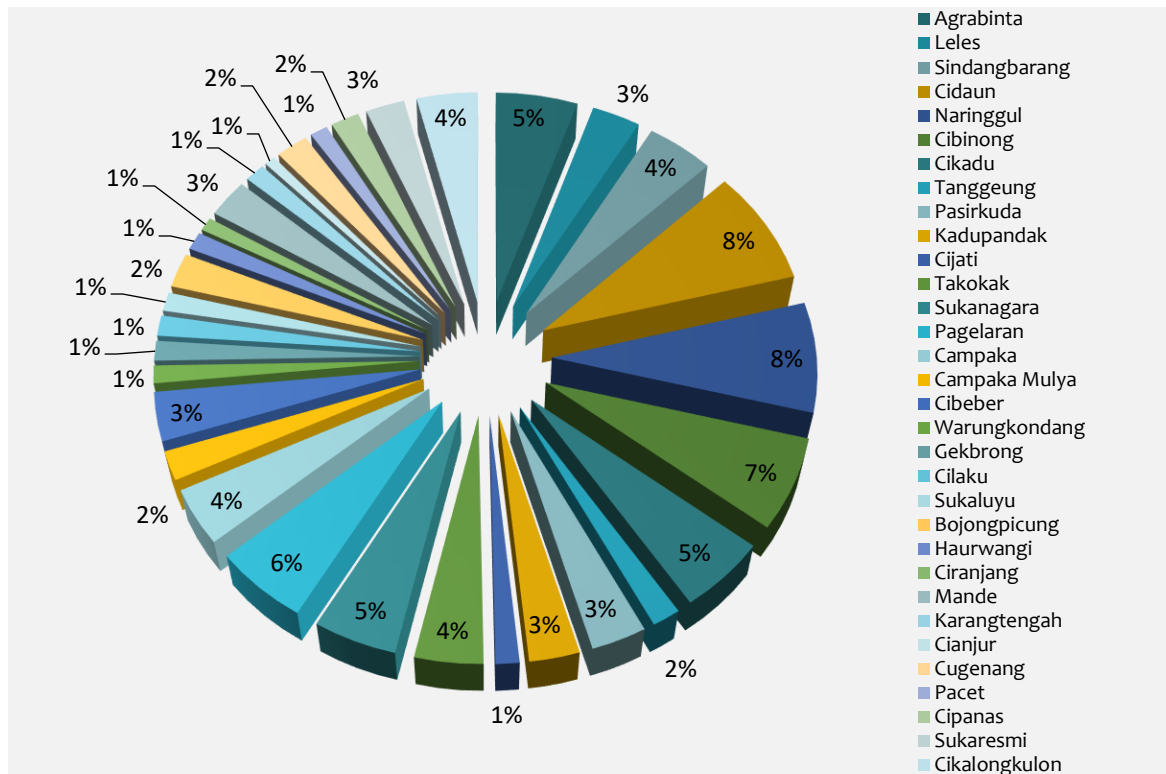
Sebelah utara	:Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
Sebelah timur	: Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut;
Sebelah selatan	: Samudra Hindia;
Sebelah barat	: Kabupaten Sukabumi.

Wilayah Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 kecamatan dengan luas wilayah 361.434,98 ha dan kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Cidaun dengan luas 29.551,23 ha. Untuk luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

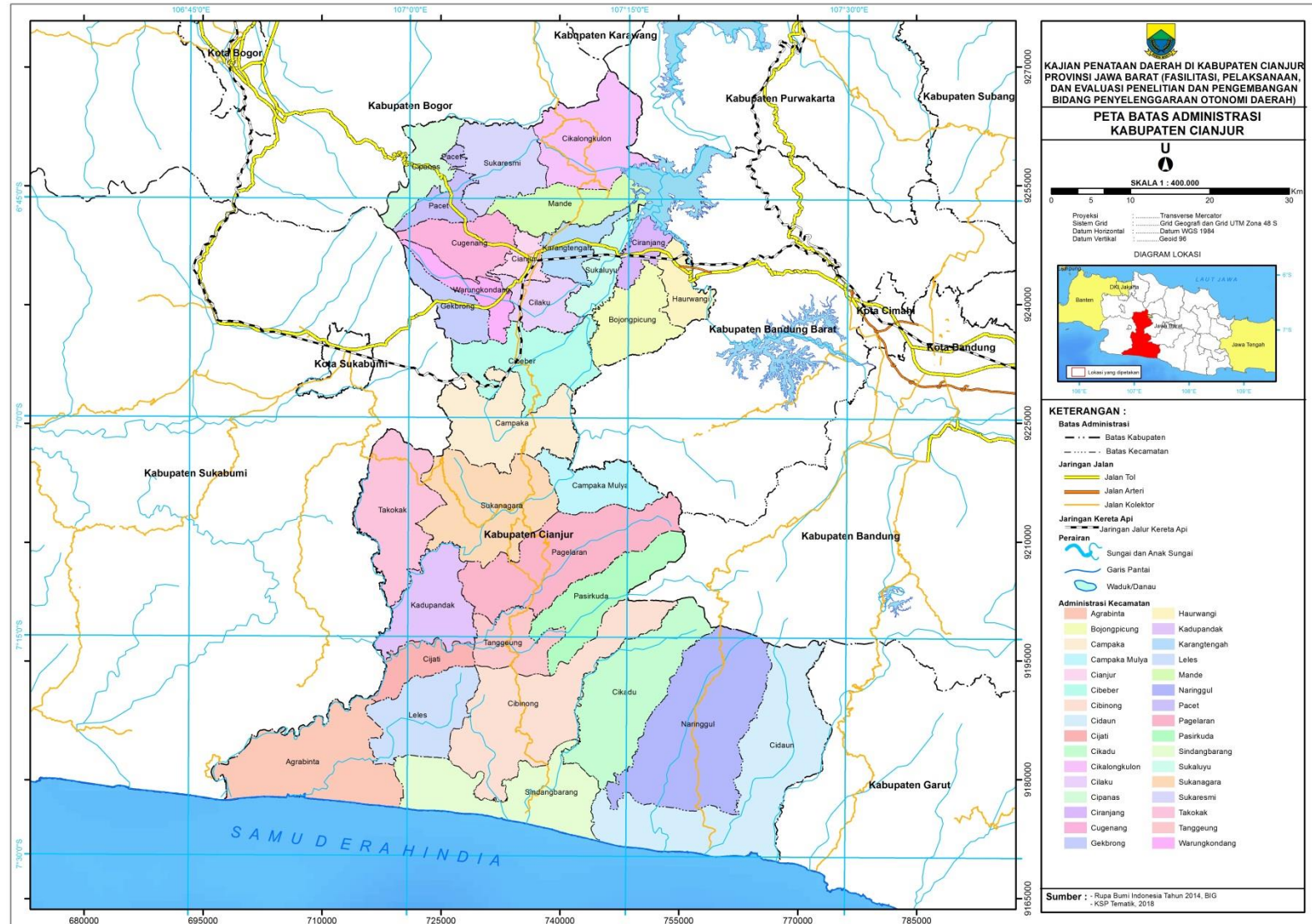
Tabel 1.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2017

No (1)	Kecamatan (2)	Luas Wilayah (Km2) (3)	Persentase (4)
1	Agrabinta	192,65	5,33
2	Leles	114,32	3,16
3	Sindangbarang	159,08	4,40
4	Cidaun	295,51	8,18
5	Naringgul	281,32	7,78
6	Cibinong	235,48	6,52
7	Cikadu	188,66	5,22
8	Tanggeung	59,	1,65
9	Pasirkuda	115,15	3,19
10	Kadupandak	104,41	2,89
11	Cijati	49,02	1,36
12	Takokak	142,16	3,93
13	Sukanagara	174,05	4,82
14	Pagelaran	199,44	5,52
15	Campaka	143,75	3,98
16	Campaka Mulya	74,27	2,05
17	Cibeber	124,73	3,45
18	Warungkondang	45,16	1,25
19	Gekbrong	50,77	1,40
20	Cilaku	52,53	1,45
21	Sukaluyu	48,02	1,33
22	Bojongpicung	88,34	2,44
23	Haurwangi	46,18	1,28
24	Ciranjang	34,81	0,96
25	Mande	98,79	2,73
26	Karangtengah	48,53	1,34
27	Cianjur	26,15	0,72
28	Cugenang	76,15	2,11
29	Pacet	41,66	1,15
30	Cipanas	67,28	1,86
31	Sukaesmi	92,15	2,55
32	Cikalongkulon	144,02	3,98
	Cianjur	3614,35	100,00

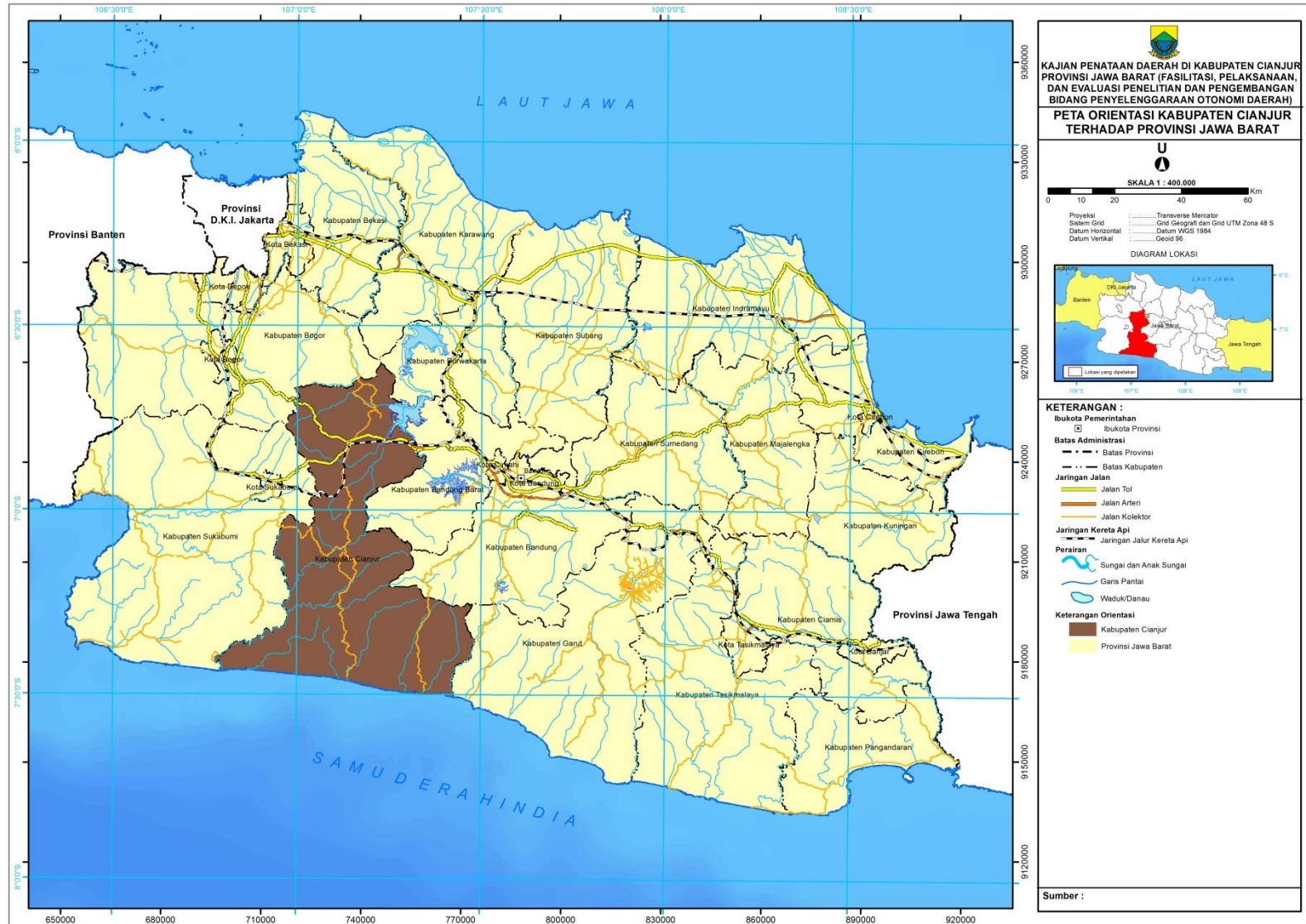
Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021



Gambar I.1. Diagram Persentase Luas Wilayah di Kabupaten Cianjur



Gambar I.2. Peta Administrasi Kabupaten Cianjur



Gambar 1.3. Peta Orientasi Kabupaten Cianjur

1.4. RUANG LINGKUP SUBSTANSI KEGIATAN

1. Survey Data Sekunder dan Primer
 - a. Pengambilan data primer disemua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur melalui wawancara, survey lapangan maupun kuesioner.
 - b. Pengambilan data sekunder di perangkat daerah dan instansi vertikal pemerintah daerah
2. Menyusun analisis kriteria dan kelayakan yang dibutuhkan dalam **Kajian Penataan Daerah di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat**: berdasarkan kedua persyaratan dasar mengenai pembentukan Daerah Persiapan kabupaten.
3. Menyusun laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.

1.5. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 5 (lima) bulan atau sekitar 150 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan atau tanggal ditandatangani Kontrak.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Dalam menunjang pelaporan kegiatan, sistematika penulisan Laporan Akhir Kajian Penataan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat disusun dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, lingkup lokasi kegiatan, lingkup materi, jangka waktu penyelesaian kegiatan, dan sistematika laporan.

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

Menguraikan tentang peraturan-peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

Berisi tentang uraian gambaran umum wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

BAB IV METODOLOGI

Menjabarkan tentang metodologi yang dipakai dalam melaksanakan pekerjaan Kajian Penataan Daerah di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

BAB V HASIL ANALISIS

Berisi uraian analisis terkait dengan kajian penataan daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 dan Rancangan Peraturan Pemerintah.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisi uraian tentang kesimpulan hasil analisis berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Artinya pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang mana memunculkan terjadinya desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah dengan adanya desentralisasi, maka perlu adanya penataan daerah yang bertujuan untuk

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah;
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah yang dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan daerah mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota yang dapat berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Pemekaran daerah bisa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut

1. Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru
2. Penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadisatu Daerah baru

A. URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

a. Urusan pemerintahan absolut

- Politik luar negeri
- Pertahanan
- Keamanan
- Yustisi
- Moneter dan fiskal nasional
- Agama

b. Urusan pemerintahan konkuren

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

- Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan

pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- Tenaga kerja
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pangan
- Pertahanan
- Lingkungan hidup
- Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Pemberdayaan masyarakat dan desa
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Perhubungan
- Komunikasi dan informatika
- Koperasi, usaha kecil dan menengah
- Penanaman modal
- Kepemudaan dan olah raga
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Kearsipan
- Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
 - Kelautan dan perikanan
 - Pariwisata
 - Pertanian
 - Kehutanan
 - Energi dan sumber daya mineral
 - Perdagangan
 - Perindustrian
 - Transmigrasi

Berdasarkan prinsip kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota
- Urusan pemerinatahan yan penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota
- Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota
- Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber

c. Urusan pemerintahan umum

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI
- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
- Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
- Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal

B. PENATAAN DAERAH

Penataan Daerah ditujukan untuk:

- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
- Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah
- Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah

a. Pemekaran Daerah

Untuk membentuk pemekaran daerah harus melalui tahapan pembentukan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota terlebih dahulu. Pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Persyaratan dasar yang

harus dipenuhi terdiri dari persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah.

1. Persyaratan dasar kewilayahan terdiri dari
 - a) Luas wilayah minimal
 - b) Jumlah penduduk minimal
 - c) Batas wilayah
 - ✓ Titik koordinat pada peta dasar
 - d) Cakupan Wilayah
 - ✓ Paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi
 - ✓ Paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten
 - ✓ Paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota
 - ✓ Cakupan Wilayah untuk Daerah Persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat Cakupan Wilayah dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya.
 - e) Batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan
 - ✓ Batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan
 - ✓ Batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
2. Persyaratan dasar kapasitas daerah terdiri dari beberapa parameter
 - a) Geografi
 - ✓ Lokasi ibu kota
 - ✓ Hidrografi
 - ✓ Kerawanan bencana
 - b) Demografi
 - ✓ Kualitas sumber daya manusia
 - ✓ Distribusi penduduk
 - c) Keamanan
 - ✓ Tindakan kriminal umum
 - ✓ Konflik sosial

- d) Sosial politik, adat, dan tradisi
 - ✓ Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
 - ✓ Kohesivitas sosial
 - ✓ Organisasi kemasyarakatan
- e) Potensi ekonomi
 - ✓ Pertumbuhan ekonomi
 - ✓ Potensi unggulan Daerah
- f) Keuangan Daerah
 - ✓ Kapasitas pendapatan asli Daerah induk
 - ✓ Potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan
 - ✓ Pengelolaan keuangan dan aset Daerah
- g) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan
 - ✓ Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan
 - ✓ Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan
 - ✓ Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
 - ✓ Jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk
 - ✓ Rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan

Untuk membentuk daerah persiapan juga harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut

1. Untuk daerah provinsi meliputi
 - a) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi
 - b) Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk
 2. Untuk Daerah kabupaten/kota meliputi
 - a) Keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota
 - b) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk
 - c) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk
- b. Pembentukan Daerah Persiapan
- Pembentukan Daerah Persiapan diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi

persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Jangka waktu untuk penilaian Daerah Persiapan adalah selama 3 (tiga) tahun. Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah induk. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari:

1. Bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN;
2. Bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang berasal dari Daerah Persiapan;
3. Penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk;
4. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:

1. Membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
 2. Melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;
 3. Membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
 4. Menyiapkan dukungan dana.
5. Kewajiban Daerah Persiapan meliputi
6. Menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
 7. Mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
 8. Membentuk perangkat Daerah Persiapan;
 9. Melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
 10. Mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan;
 11. Menangani pengaduan masyarakat.

Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Persiapan untuk menilai kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan kewajiban. Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru dan

ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke Daerah induk.

c. **Penggabungan Daerah**

Penggabungan daerah terdiri dari penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota baru serta penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi Daerah provinsi baru. Penggabungan Daerah dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan atau hasil evaluasi Pemerintah Pusat. Penggabungan Daerah yang berdasarkan kesepakatan antar daerah yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas Daerah. Sedangkan Penggabungan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Pusat tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah. Penilaian terhadap kemampuan menyelenggarakan Otonomi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

2.2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH

A. PEMBENTUKAN DAERAH

Pembentukan daerah berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Syarat administratif pemebntukan daerah kabupaten/kota meliputi:

1. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
2. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
3. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
4. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota
5. Rekomendasi Menteri

Syarat teknis meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Syarat fisik kewilayah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, saran dan prasarana pemerintahan.

B. TATA CARA PEMBENTUKAN DAERAH

Tata cara pembentukan daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sebagai berikut:

1. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
2. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain.
3. Bupati/Walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
4. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
 - a. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota
 - b. Hasil kajian daerah
 - c. Peta wilayah calon kabupaten/kota
 - d. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota
5. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah
6. DPRD Provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan
7. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 - a. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota
 - b. Hasil kajian daerah

- c. Peta wilayah calon kabupaten/kota
- d. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota
- e. Keputusan DPRD provinsi

C. PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH

Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan daerah dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH

1. Berdasarkan proses evaluasi, Menteri menyampaikan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kepada DPOD.
2. DPOD bersidang untuk membahas hasil evaluasi
3. Dalam sidang DPOD menilai daerah tertentu tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, DPOD merekomendasikan agar daerah tersebut dihapus dan digabungkan ke daerah lain
4. Menteri meneruskan rekomendasi DPOD kepada Presiden
5. Apabila Presiden menyetujui usulan penghapusan dan penggabungan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang penghapusan dan penggabungan daerah

E. PEMBINAAN

Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah, berupa:

1. Penyusunan perangkat daerah
2. Pengisian personil
3. Pengisian keanggotaan DPRD
4. Penyusunan APBD
5. Pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi
6. Pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen
7. Penyusunan rencana umum tata ruang daerah

8. Dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah Pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah. Fasilitasi dilakukan oleh pemerintah terhadap beberapa daerah otonom bersandingan yang bersedia bergabung membentuk suatu daerah otonom baru dalam bentuk dukungan insentif fiskal dan non fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. PENDANAAN

1. Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD Provinsi.
2. Dana yang diperlukan dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan pada APBN.
3. Dana perimbangan bagi daerah otonom baru diperhitungkan setelah undang-undang pembentukannya ditetapkan
4. Perhitungan dana perimbangan dilakukan setelah data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah otonom baru tersedia secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Apabila data belum tersedia, besaran dana perimbangan diperhitungkan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai dari daerah induk
6. Bagi kabupaten/kota baru yang undang-undang pembentukannya ditetapkan setelah APBN disahkan, dana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali bersumber dari hibah kabupaten/kota induk dan bantuan provinsi
7. Besaran hibah kabupaten/kota induk diantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk, sesuai kemampuan keuangan kabupaten/kota induk.
8. Hibah diberikan oleh kabupaten/kota induk sampai terbentuknya APBD kabupaten/kota baru
9. APBD kabupaten/kota induk tetap dilaksanakan termasuk untuk cakupan wilayah kabupaten/kota baru sebelum kabupaten/kota baru mempunyai APBD sendiri
10. Bantuan provinsi berasal dari APBD provinsi yang besarnya ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru.

2.3. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAERAH

Menurut Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penataan Daerah yang dimaksud dengan penataan daerah yaitu upaya mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Pembentukan dan penyesuaian Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, dan menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penataan daerah terdiri dari pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah terdiri dari (i) pemekaran daerah, (ii) penggabungan daerah.

A. PEMBENTUKAN DAERAH

Pembentukan daerah berupa Pembentukan Daerah provinsi atau Pembentukan Daerah kabupaten/kota.

1. Pemekaran daerah berupa:
 - a. Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru.
 - b. Pemecahan daerah dapat dibagi menjadi (i) pemecahan Daerah provinsi menjadi Daerah provinsi baru; (ii) pemecahan Daerah kabupaten menjadi Daerah kabupaten baru atau kota baru; atau (iii) pemecahan Daerah kota menjadi Daerah kota baru.
 - c. Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) provinsi menjadi Daerah baru.
2. Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Untuk pembentukan Daerah Persiapan kota, selain memenuhi persyaratan wilayahnya harus memiliki ciri perkotaan yakni 50% (lima puluh persen) atau lebih dari penduduk bekerja di luar sektor primer.

B. PERSYARATAN DASAR PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN

1. Persyaratan dasar kewilayahan

a. Luas wilayah minimal

Penentuan luas wilayah Daerah Persiapan dilakukan setelah penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah Induk ditetapkan Peraturan Menteri.

b. Jumlah penduduk minimal

Jumlah penduduk minimal yang harus dimiliki oleh Daerah Persiapan tidak boleh mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat minimal jumlah penduduk Daerah Induk.

c. Batas wilayah

Penentuan luas wilayah Daerah Persiapan didasarkan pada perhitungan teknis menggunakan batas wilayah. Adapun Batas Wilayah terdiri dari Batas wilayah antara Daerah induk dengan Daerah sekitarnya, batas wilayah antara calon daerah persiapan dengan daerah induk setelah dikurangi calon daerah persiapan. Dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar skala 1:5.000 dan/atau citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 (empat) meter digambarkan dalam peta batas.

d. Cakupan wilayah

Cakupan wilayah paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi. Paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten. Serta paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota. Daerah yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan harus sudah memiliki sarana dan prasarana dasar pemerintahan.

e. Batas usia minimal daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan

Batas usia minimal daerah provinsi induk 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak pembentukan. Batas usia minimal daerah kabupaten/kota induk 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan. Batas usia minimal daerah kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan. Batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

2. Persyaratan dasar kapasitas daerah

Diukur berdasarkan nilai total seluruh parameter yang ditetapkan, adapun parameter penilaian yaitu:

- a. Geografi
 - Lokasi ibu kota
 - Hidrografi
 - Kerawan bencana
- b. Demografi
 - Kualitas sumber daya manusia
 - Distribusi penduduk
- c. Keamanan
 - Tindakan kriminal umum
 - Konflik sosial
- d. Sosial, politik, adat, dan tradisi
 - Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
 - Kohesivitas sosial
 - Organisasi kemasyarakatan
- e. Potensi ekonomi
 - Pertumbuhan ekonomi
 - Potensi unggulan daerah
- f. Keuangan daerah
 - Kapasitas pendapatan asli daerah induk
 - Potensi pendapatan asli calon daerah persiapan
 - Pengelolaan keuangan dan aset daerah
- g. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan
 - Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan
 - Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan
 - Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
 - Jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk
 - Rancangan rencana tata ruang wilayah calon daerah persiapan

3. Persyaratan Administratif

- a. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi.

Dituangkan dalam berita acara persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Ketua DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi yang meliputi:

- Cakupan wilayah daerah persiapan provinsi
- Nama daerah persiapan provinsi
- Lokasi ibu kota daerah persiapan provinsi beserta koordinatnya yang tergambar dalam peta sebagai lampiran
- b. Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur provinsi induk, khusus untuk wilayah Papua, Papuan Barat, Aceh.
- c. Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten/kota.
 - Keputusan musyawarah memuat:
 - Persetujuan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten/kota
 - Persetujuan nama daerah persiapan kabupaten/kota
 - Persetujuan calon ibu kota daerah persiapan
- d. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota kabupaten/kota induk.
 - Berita acara persetujuan ini paling sedikit memuat:
 - Pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota
 - Cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten/kota
 - Nama daerah persiapan kabupaten/kota
 - Lokasi ibu kota daerah persiapan kabupaten dengan menunjuk kecamatan yang menjadi lokasi ibu kota dan menyebutkan koordinatnya yang tergambar dalam peta sebagai lampiran
 - Dukungan dana dari kabupaten/kota induk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan kabupaten/kota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah persiapan
 - Penyerahan personel, sarana dan prasarana, serta dokumen yang dibutuhkan oleh daerah persiapan.
- e. Persetujuan bersama DPRD Provinsi dan gubernur dari daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk, dan khusus untuk wilayah Papua, Papua Barat, Aceh.

C. PENETAPAN DAERAH PERSIAPAN

Pembentukan daerah persiapan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, daerah persiapan dibentuk untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Peraturan Pemerintah paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

1. Cakupan wilayah
2. Batas wilayah daerah persiapan beserta titik koordinatnya
3. Perubahan batas daerah induk sebagai akibat pembentukan daerah persiapan dengan daerah yang berbatasan

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH



3.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI

Kabupaten Cianjur secara geografis terletak pada koordinat 106° 42' - 107° 25' Bujur Timur dan 6° 21' - 7° 25' Lintang Selatan, dengan ketinggian 7-2.962 mdpl dan memiliki kemiringan 0- 40%.

Batas-batas wilayah daerah meliputi:

- Sebelah utara : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah timur : Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut;
- Sebelah selatan : Samudra Hindia;
- Sebelah barat : Kabupaten Sukabumi.

Wilayah Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 kecamatan dengan luas wilayah 361.434,98 ha dan kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Cidaun dengan luas 29.551,23 ha. Untuk luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

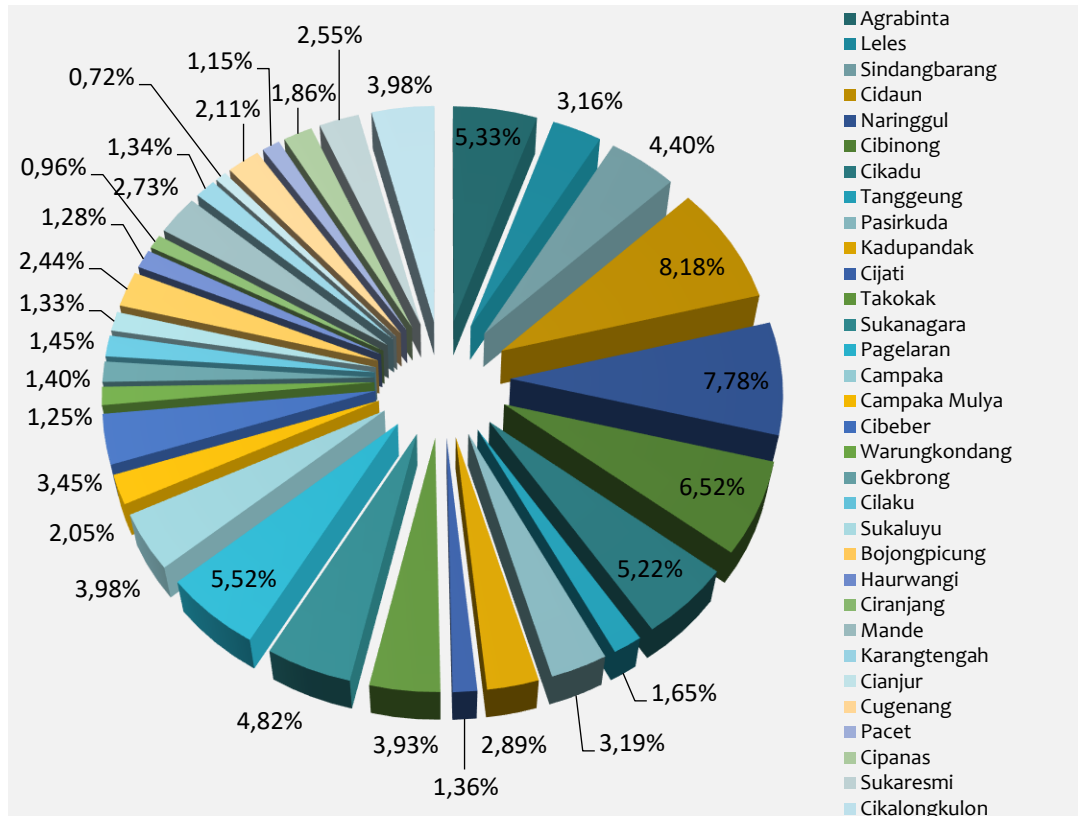
No (1)	Kecamatan (2)	Luas Wilayah (Km ²) (3)	Persentase (4)
1	Agrabinta	192,65	5,33
2	Leles	114,32	3,16
3	Sindangbarang	159,08	4,40

LAPORAN AKHIR

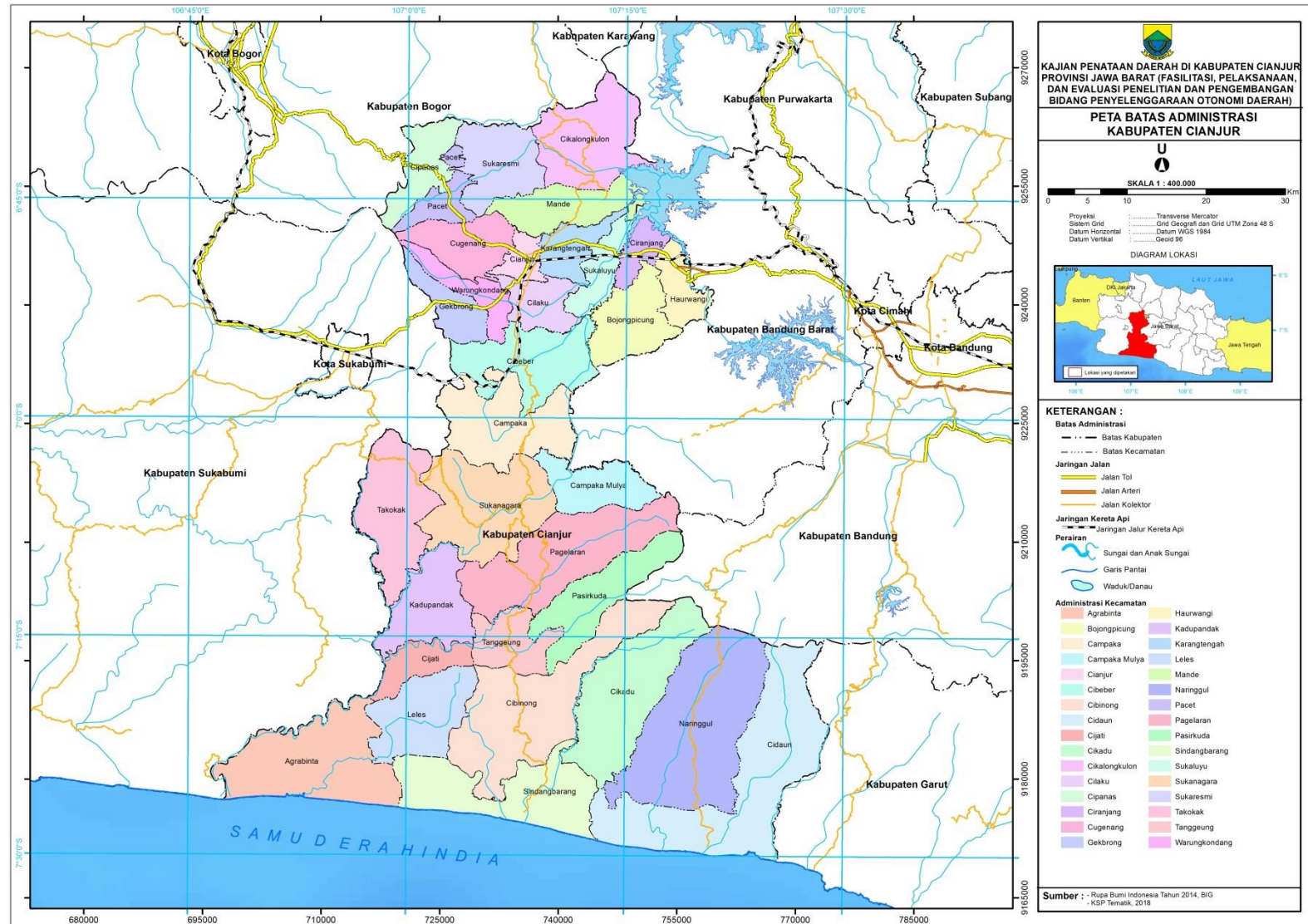
KAJIAN PENATAAN DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

No (1)	Kecamatan (2)	Luas Wilayah (Km2) (3)	Persentase (4)
4	Cidaun	295,51	8,18
5	Naringgul	281,32	7,78
6	Cibinong	235,48	6,52
7	Cikadu	188,66	5,22
8	Tanggeung	59,8	1,65
9	Pasirkuda	115,15	3,19
10	Kadupandak	104,41	2,89
11	Cijati	49,02	1,36
12	Takokak	142,16	3,93
13	Sukanagara	174,05	4,82
14	Pagelaran	199,44	5,52
15	Campaka	143,75	3,98
16	Campaka Mulya	74,27	2,05
17	Cibeber	124,73	3,45
18	Warungkondang	45,16	1,25
19	Gekbrong	50,77	1,40
20	Cilaku	52,53	1,45
21	Sukaluyu	48,02	1,33
22	Bojongpicung	88,34	2,44
23	Haurwangi	46,18	1,28
24	Ciranjang	34,81	0,96
25	Mande	98,79	2,73
26	Karangtengah	48,53	1,34
27	Cianjur	26,15	0,72
28	Cugenang	76,15	2,11
29	Pacet	41,66	1,15
30	Cipanas	67,28	1,86
31	Sukaresmi	92,15	2,55
32	Cikalongkulon	144,02	3,98
	Cianjur	3614,35	100,00

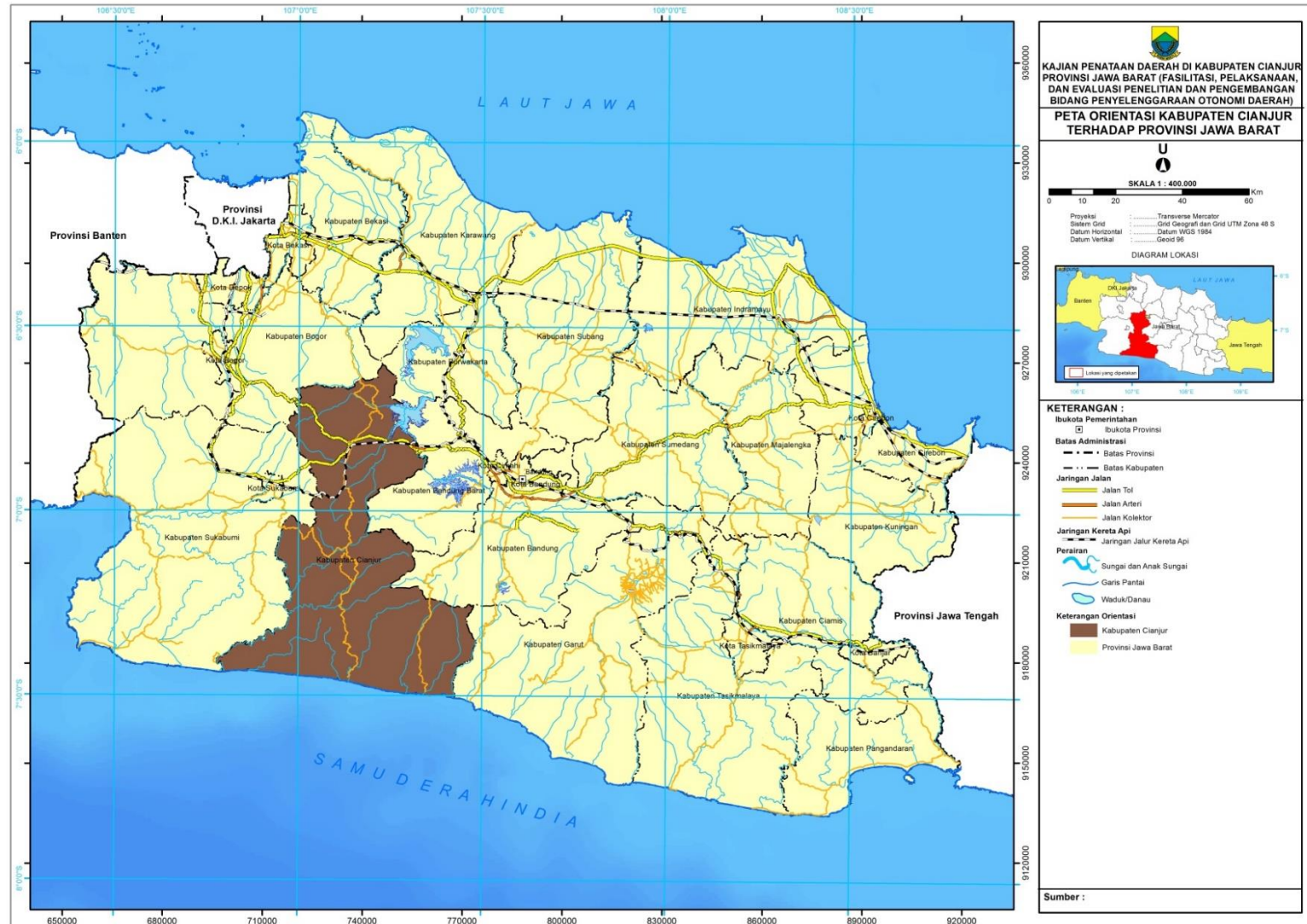
Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021



Gambar III.1. Diagram Persentase Luas Wilayah di Kabupaten Cianjur



Gambar III.2. Peta Administrasi Kabupaten Cianjur



Gambar III.3. Peta Orientasi Kabupaten Cianjur

3.2. KONDISI FISIK

3.2.1. TOPOGRAFI

Wilayah Kabupaten Cianjur mempunyai topografi berupa dataran, perbukitan berelief halus, perbukitan berelief sedang, perbukitan berelief agak kasar serta perbukitan berelief kasar seperti yang diuraikan sebagai berikut:

a. Dataran

Merupakan daerah dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0 – 8 % yang menempati daerah pantai, daerah alluvial sungai dan dataran lahar. Daerah yang termasuk satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi yang rendah yang terdistribusi pada Kecamatan Sukaresmi, Cikalongkulon, Cianjur, Ciranjang, Bojong Picung, sebelah utara pada Kecamatan Cibeber, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, dan sepanjang Pantai Selatan mulai dari Agrabinta sampai Cidaun.

b. Berbukitan Berelief Halus

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng 8 – 15 % yang terdapat pada daerah utara Kecamatan Pacet, Warungkondang, Takokak sebelah Barat, Cidaun dan sebelah Timur Sindang Barang.

c. Berbukitan Berelief Sedang

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 15 – 25 % yang tersebar pada daerah Utara Kecamatan Mande, sebelah Selatan Kadupandak, dan sebelah Selatan Cibeber.

d. Berbukitan Berelief Agak Kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 24 – 40 % yang tersebar pada daerah Takokak, bagian Utara dan Selatan Kadupandak, bagian Utara Sukanagara, Agrabinta, sebelah Utara Cidaun, sebelah Selatan Pagelaran, dan sebelah Barat Kecamatan Tanggeung.

e. Berbukitan Berelief Kasar

Bentuk permukaan pada bagian ini adalah bergelombang kasar sampai sangat kasar dengan kemiringan lereng > 40 % yang terdistribusi pada daerah Selatan Kecamatan Sukaresmi, sebelah Selatan Bojong Picung,

Sukanagara, Gunung Buleud, Sebelah Timur Kecamatan Takokak dan Gunung Sambul, sebelah Timur Pagelaran, bagian Selatan dan Utara Kadupandak serta Karangtengah yang membentuk gawir gerakan tanah yang hamper tegak lurus. Daerah lain yang memiliki bentuk permukaan seperti ini adalah daerah Gunung Pangrango, Pasir Beser, pasir Taman sampai pasir Gambir, Pasir Negrog, Gunung Pondokcabang, Gunung Berenuk, dan Pasir Gook.

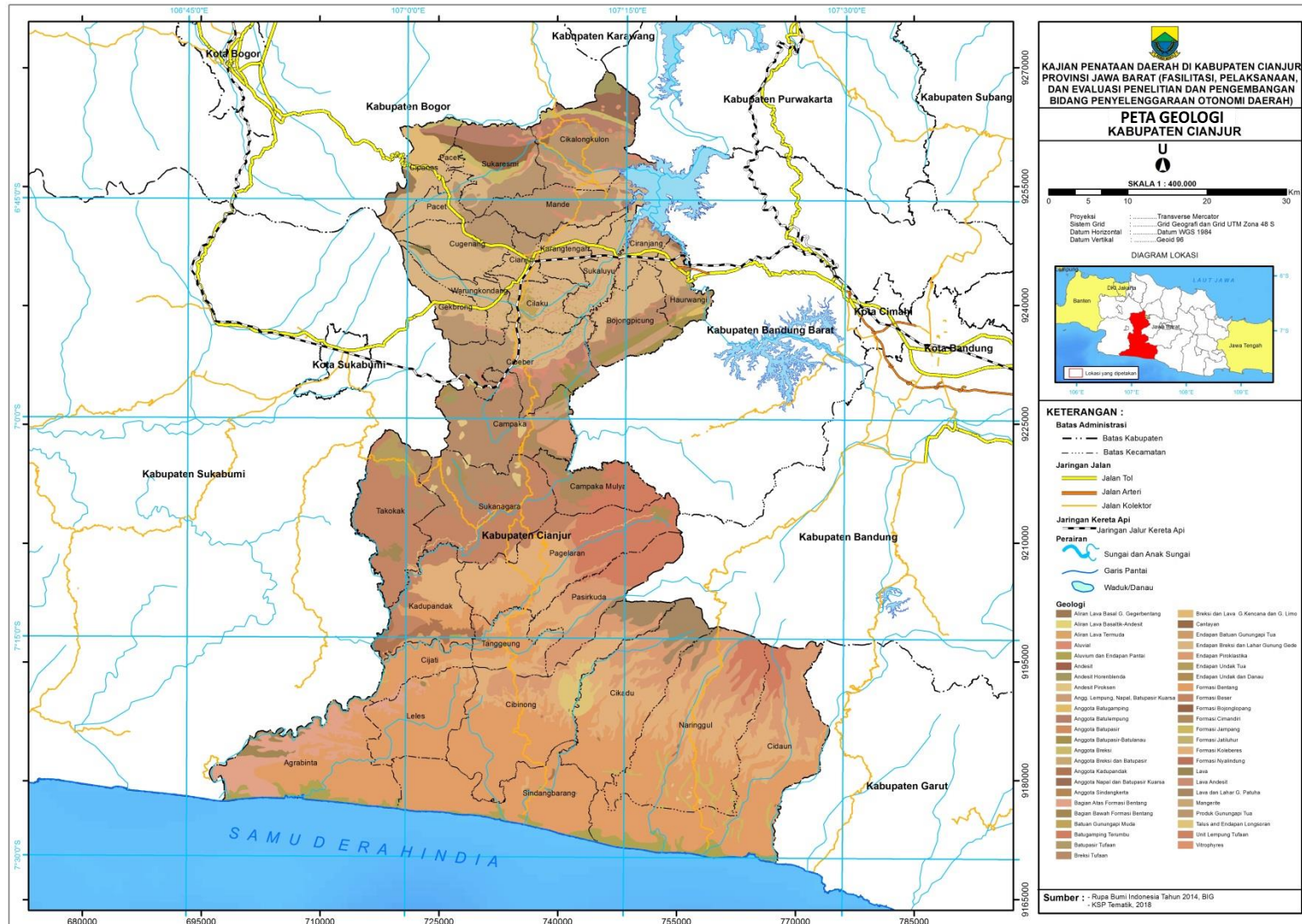
Letak ketinggian Wilayah Kabupaten Cianjur yaitu: 7 – 2.962 mdpl, wilayah yang mempunyai ketinggian tertinggi adalah Kecamatan Cipanas dan Pacet yaitu 1.080 – 2.962 mdpl.

3.2.2. GEOLOGI

Wilayah Kabupaten Cianjur terbentuk dari berbagai formasi geologis dan litologi, yaitu: sebagian besar batuan gunung berapi (volkan) kuartir muda dan volkan kuartir tua, dan sebagian batuan sedimen tersier, serta batuan gamping (Sudjatmiko; Koesmono, 1976). Sebagian kecil di lembah dan daratan terdapat alivium dan endapan pantai. Formasi geologi/litologi, landform dan iklim sangat berpengaruh terhadap pembentukan tanah dan potensi pertaniannya (Desaunettes, 1977).

Bentuk wilayah (landform) di wilayah Kabupaten Cianjur terdiri dari:

- 1) Daratan pantai;
- 2) Jalur aliran sungai;
- 3) Daratan aluvial (Kedung Pandak, Cihea);
- 4) Volkan (daratan volkan, kaki volkan, lungur volkan, kerucut volkan);
- 5) Tektonik/struktural (daratan tektonik, perbukitan tektonik dan pegunungan tektonik); dan
- 6) Karst (daratan karst dan perbukitan karst).

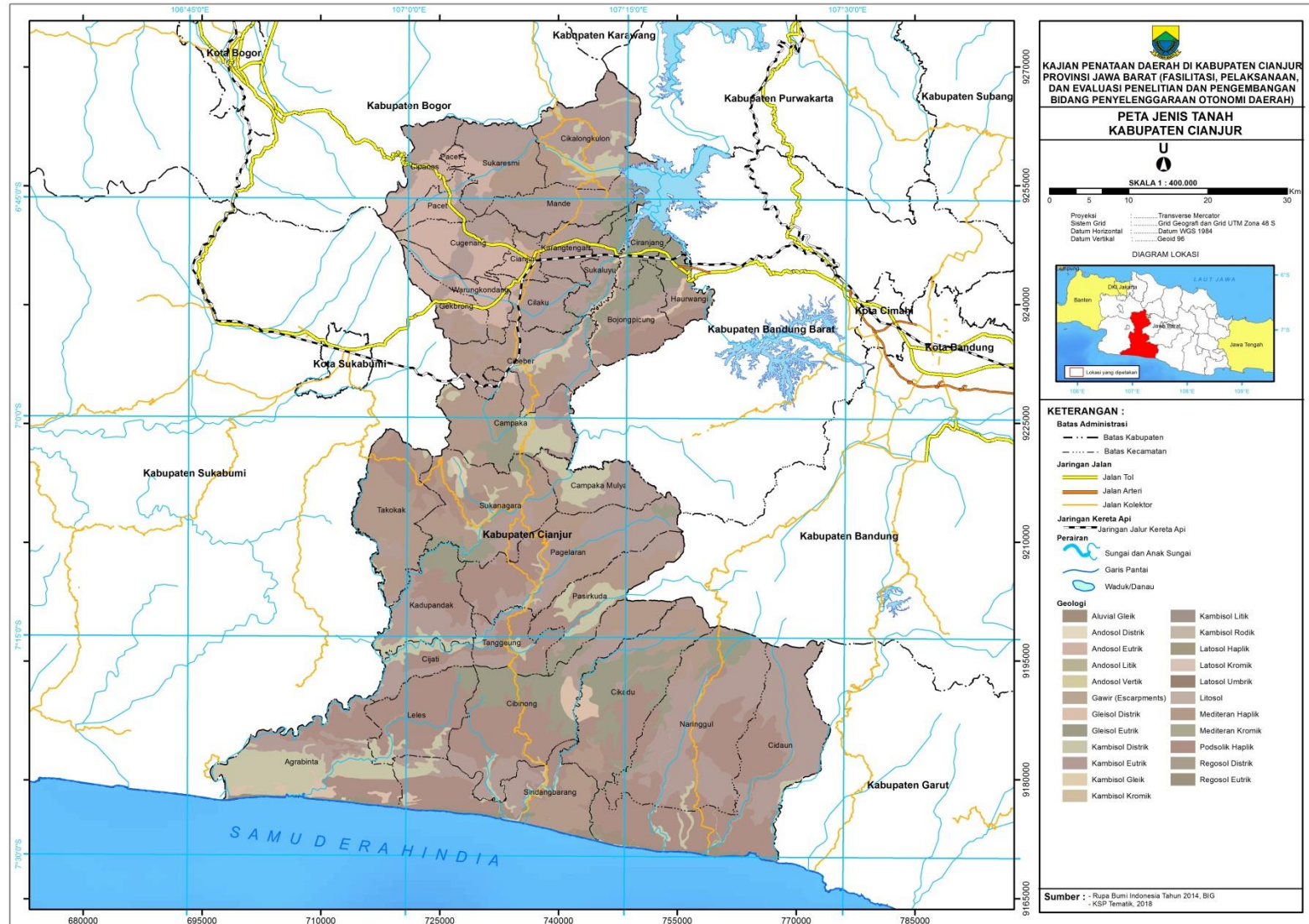


Gambar III.4. Peta Geologi Kabupaten Cianjur

3.2.3. JENIS TANAH

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Cianjur menurut klasifikasi Dudal dan Soeprattohardjo (1957 – 1961), terdiri dari tanah Aluvial, Regosol, Andosol, Grumosol, Mediteran dan Podsolik. Karakteristik dan penyebaran jenis tanah tersebut adalah:

- Tanah Aluvial, tersebar di Kecamatan Cilaku, Cibeber, Warungkondang, Gekbrong, Ciranjang, Sukaluyu, Bojongpicung, Karangtengah, Mande dan Cikalongkulon.
- Tanah Regosol tersebar di Kecamatan Ciranjang, Pacet, Cipanas, Cugenang, Cikalongkulon, Sukanagara, Campaka, Campakamulya, Pagelaran, Kadupandak, Cijati Cibirong, Cikadu, Takokak, Tanggeung dan Agrabinta.
- Tanah Andosol terdapat di Kecamatan Pacet, Cipanas, Cugenang, Pagelaran, Cibirong dan Naringgul
- Tanah Grumosol terdapat di Kecamatan Ciranjang, Sukaluyu, Bojongpicung, Cikalongkulon, Sukanagara, Pagelaran, Kadupandak, Cijati dan Takokak
- Tanah Mediteran terdapat di Kecamatan Ciranjang, Cikalongkulon, Sukanagara, Kadupandak, Campaka, Campakamulya, Takokak dan Tanggeung.
- Tanah Latosol terdapat di Kecamatan Cianjur, Cilaku, Cibeber, Warungkondang, Gekbrong, Sukaluyu, Bojongpicung, Karangtengah, Mande, Pacet, Cipanas, Sukaesmi, Cugenang, Cikalongkulon, Sukanagara, Campaka, Campakamulya, Kadupandak, Cijati, Sindangbarang, Cibirong, Cikadu, Cidaun, Takokak, Tanggeung, Agrabinta dan Leles.
- Tanah Podsolik terdapat di Kecamatan Cibeber, Ciranjang, Sukaluyu, Bojongpicung, Sukanagara, Campaka, Campakamulya, Pagelaran, Kadupandak, Cijati, Sindangbarang, Cibirong, Cikadu, Cidaun, Tanggeung, Agrabinta, Leles dan Naringgul.



Gambar III.5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Cianjur

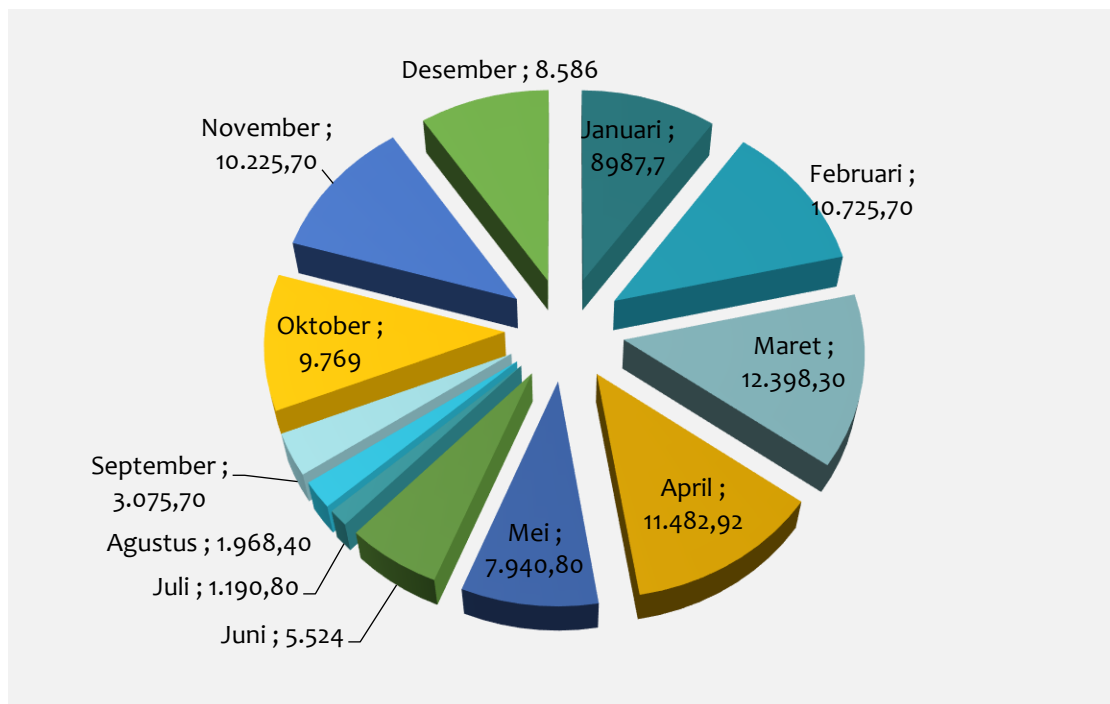
3.2.4. CURAH HUJAN

Curah hujan rata-rata berkisar antara 1.000 – 1.500 mm/tahun, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Maret dengan jumlah harian hujan efektif selama 1 tahun adalah 100 – 150 hari, namun demikian cuaca di Kabupaten Cianjur khususnya dan Indonesia pada umumnya sangat sulit diduga. Hal ini disebabkan oleh pemanasan global (global warning) yang merupakan fenomena alam yang belakangan menjadi isu dan disyaratkan dan dipertimbangkan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah di seluruh dunia.

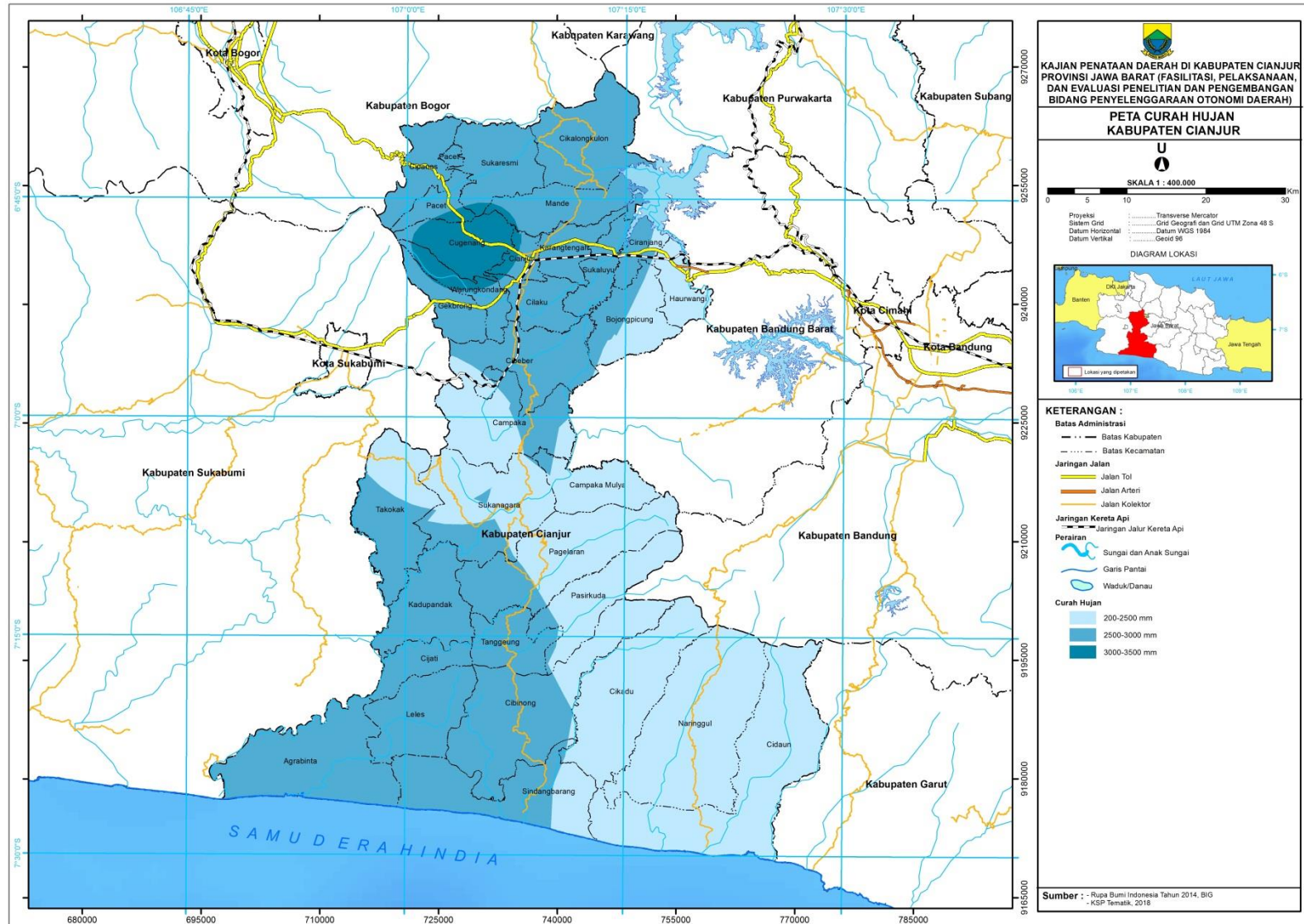
Tabel 3.2. Curah Hujan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Bulan (1)	Jumlah Curah Hujan (mm) (2)	Jumlah Hari Hujan (Hari) (3)
Januari	8987,7	22
Februari	10.725,7	28
Maret	12.398,3	27
April	11.482,919	24
Mei	7.940,8	21
Juni	5.524	18
Juli	1.190,8	12
Agustus	1.968,4	11
September	3.075,7	15
Oktober	9.769	25
November	10.225,7	28
Desember	8.586	29

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2021



Gambar III.6. Diagram Curah Hujan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020



Gambar III.7. Peta Curah Hujan Kabupaten Cianjur

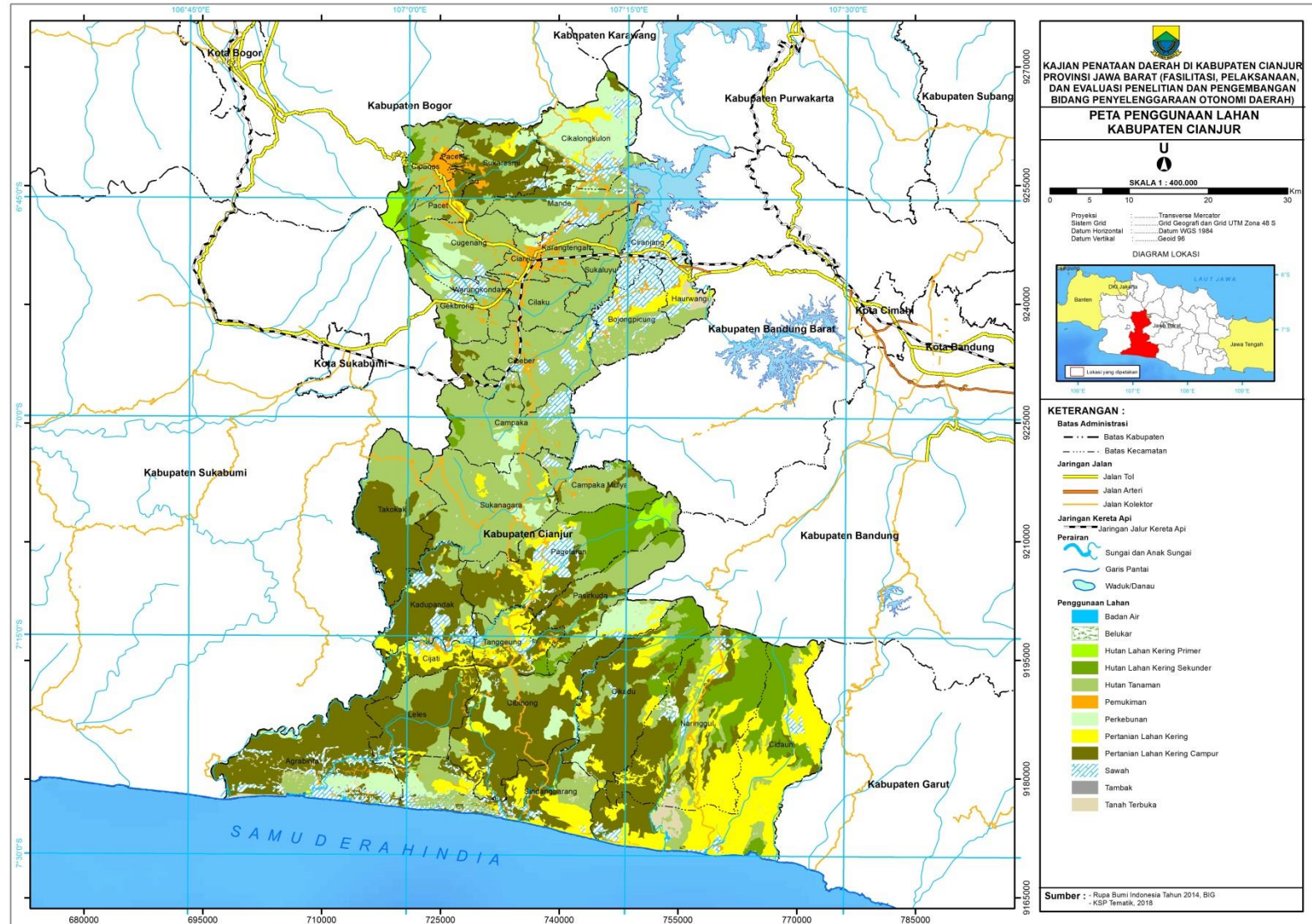
3.2.5. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Kabupaten Cianjur berupa badan air, belukar, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, sawah, tambak, dan tanah terbuka. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut.

KECAMATAN	PENGGUNAAN LAHAN											
	Badan Air	Belukar	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Tanaman	Pemukiman	Perkebunan	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering Campur	Sawah	Tambak	Tanah Terbuka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Agrabinta	354,93	57,85	-	-	918,00	253,92	2200,22	31,30	12522,83	2748,37	-	589,18
Bojongpicung	65,12	-	-	-	4057,96	334,61		920,43		3183,61	-	315,21
Campaka	-	-	-	512,34	11185,32	178,00	959,44	19,65	322,27	1075,94	-	70,96
Campaka Mulya	-	-	-	1023,24	5274,43	196,71	6,36	1,00	496,86	379,91	-	25,52
Cianjur	-	-	-	-	1400,67	982,09	153,72	18,37		77,85	-	5,43
Cibeber	11,73	-	-	38,59	10117,78	399,30		187,70	562,46	957,77	-	151,57
Cibinong	13,82	1,30	-	137,08	2549,09	103,64	4215,30	2205,62	13929,81	478,87	-	154,67
Cidaun	266,31	53,95	-	5476,46	2115,70	98,03	2,54	16116,11	3423,32	1082,15	-	1037,80
Cijati	84,96	-	-	-	29,90	221,70	152,74	1794,61	2267,31	290,88	-	38,25
Cikadu	39,00	73,00	-	3219,15	2280,23	45,66	448,59	2124,80	10362,09	169,68	-	58,15
Cikalongkulon	10,15	-	-	91,26	884,24	333,93	7919,14	884,70	1305,56	1922,41	-	284,96
Cilaku	-	-	-	-	4872,56	348,78	-	-	-	1,34	-	56,80
Cipanas	-	7,93	824,24	1170,80	3100,23	1010,68	0,000027	24,29	343,10	3,89	-	9,45
Ciranjang	42,97	-	-	-	268,82	251,99	-	136,55	-	2415,92	-	43,57
Cugenang	-	-	117,96	508,26	4992,26	364,93	1272,16	0,05	10,97	288,95	-	42,95
Gekbrong	-	-	42,20	736,58	3243,90	188,97	286,69	56,55	30,20	374,84	-	29,63
Haurwangi	31,98	-	-	-	838,49	195,73	0,24	1087,44	-	1668,10	-	733,09

KECAMATAN	PENGUNAAN LAHAN											
	Badan Air	Belukar	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Tanaman	Pemukiman	Perkebunan	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering Campur	Sawah	Tambak	Tanah Terbuka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kadupandak	86,16	-	-	-	1175,00	36,94	11,93	653,36	6583,59	1698,43	-	164,77
Karangtengah	-	-	-	-	3776,01	702,26	6,46	5,68	-	297,27	-	15,37
Leles	55,59	0,08	-	-	2102,62	122,45	65,30	365,67	8260,83	258,13	-	30,00
Mande	32,95	-	-	-	4771,45	433,66	1365,89	27,36	889,08	872,01	-	45,33
Naringgul	11,03	566,39	-	6524,24	4080,50	131,87	33,29	8029,72	7800,63	790,70	-	370,33
Pacet	-	-	105,34	277,87	1548,03	1044,45	-	211,48	840,73	39,34	-	6,20
Pagelaran	-	-	1014,80	5622,42	3969,58	77,62	0,29	1862,93	5203,55	2040,89	-	88,94
Pasirkuda	-	-	-	1015,27	5724,49	48,25	135,52	339,09	3527,34	73,58	-	15,58
Sindangbarang	176,73	53,68	-	19,08	3933,76	257,66	899,57	3932,66	5152,71	1664,97	26,86	218,79
Sukaluyu	44,06	-	-	-	4446,54	107,14	-	0,0047	-	33,76	-	3,67
Sukanagara	-	-	-	-	14144,67	169,55	1412,64	488,15	1005,57	39,57	-	104,56
Sukaresmi	-	-	-	-	1985,70	390,82	637,88	429,15	5781,32	209,81	-	52,13
Takokak	-	-	-	-	5879,17	67,72	38,48	86,60	7972,95	100,55	-	20,01
Tanggeung	34,71	-	-	340,45	1318,36	277,53	-	1880,02	2107,16	615,03	-	25,20
Warungkondang	-	-	53,65	421,95	2379,25	354,45	568,66	34,63	-	766,83	-	-

Sumber : RBI Tahun 2014



Gambar III.8. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Cianjur



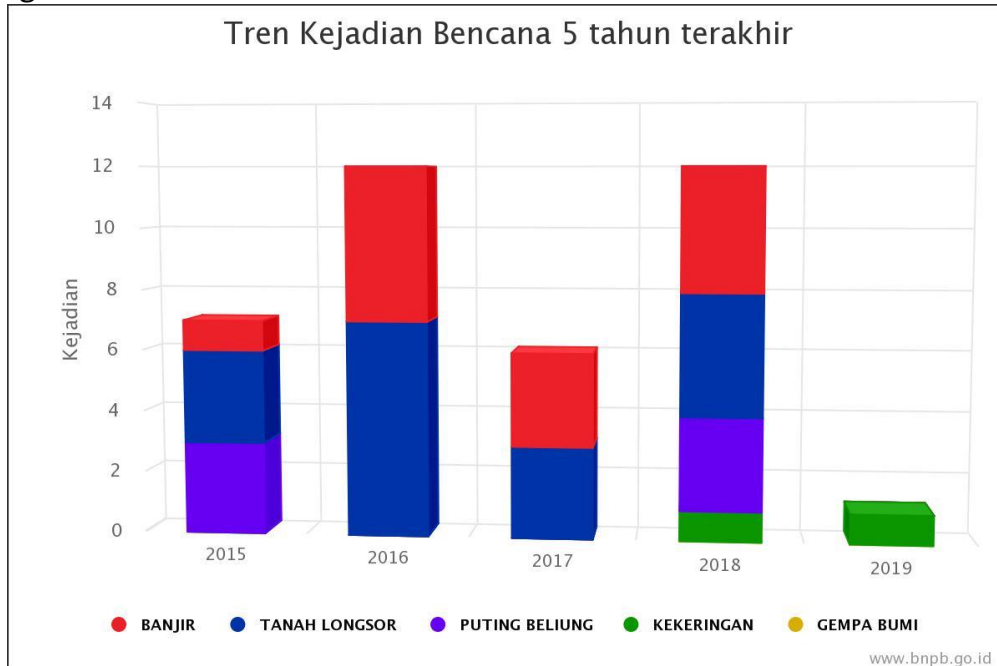
Gambar III.9. Contoh Penggunaan Lahan Sawah di Kabupaten Cianjur



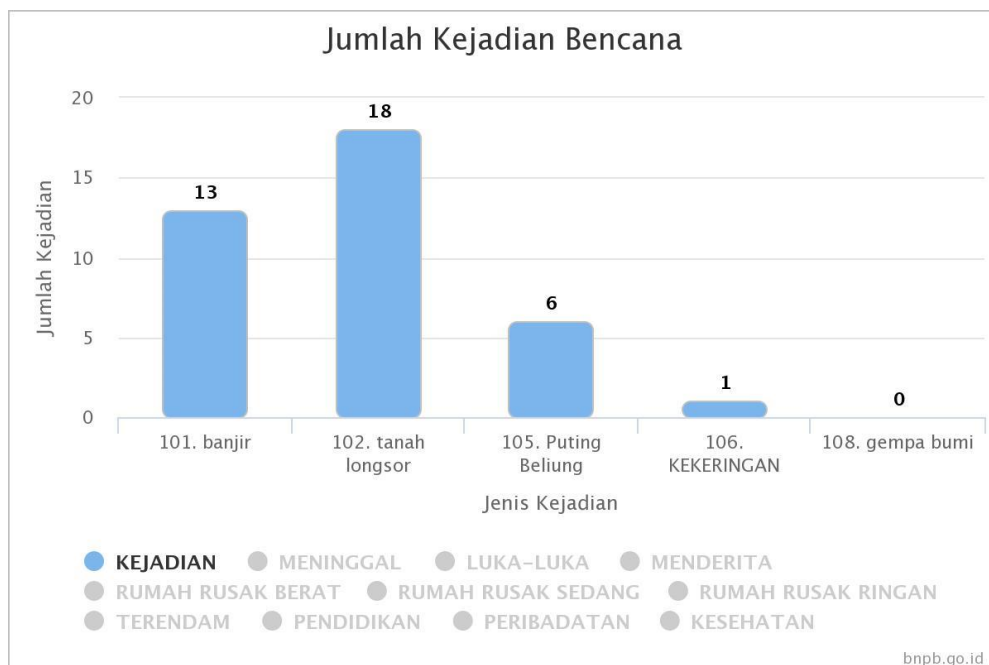
Gambar III.10. Contoh Penggunaan Lahan Perkotaan di Kabupaten Cianjur

3.2.6. KERAWANAN BENCANA

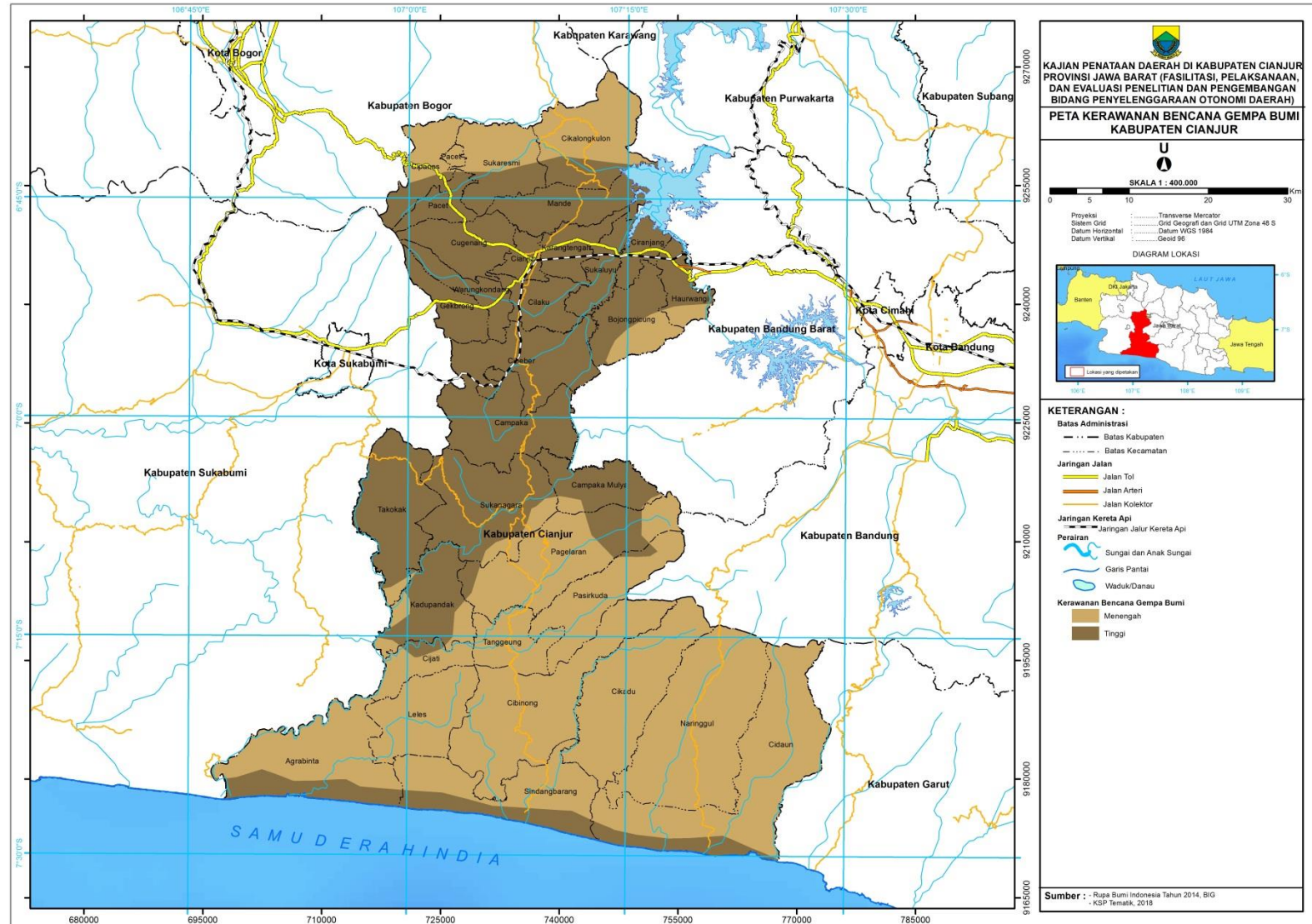
Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Cianjur antara lain: longsor, banjir, angin putting beliung, gempa bumi dan kekeringan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana alam tersebut dapat dilihat melalui grafik di bawah ini.



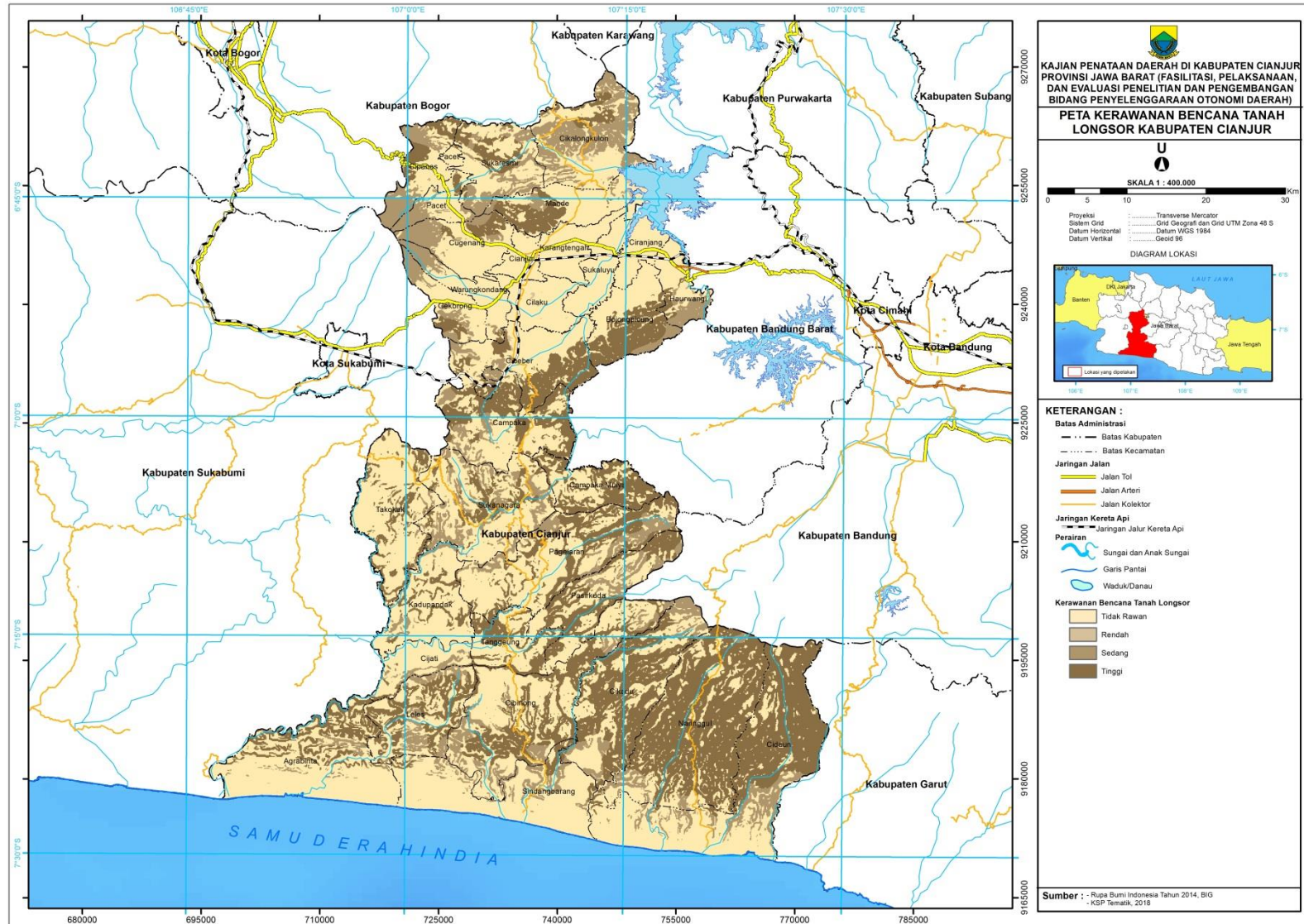
Gambar III.11. Tren Kejadian Bencana 5 Tahun Terakhir di Kabupaten Cianjur



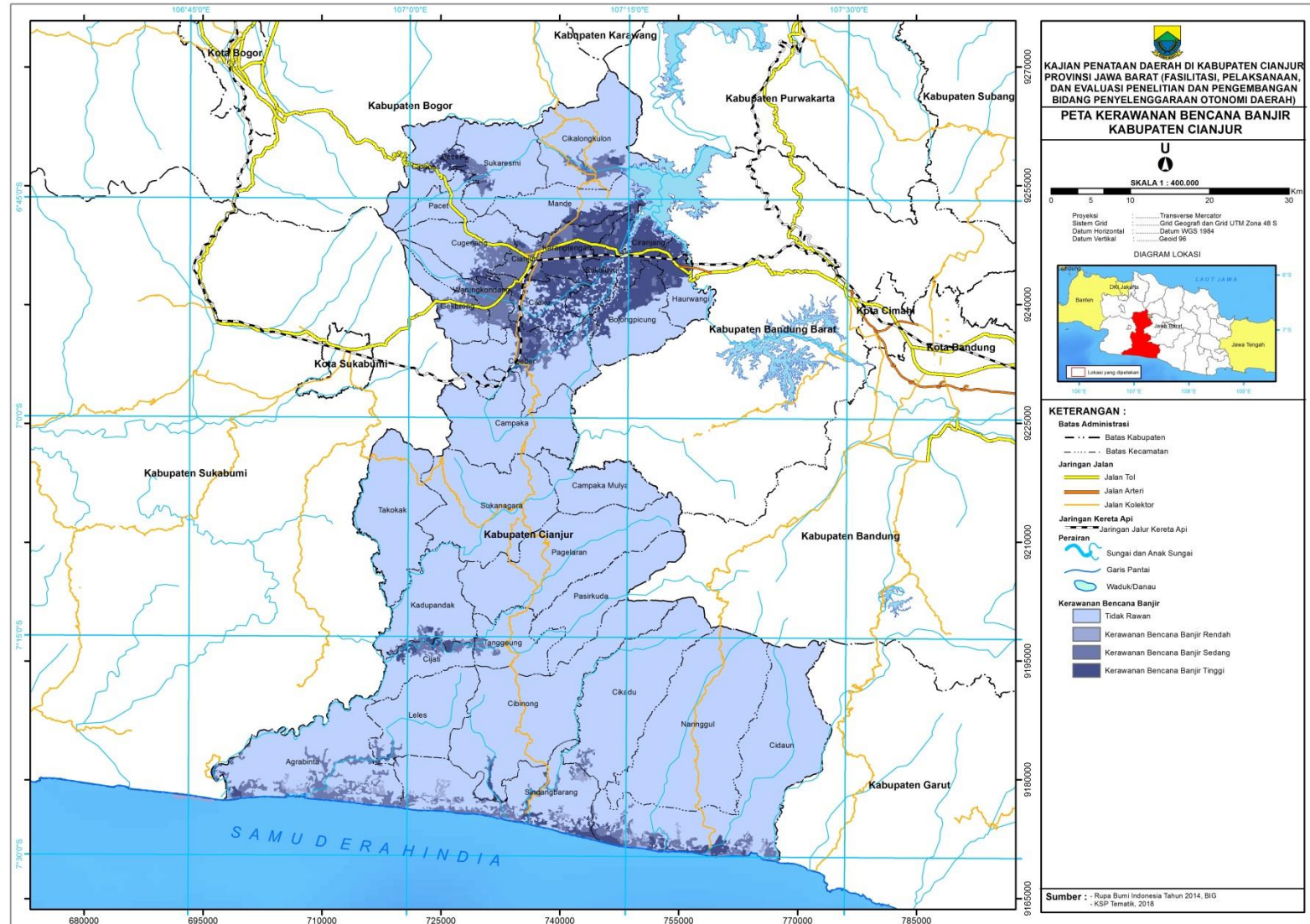
Gambar III.12. Jumlah Kejadian Bencana 5 Tahun Terakhir di Kabupaten Cianjur



Gambar III.13. Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Cianjur



Gambar III.14. Peta Kerawanan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Cianjur



Gambar III.15. Peta Kerawanan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Cianjur

3.3. KEPENDUDUKAN

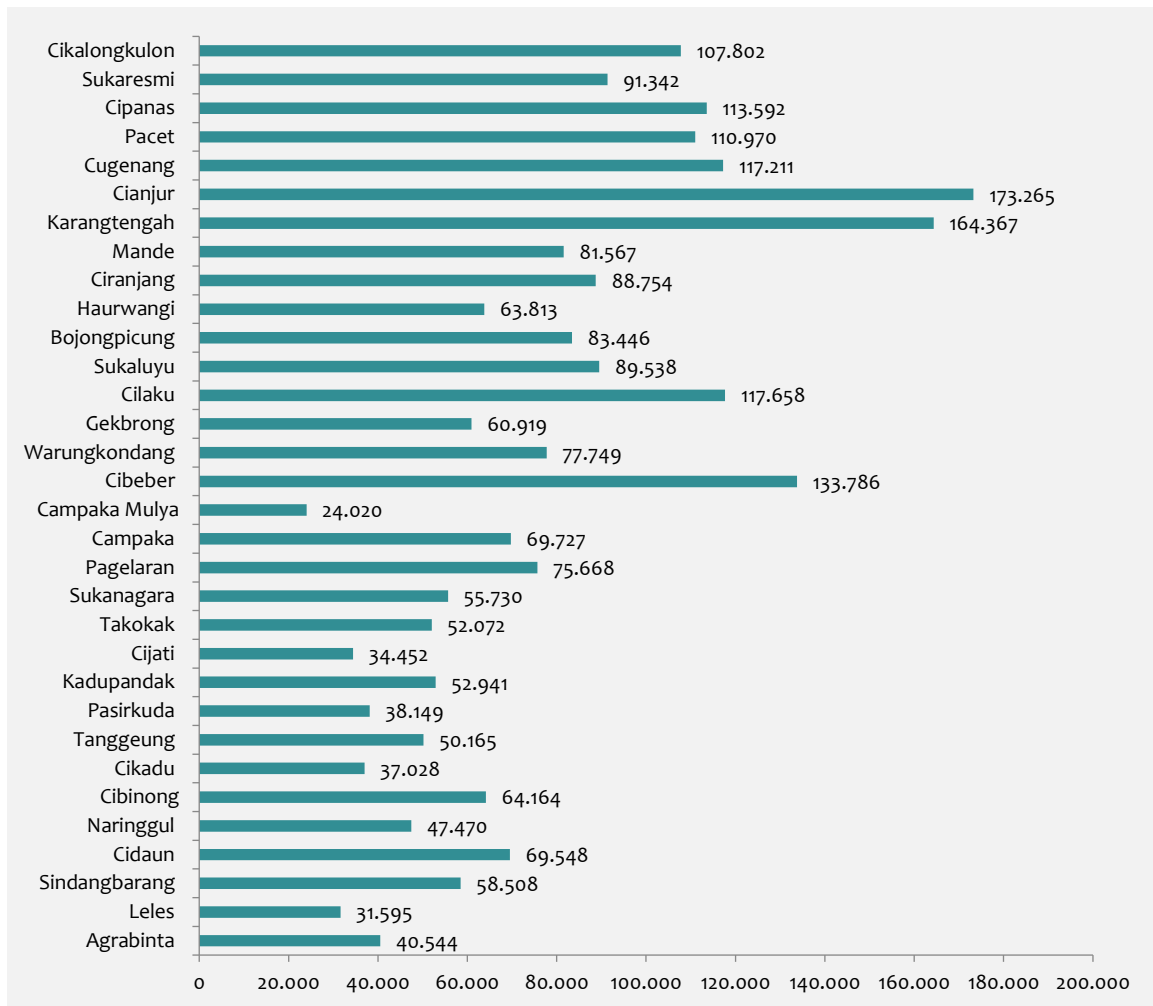
3.3.1. JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK

Mengenai jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Cianjur akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

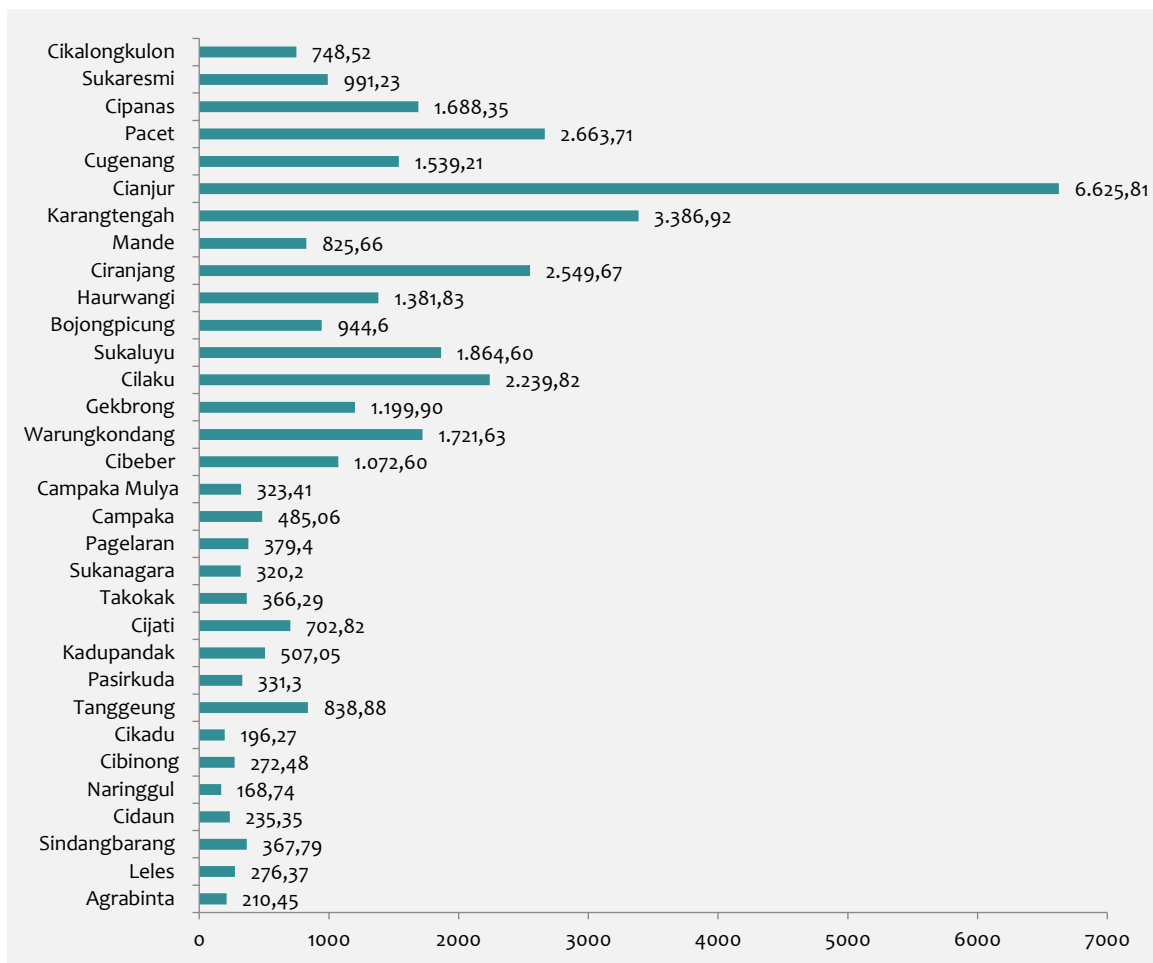
No (1)	Kecamatan (2)	Jumlah (Jiwa) (3)	Luas Wilayah (Km ²) (4)	Kepadatan (Jiwa/Km ²) (5)
1	Agrabinta	40.544	192,65	210,45
2	Leles	31.595	114,32	276,37
3	Sindangbarang	58.508	159,08	367,79
4	Cidaun	69.548	295,51	235,35
5	Naringgul	47.470	281,32	168,74
6	Cibinong	64.164	235,48	272,48
7	Cikadu	37.028	188,66	196,27
8	Tanggeung	50.165	59,8	838,88
9	Pasirkuda	38.149	115,15	331,30
10	Kadupandak	52.941	104,41	507,05
11	Cijati	34.452	49,02	702,82
12	Takokak	52.072	142,16	366,29
13	Sukanagara	55.730	174,05	320,20
14	Pagelaran	75.668	199,44	379,40
15	Campaka	69.727	143,75	485,06
16	Campaka Mulya	24.020	74,27	323,41
17	Cibeber	133.786	124,73	1.072,60
18	Warungkondang	77.749	45,16	1.721,63
19	Gekbrong	60.919	50,77	1.199,90
20	Cilaku	117.658	52,53	2.239,82
21	Sukaluyu	89.538	48,02	1.864,60
22	Bojongpicung	83.446	88,34	944,60
23	Haurwangi	63.813	46,18	1.381,83
24	Ciranjang	88.754	34,81	2.549,67
25	Mande	81.567	98,79	825,66
26	Karangtengah	164.367	48,53	3.386,92
27	Cianjur	173.265	26,15	6.625,81
28	Cugenang	117.211	76,15	1.539,21
29	Pacet	110.970	41,66	2.663,71
30	Cipanas	113.592	67,28	1.688,35
31	Sukaresmi	91.342	92,15	991,23
32	Cikalongkulon	107.802	144,02	748,52
	Cianjur	2.477.560	3614,35	685,48

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021



Gambar III.16. Diagram Jumlah Penduduk di Kabupaten Cianjur

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Cianjur yaitu sebanyak 173.265 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Campaka Mulya yaitu sebanyak 24.020 jiwa.



Gambar III.17. Diagram Kepadatan Penduduk di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

3.3.2. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

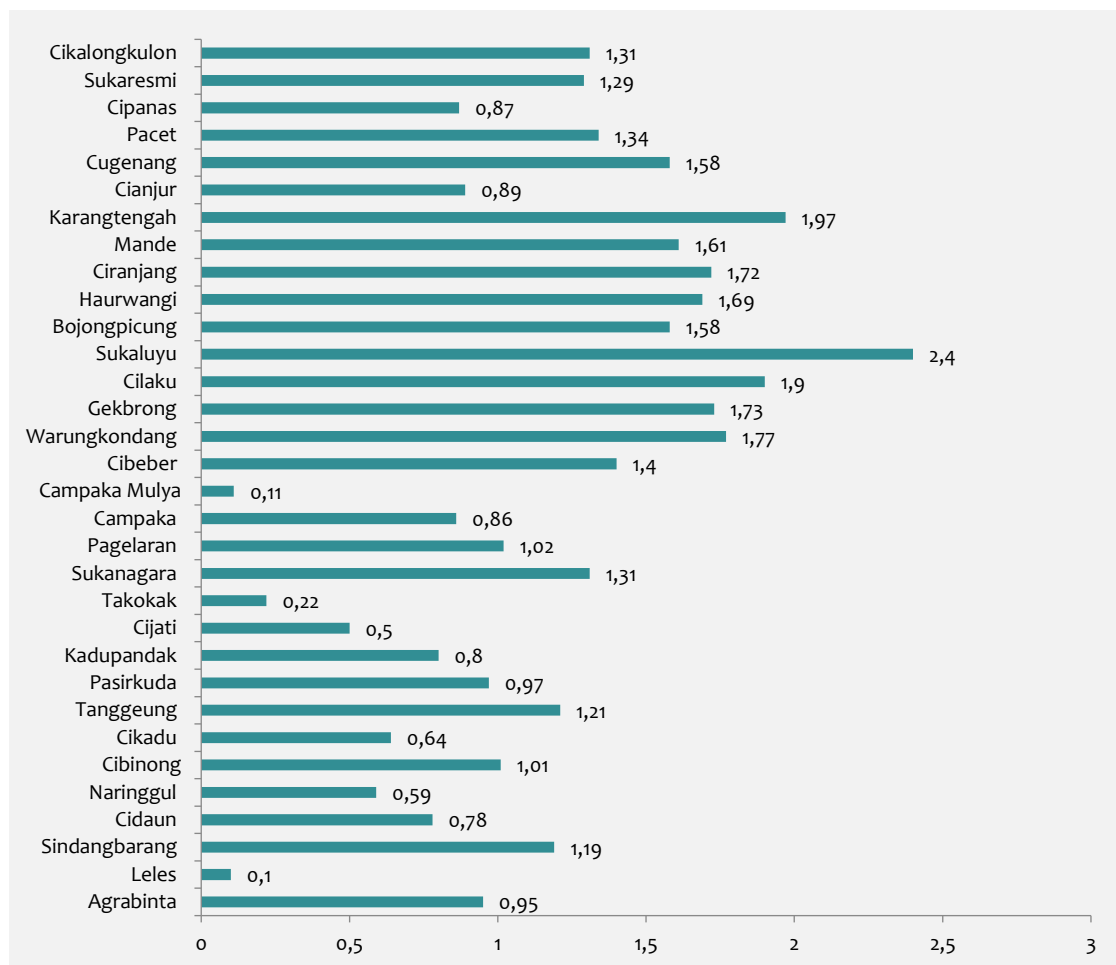
Jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur terus mengalami peningkatan. Terhitung laju pertumbuhan penduduk tahun 2019-2020 sebesar 1,29%. Kecamatan Sukaluyu memiliki laju pertumbuhan tertinggi yaitu 2,40%. Sedangkan Kecamatan Leles memiliki laju pertumbuhan terendah yaitu 0,10%.

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

No (1)	Kecamatan (2)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 (%) (4)
1	Agrabinta	0,95
2	Leles	0,10
3	Sindangbarang	1,19
4	Cidaun	0,78
5	Naringgul	0,59
6	Cibinong	1,01
7	Cikadu	0,64
8	Tanggeung	1,21
9	Pasirkuda	0,97
10	Kadupandak	0,80
11	Cijati	0,50
12	Takokak	0,22

No (1)	Kecamatan (2)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 (%) (4)
13	Sukanagara	1,31
14	Pagelaran	1,02
15	Campaka	0,86
16	Campaka Mulya	0,11
17	Cibeber	1,40
18	Warungkondang	1,77
19	Gekbrong	1,73
20	Cilaku	1,90
21	Sukaluyu	2,40
22	Bojongpicung	1,58
23	Haurwangi	1,69
24	Ciranjang	1,72
25	Mande	1,61
26	Karangtengah	1,97
27	Cianjur	0,89
28	Cugenang	1,58
29	Pacet	1,34
30	Cipanas	0,87
31	Sukaesmi	1,29
32	Cikalongkulon	1,31
	Cianjur	1,29

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2021



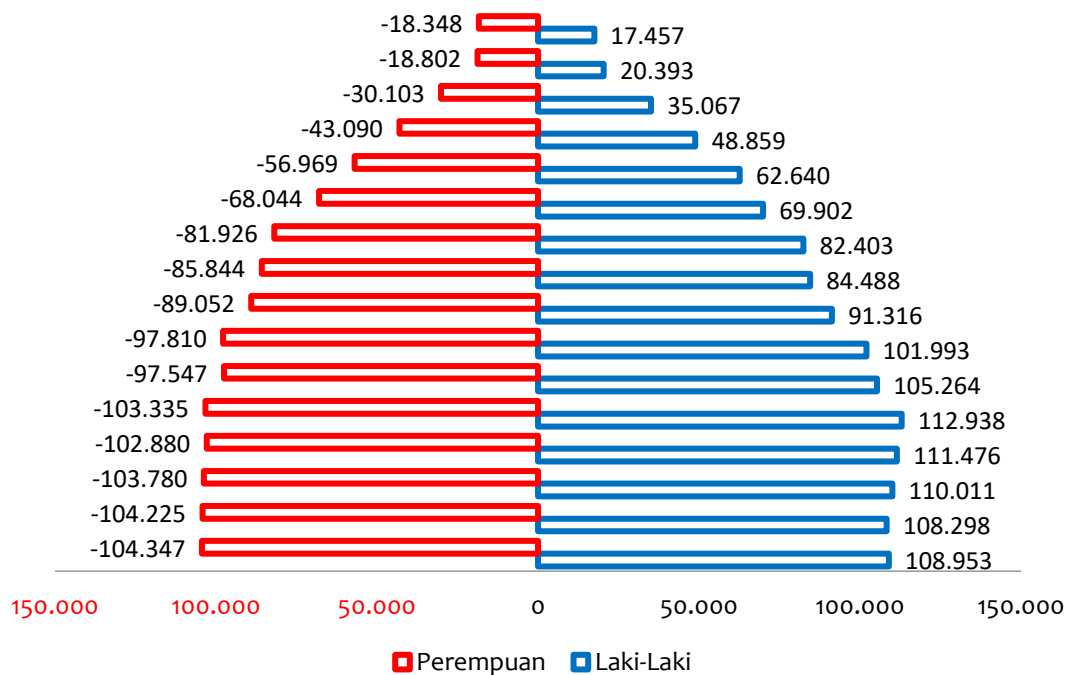
Gambar III.18. Diagram Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

3.3.3. PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN

Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Cianjur akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5. Jumlah penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	108.953	104.347	213.300
5-9	108.298	104.225	212.523
10-14	110.011	103.780	213.791
15-19	111.476	102.880	214.356
20-24	112.938	103.335	216.273
25-29	105.264	97.547	202.811
30-34	101.993	97.810	199.803
35-39	91.316	89.052	180.368
40-44	84.488	85.844	170.332
45-49	82.403	81.926	164.329
50-54	69.902	68.044	137.946
55-59	62.640	56.969	119.609
60-64	48.859	43.090	91.949
65-69	35.067	30.103	65.170
70-74	20.393	18.802	39.195
75+	17.457	18.348	35.805
Total	1.271.458	1.206.102	2.477.560



Gambar III.19. Diagram Piramida Penduduk di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

3.4. KONDISI SARANA DAN PRASARANA**3.4.1. PENDIDIKAN**

Keberhasilan pembangunan di bidang sosial tidak hanya dapat dilihat dari bentuk fisik saja, namun harus dapat dilihat secara keseluruhan yaitu segi fisik dan mental. Segi fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk menuju masyarakat yang cerdas dan sejahtera.

Tabel 3.6. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

No	Status Pendidikan	APM	APK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SD/MI	98,82	102,10
2	SMP/MTs	79,24	95,89
3	SMA/SMK/MA	44,69	62,14

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di dominasi oleh kelompok umur pada jenjang pendidikan SD/MI dan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk terbanyak yang sedang bersekolah adalah di tingkat pendidikan SD/MI.

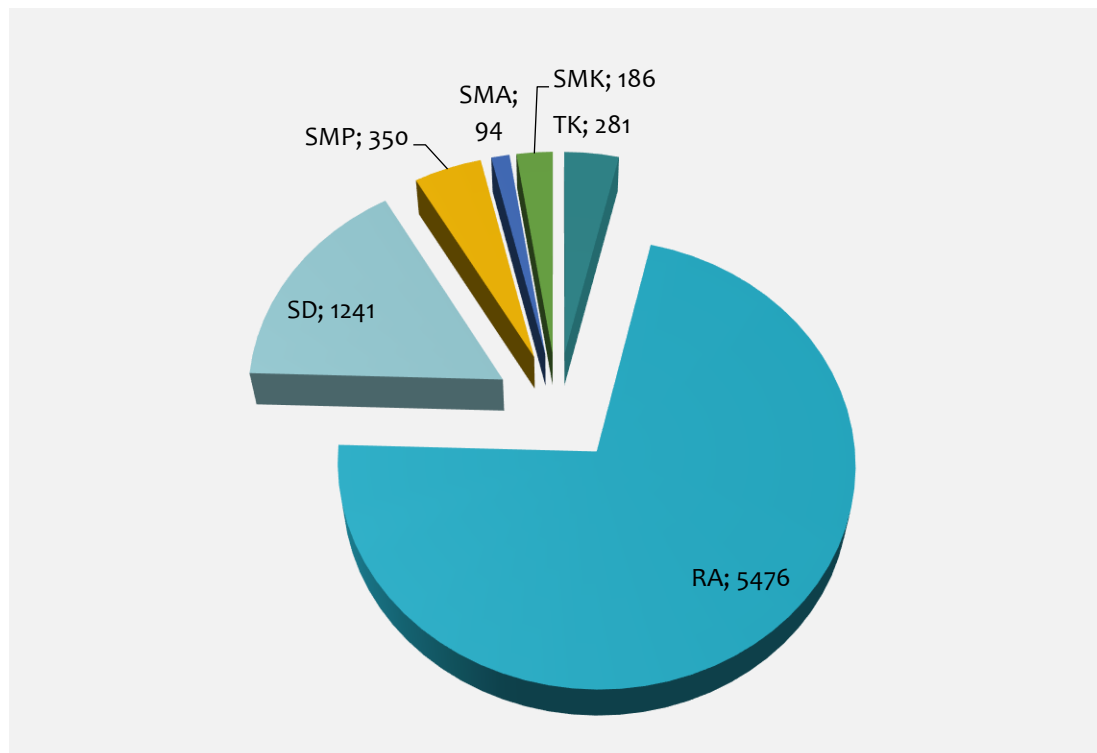
Selain mengetahui Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Cianjur. Dibawah ini juga akan disebutkan sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Cianjur mulai dari sarana pendidikan SD/MI hingga SMA/SMK yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7. Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020/2021

No	Kecamatan	TK	RA	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Agrabinta	3	31	31	7	3	1
2	Leles	1	17	28	5	2	4
3	Sindangbarang	7	28	35	12	4	5
4	Cidaun	7	141	42	15	7	9
5	Naringgul	6	10	37	12	4	3
6	Cibinong	14	121	47	16	4	2
7	Cikadu	3	0	32	13	3	3
8	Tanggeung	2	171	32	8	0	3
9	Pasirkuda	2	28	24	5	2	2
10	Kadupandak	1	16	40	9	3	5
11	Cijati	3	163	30	10	2	6
12	Takokak	11	84	33	11	2	5
13	Sukanagara	16	78	31	8	1	2
14	Pagelaran	3	0	48	9	2	3

No (1)	Kecamatan (2)	TK (3)	RA (4)	SD (5)	SMP (6)	SMA (7)	SMK (8)
15	Campaka	6	66	44	9	0	3
16	Campaka Mulya	1	0	18	4	0	2
17	Cibeber	10	330	62	15	4	9
18	Warungkondang	2	75	29	12	0	8
19	Gekbrong	3	129	25	3	1	1
20	Cilaku	21	189	55	19	6	13
21	Sukaluyu	1	40	35	11	3	7
22	Bojongpicung	6	333	44	6	1	5
23	Haurwangi	6	107	22	6	2	4
24	Ciranjang	10	432	34	14	3	5
25	Mande	6	240	44	6	1	2
26	Karangtengah	23	648	59	18	6	16
27	Cianjur	51	454	65	27	12	21
28	Cugenang	23	183	54	16	2	7
29	Pacet	13	460	28	11	4	11
30	Cipanas	13	467	40	15	4	9
31	Sukaesmi	3	0	39	7	3	2
32	Cikalongkulon	4	435	54	11	3	8
	Cianjur	281	5.476	1.241	350	94	186

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021



Gambar III.20. Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020



Gambar III.21. Salah Satu Sarana Pendidikan di Kabupaten Cianjur

3.4.2. KESEHATAN

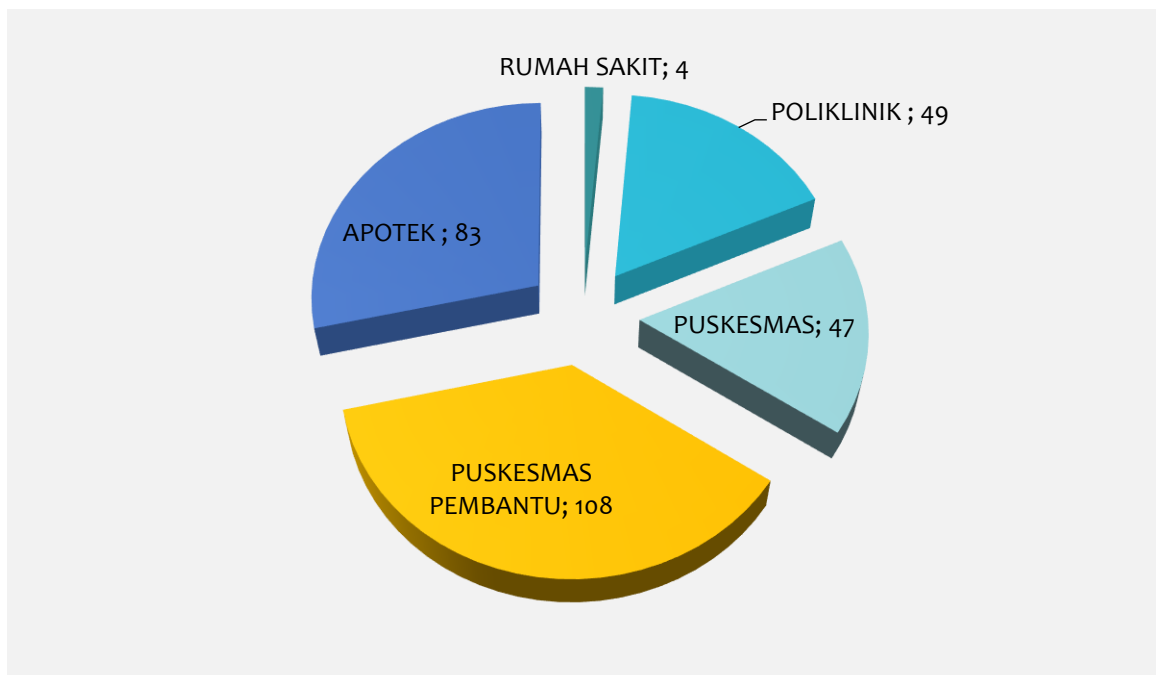
Kebijakan pembangunan di bidang sosial menyangkut berbagai aspek. Selain berdampak pada ekonomi juga dalam sosial politik masyarakat. Di Kabupaten Cianjur sarana kesehatan berupa rumah sakit, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu dan Apotek. Berikut dijelaskan lebih detail mengenai persebaran sarana kesehatan di Kabupaten Cianjur.

Tabel 3.8. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

No (1)	Kecamatan (2)	Rumah Sakit (3)	Poliklinik (4)	Puskesmas (5)	Puskesmas Pembantu (6)	Apotek (7)
1	Agrabinta	0	0	1	1	2
2	Leles	0	0	1	2	2
3	Sindangbarang	0	0	1	3	2
4	Cidaun	0	1	2	3	1
5	Naringgul	0	0	1	4	2
6	Cibinong	0	0	2	6	2
7	Cikadu	0	0	2	2	1
8	Tanggeung	0	0	1	4	1
9	Pasirkuda	0	0	1	2	1
10	Kadupandak	0	1	1	3	2
11	Cijati	0	5	2	1	1
12	Takokak	0	0	1	4	0
13	Sukanagara	0	1	1	4	4

No (1)	Kecamatan (2)	Rumah Sakit (3)	Poliklinik (4)	Puskesmas (5)	Puskesmas Pembantu (6)	Apotek (7)
14	Pagelaran	1	1	2	2	3
15	Campaka	0	2	1	3	2
16	Campaka Mulya	0	0	1	3	0
17	Cibeber	0	1	2	6	5
18	Warungkondang	0	3	1	2	3
19	Gekbrong	0	1	1	1	1
20	Cilaku	0	3	1	6	3
21	Sukaluyu	0	0	1	4	3
22	Bojongpicung	0	1	2	5	3
23	Haurwangi	0	0	1	3	3
24	Ciranjang	0	3	1	4	3
25	Mande	0	1	2	3	2
26	Karangtengah	1	7	2	7	7
27	Cianjur	1	5	3	4	8
28	Cugenang	0	0	2	3	4
29	Pacet	0	3	2	4	3
30	Cipanas	1	5	1	2	3
31	Sukaesmi	0	4	2	3	3
32	Cikalongkulon	0	1	2	4	3
	Cianjur	4	49	47	108	83

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021



Gambar III.22. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2020



Gambar III.23. Salah Satu Sarana Kesehatan di Kabupaten Cianjur

3.4.3. AGAMA

Berdasarkan data pada tahun 2020 di Kabupaten Cianjur mayoritas masyarakat beragama Islam. Akan tetapi ada pula masyarakat yang menganut agama Kristen, katolik, dan Budha. Untuk sarana peribadatan bagi masyarakat di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9. Jumlah Penduduk Menurut Agama yang dianut di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

No (1)	Kecamatan (2)	Islam (3)	Protestan (4)	Katholik (5)	Hindu (6)	Budha (7)	Lainnya (8)
1	Agrabinta	36.999	1	0	2	1	0
2	Leles	29.231	0	0	0	0	0
3	Sindangbarang	54.994	12	2	0	0	1
4	Cidaun	60.960	6	1	0	0	
5	Naringgul	43.862	1	0	0	0	0
6	Cibinong	59.032	4	2	0	0	0
7	Cikadu	34.797	5	0	0	0	0
8	Tanggeung	48.191	5	1	0	0	1
9	Pasirkuda	33.663	7	0	0	0	0
10	Kadupandak	50.303	3	5	2	0	0
11	Cijati	32.203	0	0	0	0	0
12	Takokak	49.596	7	1	0	0	0
13	Sukanagara	54.662	8	12	0	0	0
14	Pagelaran	72.562	1	2	0	0	0
15	Campaka	77.909	94	22	0	0	3
16	Campaka Mulya	67.266	18	0	0	0	2
17	Cibeber	22.839	2	0	1	0	0

No (1)	Kecamatan (2)	Islam (3)	Protestan (4)	Katholik (5)	Hindu (6)	Budha (7)	Lainnya (8)
18	Warungkondang	128.378	65	15	1	7	1
19	Gekbrong	75.618	28	1	0	2	0
20	Cilaku	58.100	14	5	0	0	1
21	Sukaluyu	111.473	515	296	1	47	0
22	Bojongpicung	86.059	323	21	1	0	0
23	Haurwangi	81.897	6	0	0	0	0
24	Ciranjang	62.211	26	5	0	2	0
25	Mande	82.981	3.189	48	0	12	1
26	Karangtengah	156.393	1.752	378	27	40	4
27	Cianjur	166.007	2.856	822	15	1.444	10
28	Cugenang	111.866	51	21	5	7	3
29	Pacet	105.320	615	325	7	152	3
30	Cipanas	108.280	560	610	62	224	1
31	Sukaesmi	85.743	231	180	8	27	2
32	Cikalongkulon	103.853	44	0	0	2	0
	Cianjur	2.353.248	10.449	2.775	132	1.976	33

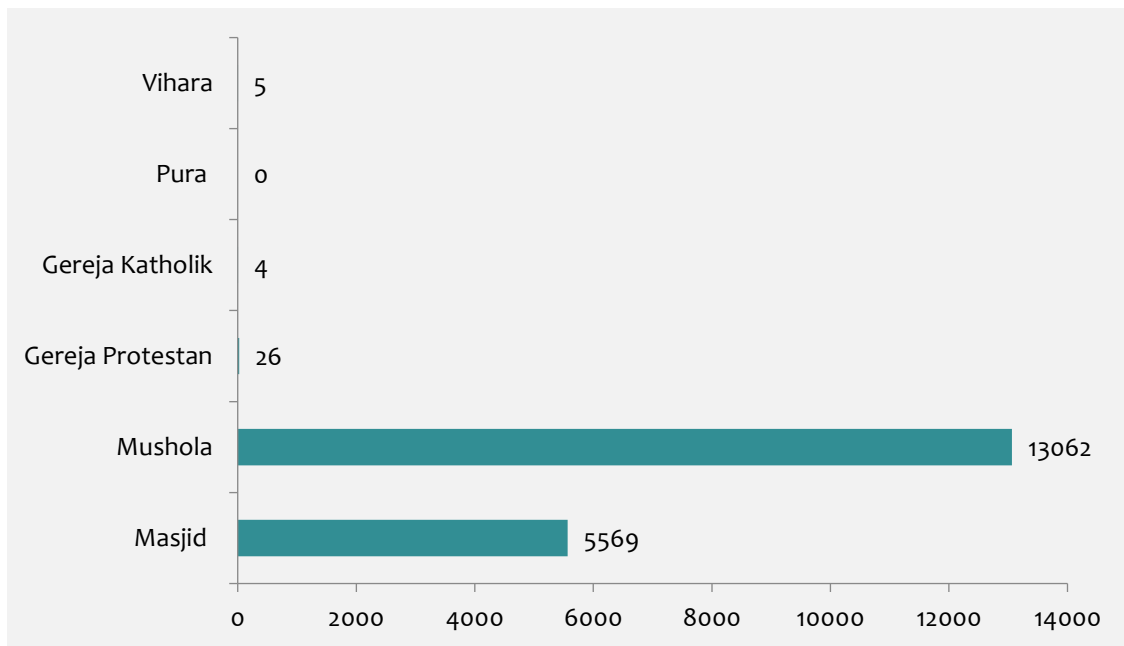
Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

Tabel 3.10. Jumlah Sarana Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018

No (1)	Kecamatan (2)	Masjid (3)	Mushola (4)	Gereja Kristen (5)	Gereja Katholik (6)	Pura (7)	Wihara (8)
1	Agrabinta	201	243	-	-	-	-
2	Leles	171	275	-	-	-	-
3	Sindangbarang	171	451	-	-	-	-
4	Cidaun	272	368	-	-	-	-
5	Naringgul	175	246	-	-	-	-
6	Cibinong	250	530	-	-	-	-
7	Cikadu	145	308	-	-	-	-
8	Tanggeung	192	160	-	-	-	-
9	Pasirkuda	122	329	-	-	-	-
10	Kadupandak	197	404	-	-	-	-
11	Cijati	154	198	-	-	-	-
12	Takokak	237	429	-	-	-	-
13	Sukanagara	133	334	-	-	-	-
14	Pagelaran	266	541	-	-	-	-
15	Campaka	186	488	-	-	-	-
16	Campaka Mulya	96	400	-	-	-	-
17	Cibeber	310	922	-	-	-	-
18	Warungkondang	118	622	-	-	-	-
19	Gekbrong	134	279	-	-	-	-
20	Cilaku	196	530	-	-	-	-
21	Sukaluyu	129	541	-	-	-	-
22	Bojongpicung	156	466	-	-	-	-
23	Haurwangi	112	285	-	-	-	-
24	Ciranjang	127	360	12	-	-	-
25	Mande	147	336	-	-	-	-
26	Karangtengah	175	681	-	-	-	-
27	Cianjur	205	378	7	2	-	1
28	Cugenang	187	574	-	-	-	-

No (1)	Kecamatan (2)	Masjid (3)	Mushola (4)	Gereja Kristen (5)	Gereja Katholik (6)	Pura (7)	Wihara (8)
29	Pacet	145	263	3	-	-	3
30	Cipanas	166	279	3	1	-	-
31	Sukaresmi	156	394	1	1	-	1
32	Cikalongkulon	138	448	-	-	-	-
	Cianjur	5.569	13.062	26	4	-	5

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2018



Gambar III.24. Diagram Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Cianjur



Gambar III.25. Salah Satu Sarana Peribadatan di Kabupaten Cianjur

3.5. PEREKONOMIAN

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Cianjur adalah Pertanian. Kehutanan. Dan Perikanan yang terlihat dari besarnya peranan kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cianjur. Sumbangan terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh kategori Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 3.11. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2020

No (1)	Lapangan Usaha (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13 839 863	15 098 615	15 642 052
2	Pertambangan dan Penggalian	97 644	98 666	99 473
3	Industri Pengolahan	2 908 819	3 272 024	3 356 159
4	Pengadaan Listrik dan Gas	41 558	42 567	41 658
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15 530	17 470	20 616
6	Konstruksi	3 563 839	3 852 942	3 616 188
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7 404 109	7 907 159	7 498 020
8	Transportasi dan Pergudangan	4 124 923	4 583 216	4 635 737
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2 645 056	2 934 933	2 973 921
10	Informasi dan Komunikasi	1 289 262	1 372 308	1 672 049
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	991 312	1 064 306	1 072 731
12	Real Estate	799 824	893 171	911 138
13	Jasa Perusahaan	286 718	326 523	280 064
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 097 565	1 151 671	1 152 640
15	Jasa Pendidikan	1 849 021	2 107 371	2 287 224
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	351 172	383 254	397 134
17	Jasa Lainnya	1 665 030	1 849 857	1 866 686
PDRB		32.349.715,0	42 971 245	46 956 052

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

Pada tabel diatas menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur setiap tahunnya mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Dapat dilihat pada tahun 2020 sebesar 46.956.052 rupiah.

Kontribusi sektor tertinggi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Cianjur sektor tertinggi yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai PDRB sebesar 15.642.052 rupiah. Hal ini terbukti karena Kabupaten Cianjur merupakan penghasil beras terbesar di Jawa Barat dan menjadi lumbung padi nasional. Selain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB Kabupaten Cianjur yaitu perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai PDRB 7.498.020 rupiah dan transportasi dan pergudangan dengan nilai PDRB 4.635.737 rupiah.

Tabel 3.12. Persentase Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Cianjur 2018-2020

No (1)	Lapangan Usaha (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,21	32,15	32,91
2	Pertambangan dan Penggalian	0,23	0,21	0,21
3	Industri Pengolahan	6,77	6,97	7,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04
6	Konstruksi	8,29	8,21	7,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,23	16,84	15,78
8	Transportasi dan Pergudangan	9,6	9,76	9,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,16	6,25	6,26
10	Informasi dan Komunikasi	3	2,92	3,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,27	2,26
12	Real Estate	1,86	1,9	1,92
13	Jasa Perusahaan	0,67	0,7	0,59
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,55	2,45	2,43
15	Jasa Pendidikan	4,3	4,49	4,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,82	0,84
17	Jasa Lainnya	3,87	3,94	3,93
	PDRB	100	100	100

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 32,91 % di tahun 2020. Selain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, dan sektor konstruksi juga memberikan transportasi dan pergudangan besar dengan nilai 15,78% dan 9,75%.

3.6. POTENSI DAERAH

3.6.1. PERTANIAN

Cianjur terkenal sebagai lumbung padi dan memiliki komoditas padi unggulan jenis pandanwangi. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur, ini terbukti dengan terkenalnya produksi beras Cianjur di seluruh Indonesia. Kabupaten Cianjur sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu penghasil padi

terbesar di Jawa Barat. Padi yang dihasilkan para petani di Kabupaten Cianjur sangat dikenal tidak hanya di wilayah Jawa Barat tetapi sudah diakui oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

a. Tanaman Pangan

Tabel 3.13. Luas Tanam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cianjur 2018 (hektar)

No (1)	Kecamatan (2)	Padi (3)	Ubi Kayu (4)	Ubi Jalar (5)	Kacang Kedelai (6)	Kacang Hijau (7)	Jagung (8)
1	Agrabinta	8.177,9	53	0,0	30,0	24,0	349,0
2	Leles	3.968,1	27	10,0	372,4	4,0	241,5
3	Sindangbarang	9.660,1	800	0,0	421,1	6,0	1.475,5
4	Cidaun	7.575,6	1.127	94,0	926,5	79,0	1.665,8
5	Naringgul	5.926,4	4	2,0	288,5	0,0	712,4
6	Cibinong	7.051,8	215	10,0	434,6	7,0	1.205,0
7	Cikadu	5.995,4	56	7,0	414,6	6,0	876,0
8	Tanggeung	4.611,7	506	52,6	238,4	0,0	267,8
9	Pasirkuda	3.929,2	49	8,0	0,0	0,0	220,0
10	Kadupandak	9.457,5	223	30,0	58,0	0,0	365,0
11	Cijati	3.819,6	10	4,0	144,3	1,0	23,0
12	Takokak	3.561,0	86	45,0	0,0	0,0	36,0
13	Sukanagara	1.721,7	25	33,0	0,0	0,0	253,0
14	Pagelaran	9.085,2	21	23,0	175,4	0,0	320,0
15	Campaka	3.921,0	882	42,8	0,0	0,0	1.236,3
16	Campaka Mulya	4.366,1	7	3,0	0,0	0,0	132,0
17	Cibeber	6.494,6	362	25,0	192,4	0,0	374,0
18	Warungkondang	4.906,6	1	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Gekbrong	3.164,7	11	12,0	0,0	0,0	17,0
20	Cilaku	6.637,2	0	0,0	293,4	0,0	0,0
21	Sukaluyu	5.198,7	0	2,0	527,1	0,0	40,0
22	Bojongpicung	5.971,4	12	0,0	588,7	0,0	259,0
23	Haurwangi	2.940,6	45	21,7	301,1	8,9	206,6
24	Ciranjang	4.105,4	10	6,0	608,8	0,0	21,0
25	Mande	3.983,2	139	0,0	192,4	0,0	255,6
26	Karangtengah	6.208,8	3	50,1	218,4	0,0	78,9
27	Cianjur	2.748,2	11	8,9	0,0	0,0	16,7
28	Cugenang	4.410,9	11	12,9	0,0	0,0	15,0
29	Pacet	928,2	0	0,0	0,0	0,0	34,6
30	Cipanas	346,2	14	13,0	0,0	0,0	34,0
31	Sukaresmi	4.907,3	65	8,0	0,0	0,0	117,0
32	Cikalongkulon	6.111,9	243	69,0	0,0	27,0	224,6
	Cianjur	161.892,2	5.018	593,0	6.426,1	162,9	11.072,3

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel diatas luas tanam padi terbesar berada di Kecamatan Kadupandak dengan luas tanam 9.457,5 hektar. Luas tanam ubi kayu terbesar berada di Kecamatan Cidaun dengan luas tanam 1.127 hektar. Luas tanam ubi jalar terbesar berada di Kecamatan Cidaun dengan luas tanam 94,0 hektar. Luas tanam kacang kedelai terbesar berada di

Kecamatan Cidaun dengan luas tanam 926,5 hektar. Luas tanam kacang hijau terbedar berada di Kecamatan Cidaun dengan luas tanam 79,0 hektar. Dan untuk luas tanam jagung terbesar berada di Kecamatan Cidaun dengan luas tanam 1.665,8 hektar.



Gambar III.26. Hasil Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Cianjur

b. Hortikultura

Selain sektor tanaman pangan khususnya padi yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Cianjur. Sektor hortikultura juga menjadi salah satu sektor unggulan dengan berbagai jenis tanaman hortikultura. Untuk lebih jelasnya luas tanam dan produksi hortikultura di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Cianjur Tahun 2020 (hektar)

No (1)	Kecamatan (2)	Kacang Panjang (3)	Bawang Putih (6)	Cabai Besar (7)	Cabai Rawit (8)	Kubis (9)	Tomat (10)	Petsai (11)
1	Agrabinta	20	0	27	7	0	3	0
2	Leles	6	0	0	0	0	0	0
3	Sindangbarang	20	0	50	25	0	0	5
4	Cidaun	0	0	20	7	0	1	0
5	Naringgul	0	0	8	2	1	5	0
6	Cibinong	4	0	75	26	0	13	0
7	Cikadu	2	0	85	41	15	2	11
8	Tanggeung	12	0	22	16	0	0	0
9	Pasirkuda	7	0	59	15	20	7	18

No (1)	Kecamatan (2)	Kacang Panjang (3)	Bawang Putih (6)	Cabai Besar (7)	Cabai Rawit (8)	Kubis (9)	Tomat (10)	Petsai (11)
10	Kadupandak	13	0	13	21	0	14	4
11	Cijati	6	0	4	0	0	3	0
12	Takokak	5	5	300	182	18	74	0
13	Sukanagara	4	46	115	54	65	71	64
14	Pagelaran	14	0	9	11	0	7	0
15	Campaka	94	30	319	277	212	231	201
16	Campaka Mulya	8	45	86	29	21	34	28
17	Cibeber	8	0	13	9	0	4	0
18	Warungkondang	8	15	26	19	26	29	43
19	Gekbrong	6	22	86	65	27	90	20
20	Cilaku	6	0	1	3	0	3	0
21	Sukaluyu	0	0	4	0	0	0	0
22	Bojongpicung	2	0	4	0	0	0	0
23	Haurwangi	4	0	42	10	0	4	0
24	Ciranjang	19	0	26	13	0	0	0
5	Mande	21	0	45	20	0	5	0
26	Karangtengah	7	0	0	1	0	1	0
27	Cianjur	2	0	0	0	0	2	0
28	Cugenang	21	50	52	94	153	300	124
29	Pacet	0	74	59	34	137	23	97
30	Cipanas	0	5	36	38	224	55	159
31	Sukaresmi	38	10	22	21	3	26	8
32	Cikalongkulon	190	0	150	120	0	75	0
	Cianjur	547	302	1.758	1.160	922	1.082	782

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021



Gambar III.27. Hasil Panen Tanaman Sayuran di Kabupaten Cianjur

3.6.2. PARIWISATA

Daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Cianjur beraneka ragam, diantaranya terdiri dari wisata alam, pertanian (agrowisata) dan wisata budaya yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi daya tarik kunjungan wisata. Daya tarik alam pegunungan merupakan andalan Kabupaten Cianjur, selain potensi perkebunan hortikultura yang dikembangkan sebagai wisata agro. Wisata yang tersedia di Kabupaten Cianjur diantaranya sebagai berikut:

a. Kebun Raya Cibodas

Kebun Raya Cibodas terletak di Kompleks Hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango, Desa Cimacan, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Topografi lapangannya bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian kurang lebih 1.300 s.d. 1.425 meter di atas permukaan laut dengan luas 84,99 hektar. Temperatur rata-rata 20,06 °C, kelembaban 80,82 % dan rata-rata curah hujan 2.950 mm per tahun.



Gambar III.28. Kebun Raya Cibodas

b. Istana Cipanas

Istana Cipanas yang merupakan Istana Kepresidenan yang menjadi salah satu wisata budaya yang ada di Kabupaten Cianjur. Istana Cipanas yang

sering disebut dengan Istana Kepresidenan terletak di kaki Gunung Gede, Jawa Barat. Tepatnya lebih kurang 103 km dari Jakarta ke arah Bandung melalui Puncak. Istana ini terletak di Desa Cipanas, kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Luas areal kompleks istana ini lebih kurang 26 hektare, namun sampai saat ini hanya 7.760 m² yang digunakan untuk bangunan. Selebihnya dipenuhi dengan tanaman dan kebun tanaman hias yang asri, kebun sayur dan tanaman lain yang ditata seperti hutan kecil.



Gambar III.29. Istana Cipanas

c. Taman Nasional Gede Pangrango Rarahan

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) adalah salah satu Wisata Alam yang bisa Anda nikmati di kawasan Wisata Cibodas. Gunung Gede Pangrango inilah yang menjadi sumber keindahan bagi alam sekitar termasuk wisata alam lainnya seperti Kebun Raya Cibodas dan Bumi Perkemahan Mandalawangi. Memiliki luas 21.975 hektare, kawasan Taman Nasional ini ditutupi oleh hutan hujan tropis pegunungan sehingga memiliki peranan penting dalam sejarah konservasi di Indonesia.



Gambar III.30. Taman Nasional Gede Pangrango Rarahan

d. Taman Bunga Nusantara

Taman Bunga Nusantara adalah sebuah taman bunga seluas 35 hektare yang terletak dekat Gunung Gede Pangrango dan Kebun Teh Bogor. Taman yang mulai dirintis tahun 1992 dan diresmikan tahun 1995 ini memiliki luas sama dengan lebih dari 1/3 Kebun Raya Bogor yang 87 hektar.



Gambar III.31. Kebun Bunga Nusantara

e. Pantai Jayanti

Pantai Jayanti berdekatan dengan Cagar Alam Bojonglarang, pelabuhan nelayan, Pantai Rancabuaya dan Pantai Santolo. Akses menuju pantai bisa

melalui 3 rute umum yaitu menempuh jalur 1) Cianjur – Cianjur – Cibeber – Sukanagara – Tanggeng – Sindangbarang – Cidaun - Pelabuhan Jayanti, 2) Garut-Pamengpeuk-Santolo-Rancabuaya-Cidaun-Pantai Jayanti, 3) Ciwidey – Rancabali – Naringgul – Cidaun - Pantai Jayanti. Karena Pantai Jayanti merupakan pantai bagian selatan Indonesia. Pantai Jayanti terletak di Desa Cidamar, Cidaun, Cianjur ini menawarkan pantai pasir yang cukup panjang dengan batu karang yang dihantam ombak samudra.



Gambar III.32. Pantai Jayanti

BAB IV

METODOLOGI KERJA

4.1. METODOLOGI PELAKSANAAN KERJA

4.1.1 METODE PENGUMPULAN DATA

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang diperkuat dengan pendekatan kualitatif. Secara konkret metode pengumpulan data tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. *Desk study* dan *Literature Review* (Kajian Kepustakaan)

Secara proses, studi diawali dengan melakukan kajian berbagai pustaka yang berkaitan dengan Penataan Daerah.

Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk pengkayaan data dan informasi untuk mendukung kelengkapan sumber data dan kedalaman analisis. Kegiatan pengumpulan data sekunder tersebut antara lain mencakup:

- a. Mencari literatur (artikel, buku dan laporan riset yang belum diterbitkan mengenai Penataan Daerah di Jawa Barat atau wilayah lainnya)

Kajian kepustakaan yang dilakukan yaitu mempelajari lebih dalam mengenai analisis potensi daerah, penataan daerah khususnya pemekaran wilayah, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum wilayah, dan studi mengenai pembangunan wilayah berkelanjutan.

b. Mencari data di internet

Pencarian data di internet mengenai Penataan Daerah di Jawa Barat dimana beberapa daerah di Jawa Barat sudah direncanakan untuk dilakukan pemekaran, seperti misalnya pada berita elektronik pasundanekspres.co tanggal 27 Agustus 2019 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dorong pemekaran 5 wilayah di Jawa Barat. Kelima wilayah tersebut diantaranya adalah: pembentukan DOB Kabupaten Cianjur Selatan dan Kota Cipanas pemekaran Kabupaten induk Kabupaten Cianjur, pembentukan DOB Kabupaten Bekasi Utara pemekaran induk Kabupaten Bekasi, pembentukan DOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan pemekaran induk Kabupaten Tasikmalaya, pembentukan DOB Kota Cikampek pemekaran induk Kabupaten Karawang, dan pembentukan DOB Kabupaten Bandung Timur pemekaran induk Kabupaten Bandung. Untuk mendapatkan referensi lebih lanjut dapat dicari melalui mesin pencari google ataupun yang lainnya.

2. Pengamatan Langsung (Survey Lapangan)

Merupakan metode atau tindakan yang dilakukan setelah kita berada di lapangan pada wilayah kajian melalui pengamatan dan pendokumentasian langsung terhadap kondisi di lapangan. Pengamatan langsung di lapangan misalnya dengan melakukan triangulasi data sekunder penggunaan lahan dengan kondisi eksisting penggunaan lahan di lapangan; pendokumentasian adat dan tradisi masyarakat; melakukan pengamatan terhadap kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum; pendokumentasian kekayaan alam, mengamati potensi ekonomi misalnya keberadaan pusat-pusat perbelanjaan; dan lain sebagainya. Hasil dari perolehan data tersebut disimpan sebagai acuan untuk membuat laporan kondisi eksisting kawasan kajian.



Gambar IV.1. Tradisi Kuda Kosong di Cianjur

Sumber: budayajawa.id (diakses pada 1 Juli 2021 pukul 10.29 WIB)



Gambar IV.2. Salah Satu Pusat Perbelanjaan di Cianjur

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang dihadapi. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu metode survei dan wawancara.

Dalam metode survei terdapat beberapa alat yang harus tersedia untuk melakukan sebuah rekaman data. Alat tersebut diantaranya adalah Kamera atau *Video recorder* yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan dilapangan dan mendapatkan gambar mengenai kondisi lapangan serta kepentingan lainnya yang perlu diabadikan.

3. Wawancara (*Indepth interview*)

Wawancara dilakukan kepada *stakeholders* termasuk pemerintah dan masyarakat di daerah yang menjadi sasaran studi dari tingkat kelurahan/desa hingga kota/kabupaten agar didapat data-data mengenai penataan daerah dan pengaruhnya bagi perekonomian, kendala dan masalah serta solusinya menurut mereka serta masukan-masukan dari masyarakat dan pemerintah setempat.

Indepth interview akan dilakukan dalam bentuk wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh atau pelaku kunci yang terkait dengan isu/permasalahan penataan daerah yang disesuaikan dengan daya dukung. Wawancara merupakan proses antara pewawancara (*Interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewed*) melalui komunikasi langsung atau dapat juga dikatakan sebagai proses percakapan tatap muka (*face to face*) antara *interviewer* dengan *interviewed* dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu aspek yang dinilai dan telah dirancang sebelumnya.

Sasaran *indepth interview* tersebut mencakup antara lain: aparat di lingkungan pemerintahan seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekda, OPD terkait, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya.

Metode wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan, keluhan, kendala dan potensi yang bisa digali. Sesi ini sebaiknya dijalankan sebagai cara untuk mengenal masyarakat dan mengetahui keinginan yang dapat ditampung serta aspirasi masyarakat dalam kegiatan penyusunan program.



Gambar IV.3. Kegiatan Interview Terkait Penataan Daerah di Kabupaten Cianjur (1)



Gambar IV.4. Kegiatan Interview Terkait Penataan Daerah di Kabupaten Cianjur (2)

Instrumen pertanyaan dalam *indepth interview* mencakup alasan akan dilakukannya penataan wilayah (pemekaran wilayah) di Kabupaten Cianjur hingga kesiapan Kabupaten Cianjur melakukan pemekaran wilayah. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada *stakeholder* seperti:

- a. Bagaimana perkembangan wilayah Kabupaten Cianjur hingga saat ini/saat ini jika dilihat dari dimensi geografi, dimensi demografi, dan dimensi sistem? (untuk mengetahui perkembangan wilayah atau kondisi eksisting Kabupaten Cianjur dari berbagai dimensi)
- b. Bagaimana permasalahan di Kabupaten Cianjur dapat menyebabkan penataan daerah khususnya pemekaran wilayah menjadi *urgent* untuk dilakukan? (untuk mengetahui faktor-faktor penataan wilayah (pemekaran wilayah) sehingga hal tersebut *urgent* untuk dilakukan)
- c. Bagaimana persiapan dokumen-dokumen maupun strategi yang akan dilakukan agar proses penataan daerah (pemekaran wilayah) ini berhasil dilakukan? (untuk mengetahui seberapa jauh Kabupaten Cianjur mempersiapkan penataan wilayah (pemekaran wilayah))
- d. Bagaimana proses yang dilakukan selama mempersiapkan penataan wilayah (pemekaran wilayah)? (untuk mengetahui hambatan atau tantangan yang dihadapi selama proses mempersiapkan penataan wilayah (pemekaran wilayah))
- e. Apakah sudah memperkirakan dampak yang terjadi jika penataan daerah (pemekaran wilayah) berhasil atau gagal dilakukan? Bagaimana dampak tersebut? (untuk mengetahui perkiraan dampak positif dan negatif dari proses penataan daerah (pemekaran wilayah))

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada tokoh penting di lingkungan masyarakat seperti:

- a. Bagaimana perkembangan aspek yang saudara geluti selama ini di Kabupaten Cianjur? Apakah aspek tersebut merupakan salah satu aspek terpenting yang dipersiapkan dalam proses penataan daerah (pemekaran wilayah)? (untuk mengetahui seberapa penting aspek tersebut terhadap perencanaan penataan daerah (pemekaran wilayah))
- b. Bagaimana pendapat saudara mengenai perencanaan penataan daerah (pemekaran wilayah) yang akan dilakukan di Kabupaten Cianjur? (untuk mengetahui pendapat tokoh-tokoh penting di lingkungan masyarakat terkait dengan penataan daerah (pemekaran wilayah))
- c. Bagaimana peran saudara dan/atau masyarakat terhadap perencanaan penataan daerah (pemekaran wilayah)? (untuk mengetahui peran tokoh-tokoh penting di lingkungan masyarakat terkait dengan penataan daerah (pemekaran wilayah))
- d. Bagaimana permasalahan di Kabupaten Cianjur dapat menyebabkan penataan daerah khususnya pemekaran wilayah menjadi *urgent* untuk dilakukan? (untuk mengetahui faktor-faktor penataan wilayah (pemekaran wilayah) sehingga hal tersebut *urgent* untuk dilakukan)

4. Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan untuk penyusunan Kajian Penataan Daerah di Kabupaten Cianjur terdiri dari data sekunder dan data primer. Mengenai kebutuhan data sekunder dan data primer dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Matriks Kebutuhan Data

No	Jenis Aspek	Jenis Data		Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Geografis	Luas wilayah Kabupaten Cianjur	Dokumen dan Peta	• Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur • BPBD Kabupaten Cianjur
		Hidrografi	Dokumen dan Peta	
		Kerawanan Bencana	Dokumen dan Peta	
2	Demografi	Jumlah Penduduk	Dokumen	• Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur
		Distribusi Penduduk	Dokumen	
		Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)	Dokumen	
3	Sosial	Kriminalitas	Dokumen	• Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur • Dinas Sosial Kabupaten Cianjur
		Konflik Sosial	Dokumen	
		Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Dokumen	
		Kohesivitas Sosial	Dokumen	
		Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	
4	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Dokumen	• Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur
		Potensi Unggulan Daerah	Dokumen	
5	Keuangan Daerah	Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk	Dokumen	• Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
		Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan	Dokumen	
		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen	

No	Jenis Aspek	Jenis Data		Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kemampuan penyelenggaraan pemerintah	Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	Dokumen	Bappeda Kabupaten Cianjur
		Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	Dokumen	
		Aksesibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur	Dokumen	
		Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Induk	Dokumen	
		Rancangan Rencana Tata Ruang Calon Daerah Persiapan	Dokumen	

4.1.2 METODE ANALISIS

Kajian ini secara umum menggunakan analisa kuantitatif dengan menggunakan penentuan skor terhadap setiap indikator yang menjadi persyaratan kelayakan pembentukan daerah baru seperti yang diuraikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan juga menggunakan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah. Dari data yang diperoleh, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa secara deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan hasil kajian.

Data yang digunakan dalam analisis setiap indikator bersumber dari data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan meliputi data provinsi dalam angka, kabupaten dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan beberapa data sekunder lainnya yang bersumber dari kantor-kantor dinas dan badan yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara data primer yang digunakan bersumber dari wawancara dengan narasumber tokoh, terutama di wilayah-wilayah pemekaran.

Analisa data dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan.

1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian akademis terhadap rencana pembentukan daerah.
2. Persyaratan teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
3. Sedangkan persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

4.1.2.1. TATA CARA PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS

A. Faktor dan Indikator

Untuk melakukan analisis penilaian persyaratan teknis terdapat beberapa faktor dan indikator yang harus dianalisis. Berikut ini, faktor dan indikator yang digunakan dalam penilaian persyaratan teknis sesuai Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007, antara lain:

Tabel 4.2. Faktor dan Indikator Penilaian Persyaratan Teknis

NO (1)	FAKTOR (2)	INDIKATOR (3)	KETERANGAN (4)
1.	Kependudukan	Jumlah Penduduk	Jumlah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
		Kepadatan penduduk	Rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif
2.	Kemampuan Ekonomi	PDRB non migas perkapita	Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk di suatu daerah
		Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan nilai PRD non migas atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya
		Kontribusi PDRB non migas	Persentase PDRB non migas kabupaten/kota terhadap PDRB non migas provinsi dan atau persentase PDRB non migas provinsi terhadap PDB Nasional
3.	Potensi Daerah	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
		Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	Sejumlah toko yang terdiri dari paling sedikit ada 10 toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.
		Rasio pasar per 10.000 penduduk	Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, biasanya aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.
		Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	
		Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	
		Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	
		Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	Tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, dan

NO (1)	FAKTOR (2)	INDIKATOR (3)	KETERANGAN (4)
			klinik.
		Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	Dokter, mantri kesehatan/ perawat, dan sejenisnya, tidak termasuk bidan, yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka praktek maupun tidak.
		Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	Alat untuk mengangkut orang seperti bemo, bajaj dan motor, mobil, perahu/jukung baik yang menggunakan tenaga penggerak motor tempel atau tidak. Perahu motor menggunakan motor penggerak dipasang tidak permanen maupun kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, motor dipasang secara permanen di dalamnya.
		Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	Rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan non PLN sebagai alat penerangan rumah
		Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	
		Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun keatas	
		Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun keatas	
		Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	
4.	Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS	Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan daribagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/kota).
		Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	
		Rasio PDS terhadap PDRB non migas	
5.	Sosial Budaya	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	Bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan peribadatan sesuai dengan agama yang dianut.
		Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	Tempat (fasilitas) yang digunakan untuk melakukan aktivitas olah raga baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup (seperti lapangan sepak bola, bola voli, bulu tangkis dan kolam renang).
		Jumlah balai pertemuan	Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.
6.	Sosial Politik	Rasio penduduk yang ikt pemilu legislatif	Penduduk yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan UU Pemilu.

NO (1)	FAKTOR (2)	INDIKATOR (3)	KETERANGAN (4)
		penduduk yang mempunyai hak pilih	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan	Organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemasyarakatan.
7.	Luas Daerah	Luas wilayah keseluruhan	Luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk kabupaten/kota atau 4 sampai dengan 12 mil laut dari pantai untuk provinsi.
		Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung.
8.	Pertahanan	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	Aparat pertahanan adalah anggota TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang menjadi anggota satuan organik TNI di wilayah calon daerah otonom.
		Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	Adalah ciri wilayah yang ditunjukan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain).
9.	Keamanan	Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	
10.	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Merupakan indeks komposit yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat taraf hidup (kemajuan) masyarakat.
11.	Rentang Kendali	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	Jarak rata-rata kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten), dan rata-rata lama waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten).
		Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	

Sumber: PP No.78 Tahun 2007

B. Perhitungan Indikator

Perhitungan indikator penilaian persyaratan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 yaitu:

Tabel 4.3. Perhitungan Indikator

No (1)	FAKTOR (2)	INDIKATOR (3)	PERHITUNGAN (4)
1	Kependudukan	Jumlah Penduduk	Semua orang yang berdomisili di suatu daerah

No (1)	FAKTOR (2)	INDIKATOR (3)	PERHITUNGAN (4)
			selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
2	Kemampuan Ekonomi	Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk dibagi luas wilayah efektif.
		PDRB non migas perkapita	Nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk.
		Pertumbuhan ekonomi	Nilai besaran PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke-t dikurangi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dibagi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dikalikan 100.
		Kontribusi PDRB non migas	Untuk kabupaten/kota adalah nilai PDRB non migas kabupaten atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku dikalikan 100.
3	Potensi Daerah	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	Jumlah Bank dan Non Bank dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
		Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	Jumlah kelompok pertokoan/toko dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
		Rasio pasar per 10.000 penduduk	Jumlah pasar dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
		Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	Jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
		Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	Jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
		Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	Jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun.
		Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
		Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
		Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100.
		Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.
		Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	Jumlah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor.
		Persentase pekerja	Jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA

No (1)	FAKTOR (2)	INDIKATOR (3)	PERHITUNGAN (4)
		yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun keatas	dibagi jumlah penduduk usia 18 tahun dikali 100.
		Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun keatas	Jumlah pekerja yang berpendidikan S-1 dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun dikali 100.
		Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	Jumlah PNS Gol I/II/III/IV dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000.
4	Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS	Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi (untuk pembentukan kabupaten/ kota).
		Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah penduduk.
		Rasio PDS terhadap PDRB non migas	Jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah PDRB non migas.
5	Sosial Budaya	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
		Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
		Jumlah balai pertemuan	Jumlah gedung yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.
6	Sosial Politik	Rasio penduduk yang ikt pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak plih	Jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu legislatif dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin.
		Jumlah organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.
7	Luas Daerah	Luas wilayah keseluruhan	Jumlah luas daratan ditambah luas lautan.
		Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	Jumlah luas wilayah yang dapat digunakan untuk permukiman dan industri.
8	Pertahanan	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	Jumlah personil aparat pertahanan dibandingkan dengan luas wilayah.
		Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	Ciri wilayah yang ditinjau dari sudut pandang pertahanan, pemberian nilai tergantung kepada hamparan fisik dan posisi calon daerah otonom. Tingkatan penilaian calon daerah otonom dimulai dari nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut: a. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan.

No (1)	FAKTOR (2)	INDIKATOR (3)	PERHITUNGAN (4)
			b. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai. c. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan. d. Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan, daratan dan pantai, atau daratan.
9	Keamanan	Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil aparat keamanan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Dengan melihat tiga aspek kehidupan manusia, yaitu: usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent living). Usia hidup diukur dengan AHH (Angka Harapan Hidup) yang secara teknis dihitung dengan metode tidak langsung berdasarkan rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dan rata-rata anak yang masih hidup.
11	Rentang Kendali	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	Jumlah jarak dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.
		Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	Jumlah waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.

Sumber: Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007

C. Metode Penilaian

Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.

1. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.
2. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk.

Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya.

Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya.

Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya.

Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif. Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembanding Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembanding Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan Pembanding Kota.

Pembanding Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Pembanding Kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.

Dalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.

Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.

Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator

lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

D. Pembobotan

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom. Berikut ini bobot untuk setiap indikator penilaian persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007, yaitu:

Tabel 4.4. Bobot Faktor Dan Indikator

No (1)	FAKTOR DAN INDIKATOR (2)	BOBOT (3)
1	Kependudukan	20
	a. Jumlah Penduduk	15
	b. Kepadatan penduduk	5
2	Kemampuan Ekonomi	15
	a. PDRB non migas perkapita	5
	b. Pertumbuhan ekonomi	5
	c. Kontribusi PDRB non migas	5
3	Potensi Daerah	15
	a. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	2
	b. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	c. Rasio pasar per 10.000 penduduk	1
	d. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
	e. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
	f. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	g. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	h. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	i. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	1
	j. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	k. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1
	l. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun keatas	1
	m. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun keatas	1
	n. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1
4	Kemampuan Keuangan	15
	a. Jumlah PDS	5
	b. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	5
	c. Rasio PDS terhadap PDRB non migas	5
5	Sosial Budaya	5
	a. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	b. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2
	c. Jumlah balai pertemuan	1
6	Sosial Politik	5
	a. Rasio penduduk yang ikt pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih	3
	b. Jumlah organisasi kemasyarakatan	2
7	Luas Daerah	5

No (1)	FAKTOR DAN INDIKATOR (2)	BOBOT (3)
	a. Luas wilayah keseluruhan	2
	b. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5
	a. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3
	b. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	2
9	Keamanan	5
	a. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	5
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	5
	a. Indeks Pembangunan Manusia	5
11	Rentang Kendali	5
	a. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	2
	b. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	3
TOTAL		100

Sumber: PP No.78 Tahun 2007

E. Kriteria Kelayakan

Dari hasil penjumlahan keseluruhan Nilai indikator, akan dapat diketahui Nilai Total Persyaratan Teknis tiap Calon Daerah Persiapan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Nilai Total tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk mengkategorikan calon-calon Daerah Persiapan ke dalam lima kategori, yaitu **sangat tidak mampu, tidak mampu, kurang mampu, mampu, dan sangat mampu**. Dimana selanjutnya kelima kategori tersebut menentukan kriteria Calon Daerah Persiapan yang terbagi menjadi **rekomendasi** dan **ditolak**.

Tabel 4.5. Kriteria Kelayakan Calon Daerah Persiapan Berdasarkan Nilai Total Persyaratan Teknis

No. (1)	Nilai Total (2)	Kategori (3)	Keterangan (4)
1.	420 s/d 500	Sangat Mampu	Rekomendasi
2.	340 s/d 419	Mampu	Rekomendasi
3.	260 s/d 339	Kurang Mampu	Ditolak
4.	180 s/d 259	Tidak Mampu	Ditolak
5.	100 s/d 179	Sangat Tidak Mampu	Ditolak

Sumber: PP No.78 Tahun 2007

Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor

kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75).

Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

Selain itu, analisa data dalam penelitian ini juga merujuk pada ketentuan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah yaitu persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan dasar kapasitas daerah.

4.1.2.2. TATA CARA PENILAIAN PERSYARATAN DASAR KEWILAYAHAN

1. Luas Wilayah Minimal

Yang dimaksud dengan “luas wilayah minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan” adalah luas rata-rata wilayah pada Daerah provinsi, luas rata-rata wilayah pada Daerah kabupaten atau luas rata-rata wilayah pada Daerah kota dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah dengan luas wilayah Daerah provinsi terkecil, Daerah kabupaten terkecil atau Daerah kota terkecil yang ada dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi 2 (dua).

- a. Luas wilayah minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kabupaten

$$LWM = \frac{\bar{x} LDP + LDPK}{2}$$

Keterangan:

LWM = luas wilayah minimal kabupaten.

$\bar{x} LDP$ = rata-rata luas wilayah Daerah kabupaten dalam kelompok pulau atau kepulauan.

LDPK = luas wilayah Daerah kabupaten terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.

b. Luas wilayah minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kota

$$LWM = \frac{\bar{x} LDP + LDPK}{2}$$

Keterangan:

LWM = luas wilayah minimal kota.

$\bar{x} LDP$ = rata-rata luas wilayah Daerah kota terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.

LDPK = luas wilayah Daerah kabupaten terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.

2. Jumlah Penduduk Minimal

Yang dimaksud dengan “jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan” adalah jumlah rata-rata penduduk pada Daerah provinsi, jumlah rata-rata penduduk pada Daerah kabupaten atau jumlah rata-rata penduduk pada Daerah kota dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah dengan jumlah penduduk Daerah provinsi yang paling sedikit, jumlah penduduk Daerah kabupaten yang paling sedikit atau jumlah penduduk Daerah kota yang paling sedikit yang ada dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi 2 (dua).

a. Jumlah penduduk minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kabupaten:

$$JPM = \frac{\bar{x} JPP + JPPK}{2}$$

Keterangan:

JPM = jumlah penduduk minimal kabupaten.

$\bar{x} JPP$ = rata-rata jumlah penduduk Daerah kabupaten dalam kelompok pulau atau kepulauan.

JPPK = jumlah penduduk Daerah kabupaten terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.

- b. Jumlah penduduk minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kota:

$$JPM = \frac{\bar{x}JPP + JPPK}{2}$$

Keterangan:

JPM = jumlah penduduk minimal kota.

$\bar{x}JPP$ = rata-rata jumlah penduduk Daerah kota dalam kelompok pulau atau kepulauan.

JPPK = jumlah penduduk Daerah kota terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.

3. Batas Wilayah

- Batas wilayah antara daerah induk dengan daerah sekitarnya
- Batas wilayah antara daerah calon daerah persiapan dengan daerah induk setelah dikurangi calon daerah persiapan.

Batas dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar skala 1:5.000 dan/atau citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 (empat) meter. Batas wilayah digambarkan dalam peta dasar diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan per undang-undangan.

4. Cakupan Wilayah

Rincian nama-nama kecamatan pada masing-masing kabupaten dan nama-nama desa pada masing-masing kecamatan yang masuk menjadi Cakupan Wilayah.

- Cakupan Wilayah Daerah Persiapan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota.
- Cakupan wilayah daerah persiapan tidak boleh melebihi cakupan wilayah daerah induknya
- Daerah yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan harus sudah memiliki sarana dan prasarana dasar pemerintahan (kantor bupati/walikota, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah untuk Daerah Persiapan provindi

dan kantor kecamatan untuk Daerah Persiapan Kabupaten/Kota).

- d. Cakupan wilayah dituangkan dalam peta wilayah berdasarkan peta batas yang terdiri dari peta wilayah daerah induk, peta Cakupan Daerah Persiapan, dan peta Daerah induk dikurangi Cakupan Daerah Persiapan (dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota, nama kecamatan, garis batas wilayah, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon provinsi apabila ada).

5. Batas Usia Minimal Daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan

- a. Batas usia minimal Daerah Kabupaten/Kota dihitung sejak pembentukannya dengan Undang-Undang dan batas usia minimal kecamatan dihitung sejak dibentuknya kecamatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Batas usia minimal Daerah Kabupaten/Kota induk 7 (tujuh) tahun sejak pembentukan.
- c. Batas usia minimal kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Tabel 4.6. Parameter dan Indikator Penilaian Persyaratan Dasar

Kewilayahan

NO (1)	PARAMETER (2)	INDIKATOR (3)	KETERANGAN (4)
1.	Luas Wilayah Minimal	1. Luas wilayah minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kabupaten 2. Luas wilayah minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kota	$LWM = \frac{\text{Luas Wilayah Minimal} \times LDP + LDPK}{2}$ Keterangan: LWM = luas wilayah minimal kabupaten. x LDP = rata-rata luas wilayah Daerah kabupaten dalam kelompok pulau atau kepulauan. LDPK = luas wilayah Daerah kabupaten terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.

NO (1)	PARAMETER (2)	INDIKATOR (3)	KETERANGAN (4)
2.	Jumlah Penduduk Minimal	Jumlah penduduk minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kabupaten Jumlah penduduk minimal untuk pembentukan calon Daerah Persiapan kota	$JPM = \frac{\bar{x} \text{ JPP} + \text{JPPK}}{2}$ Keterangan: JPM = jumlah penduduk minimal kota. $\bar{x} \text{ JPP}$ = rata-rata jumlah penduduk Daerah kota dalam kelompok pulau atau kepulauan. JPPK = jumlah penduduk Daerah kota terkecil dalam kelompok pulau atau kepulauan.
3.	Batas Wilayah	Batas wilayah antara daerah induk dengan daerah sekitarnya Batas wilayah antara daerah calon daerah persiapan dengan daerah induk setelah dikurangi calon daerah persiapan	Batas dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar skala 1:5.000 dan/atau citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 (empat) meter
4.	Cakupan Wilayah	a. Cakupan Wilayah Daerah Persiapan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten b. 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota. Cakupan wilayah daerah persiapan tidak boleh melebihi cakupan wilayah daerah induknya Daerah yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan harus sudah memiliki sarana dan prasarana dasar pemerintahan Peta batas yang terdiri dari peta wilayah daerah induk, peta Cakupan Daerah Persiapan, dan peta Daerah induk dikurangi Cakupan Daerah Persiapan	Kantor bupati/walikota, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah untuk Daerah Persiapan provinsi dan kantor kecamatan untuk Daerah Persiapan Kabupaten/Kota Dilengkapi dengan daftar nama kabupaten/kota, nama kecamatan, garis batas wilayah, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon provinsi apabila ada
5.	Batas Usia Minimal Daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan	a. Batas usia minimal Daerah Kabupaten/Kota dihitung sejak pembentukannya dengan Undang-Undang b. Batas usia minimal	

NO (1)	PARAMETER (2)	INDIKATOR (3)	KETERANGAN (4)
		kecamatan dihitung sejak dibentuknya kecamatan dengan Peraturan Daerah Kabuapten/Kota	
		Batas usia minimal Daerah Kabupaten/Kota induk 7 (tujuh) tahun sejak pembentukan	
		Batas usia minimal kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.	

Sumber: RPP Tentang Desain Besar Penataan Daerah

4.1.2.3. TATA CARA PENILAIAN PERSYARATAN DASAR KAPASITAS DAERAH

Penilaian persyaratan dasar kapasitas Daerah dilakukan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan mengenai kelayakan suatu calon Daerah Persiapan dilihat dari pemenuhan persyaratan dasar kapasitas Daerah. Persyaratan dasar kapasitas Daerah terdiri dari beberapa parameter, masing-masing parameter terdiri dari 1 (satu) atau lebih indikator, dan pada masing-masing indikator terdapat 1 (satu) atau lebih subindikator.

A. Parameter

Parameter merupakan keadaan atau kondisi yang utama yang menjadi dasar dalam penilaian persyaratan dasar kapasitas Daerah. Parameter persyaratan dasar kapasitas Daerah terdiri atas:

1. Parameter geografi;
2. Parameter demografi;
3. Parameter keamanan;
4. Parameter sosial, politik, adat, dan tradisi;
5. Parameter potensi ekonomi;
6. Parameter keuangan Daerah,
7. Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Indikator

Masing-masing parameter terdiri atas 1 (satu) atau lebih indikator. Indikator merupakan suatu keadaan atau kondisi yang secara lebih khusus dipandang dapat memberikan gambaran mengenai parameter.

C. Subindikator

Setiap indikator kemudian dielaborasi lagi menjadi subindikator. Subindikator merupakan 1 (satu) atau lebih ukuran yang dipandang dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai suatu indikator, yang berupa data atau fakta yang berasal dari lapangan. Subindikator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Datanya tersedia;
2. Mudah dihitung;
3. Relevan;
4. Terukur;
5. Reliabel.

Penilaian persyaratan kapasitas Daerah dilakukan dengan melakukan penghitungan terhadap parameter, indikator, dan subindikator sebagaimana tersebut di atas untuk menghasilkan skor subindikator, bobot subindikator, nilai subindikator, nilai total, dan kriteria kelayakan.

D. Skor dan Bobot Subindikator

1. Skor Subindikator

Masing-masing subindikator diberi skor. Penerapan metode pemberian skor (scoring) pada masing-masing subindikator dilakukan dengan tujuan:

- a. Menjaga objektivitas;
- b. Membakukan cara penilaian;
- c. Mempermudah penghitungan.

Untuk menentukan skor masing-masing subindikator, terlebih dahulu ditetapkan rentang skor subindikator 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), dengan skor terendah 1 (satu) dan skor tertinggi 5 (lima). Untuk sebagian besar subindikator, skor 5 (lima) menunjukkan kondisi yang maksimal, paling baik, atau paling diharapkan, sedangkan skor 1 (satu) menunjukkan kondisi yang minimal, paling buruk, atau paling tidak diharapkan. Sedangkan untuk

subindikator aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, dan aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur, skor 5 (lima) menunjukkan kondisi yang minimal, paling buruk atau paling tidak diharapkan. Sedangkan skor 1 (satu) menunjukkan kondisi yang sudah maksimal, sudah baik, atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

2. Bobot Subindikator

Masing-masing subindikator mempunyai bobot tertentu. Bobot masing-masing subindikator berbeda-beda sesuai dengan tingkat kepentingan relatifnya terhadap indikator maupun parameter persyaratan dasar kapasitas Daerah. Subindikator yang dipandang relatif memiliki kepentingan yang lebih tinggi memiliki bobot yang lebih besar, sedangkan subindikator yang dipandang relatif memiliki kepentingan yang lebih rendah memiliki bobot yang lebih kecil. Bobot masing-masing subindikator adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7. Parameter, Indikator, dan Bobot Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah

PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
1. GEOGRAFI	1. Lokasi Ibukota	1. Rasio ketimpangan jarak antara batas terdekat dan batas terjauh Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan calon ibukotanya.	0,00-0,20 =1 0,21-0,40 =2 0,41-0,60 =3 0,61-0,80 =4 0,81-1,00 =5	2
		2. Ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan calon Daerah Persiapan yang sudah ada berita acara penyerahannya dihadapan notaris.	a. Provinsi (ha): <80 = 1 81-90 = 2 91-100 = 3 101-110 = 4 >110 = 5 b. Kabupaten (ha): <30 = 1 31-40 = 2 41-50 = 3 51-60 = 4 >60 = 5 c. Kota (ha): <20 = 1 21-30 = 2 31-40 = 3 41-50 = 4 >50 = 5	2
	2. Hidografi	1. Potensi air permukaan dan air tanah di cakupan wilayah calon Daerah Persiapan dengan klasifikasi dan kriteria tinggi, sedang, atau rendah.	Sangat tinggi = 5 Tinggi = 4 Sedang = 3 Rendah = 2 Sangat rendah = 1	1

PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		2. Ketersedian air baku untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dan untuk kegiatan ekonomi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	$\leq 10\% = 1$ $10,1\%-20\% = 2$ $20,1\%-30\% = 3$ $30,1\%-40\% = 4$ $>40\% = 5$	1
	3. Kerawanan Bencana	1. Jumlah jenis potensi bencana yang diukur dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Tinggi = 1 Sedang = 3 Rendah = 5	1
		2. Jumlah kejadian bencana alam dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	a. Provinsi Bencana <5 kali = 5 Bencana 5-9 kali = 4 Bencana 10-14 kali = 3 Bencana 15-19 kali = 2 Bencana ≥ 20 kali = 1 b. Kabupaten Tanpa bencana = 5 Bencana ≤ 5 kali = 4 Bencana 6-10 kali = 3 Bencana 11-15 kali = 2 Bencana >15 kali = 1 c. Kota Bencana ≤ 2 kali = 5 Bencana 3-5 kali = 4 Bencana 6-8 kali = 3 Bencana 9-11 kali = 2 Bencana ≥ 12 kali = 1	2
2. DEMOGRAFI	4. Kualitas SDM	1. Rasio angka lama bersekolah di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata angka lama bersekolah berdasarkan	$<0,70 = 1$	4

PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		pengelompokan pulau atau kepulauan.		
		2. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	4
		3. Rasio APK pendidikan dasar di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata APK berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	4
	5. Distribusi Penduduk	Rasio tingkat kepadatan penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata kepadatan penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	3
3. KEAMANAN	6. Tindakan Kriminal Umum	Rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dengan rata-rata rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$\geq 1,00 = 1$ $0,90-0,99 = 2$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 4$ $< 0,70 = 5$	2
	7. Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang terjadi di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	a. Provinsi Konflik < 5 kali = 5 Konflik 5-9 kali = 4 Konflik 10-14 kali = 3	2

PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
			Konflik 15-19 kali = 2 Konflik ≥ 20 kali = 1 b. Kabupaten Tanpa konflik = 5 Konflik ≤ 5 kali = 4 Konflik 6-10 kali = 3 Konflik 11-15 kali = 2 Konflik > 15 kali = 1 c. Kota Konflik ≤ 2 kali = 5 Konflik 3-5 kali = 4 Konflik 6-8 kali = 3 Konflik 9-11 kali = 2 Konflik ≥ 12 kali = 1	
4. SOSIAL, POLITIK, ADAT, DAN TRADISI	8. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah penduduk yang ikut pemilihan umum terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	$> 70\%$ = 5 $60\%-70\%$ = 4 $50\%-59\%$ = 3 $40\%-49\%$ = 2 $< 40\%$ = 1	3
	9. Kohesivitas Sosial	Jumlah etnik/subetnik di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	1 etnik/subetnik = 5 2-3 etnik/subetnik = 4 4-5 etnik/subetnik = 3 6-7 etnik/subetnik = 2 > 8 etnik/subetnik = 1	2
	10. Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	> 40 organisasi kemasyarakatan = 5 31-40 organisasi kemasyarakatan = 4 21-30 organisasi kemasyarakatan = 3 11-20 organisasi kemasyarakatan = 2 < 10 organisasi kemasyarakatan = 1	3
5. EKONOMI	11. Pertumbuhan Ekonomi	1. Rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun di Cakupan Wilayah calon Daerah	$\geq 1,00$ = 5 0,90-0,99 = 4 0,80-0,89 = 3 0,70-0,79 = 2	3

PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		Persiapan terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan selama 5 (lima) tahun.	$<0,70 = 1$	
		2. Rasio pendapatan perkapita di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap pendapatan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	3
		3. Rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap IPM berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $<0,70 = 1$	3
		4. Rasio persentase angka kemiskinan di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan terhadap persentase angka kemiskinan berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$<0,70 = 5$ $0,70-0,79 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,90-0,99 = 2$ $\geq 1,00 = 1$	3
	12. Potensi Unggulan Daerah	1. Jumlah cadangan tambang minyak dan gas yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	• Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi dan sudah diusahakan = 5 • Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi tetapi belum diusahakan = 4 • Ada cadangan terukur tetapi belum layak secara ekonomi = 3 • Ada cadangan tetapi belum terukur = 2 • Tidak ada cadangan = 1	1

PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		2. Jumlah cadangan tambang mineral dan batu bara yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	• Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi dan sudah diusahakan = 5 • Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi tetapi belum diusahakan = 4 • Ada cadangan terukur tetapi belum layak secara ekonomi = 3 • Ada cadangan tetapi belum terukur = 2 • Tidak ada cadangan = 1	1
		3. Jumlah cadangan panas bumi yang terukur di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	• Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi dan sudah diusahakan = 5 • Ada cadangan terukur yang layak secara ekonomi tetapi belum diusahakan = 4 • Ada cadangan terukur tetapi belum layak secara ekonomi = 3 • Ada cadangan tetapi belum terukur = 2 • Tidak ada cadangan = 1	1
		4. Rasio nilai kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian perkapita nasional.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	1
		5. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor industri perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor industri perkapita berdasarkan pengelompokan pulau	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	1

PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		dan kepulauan.		
		6. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel, dan restoran perkapita nasional.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	1
		7. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor pengangkutan dan komunikasi perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	1
		8. Rasio nilai kontribusi PDRB sektor keuangan dan persewaan perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor keuangan dan persewaan perkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$ $0,80-0,89 = 3$ $0,70-0,79 = 2$ $< 0,70 = 1$	1
		9. Rasio nilai PDRB sektor jasa	$\geq 1,00 = 5$ $0,90-0,99 = 4$	1

PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		perkapita di wilayah induk terhadap nilai kontribusi PDB sektor jasa perperkapita berdasarkan pengelompokan pulau dan kepulauan.	0,80-0,89 = 3 0,70-0,79 = 2 <0,70 = 1	
6. KEUANGAN DAERAH	13. Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) induk terhadap total pendapatan Daerah induk.	≥1,00 = 5 0,90-0,99 = 4 0,80-0,89 = 3 0,70-0,79 = 2 <0,70 = 1	5
	14. Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan	Rasio pendapatan asli calon Daerah Persiapan terhadap total PAD induk.	≥1,00 = 1 0,90-0,99 = 2 0,80-0,89 = 3 0,70-0,79 = 4 <0,70 = 5	8
	15. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) induk dalam 5 (lima) tahun terakhir.	WTP 5 kali selama 5 tahun = 5 WTP 4 kali selama 5 tahun = 4 WTP 3 kali selama 5 tahun = 3 WTP 3 kali selama 5 tahun = 2 WTP 1 kali selama 5 tahun = 1	4
7. KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	16. Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan	1. Rata-rata jumlah murid sekolah dasar (SD) pada setiap ruang belajar SD di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	≤32 = 1 32-35 = 2 36-39 = 3 40-42 = 4 ≥43 = 5	2
		2. Rata-rata jumlah murid sekolah menengah pertama (SMP) pada setiap ruang belajar SMP di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	≤32 = 1 32-35 = 2 36-39 = 3 40-42 = 4 ≥43 = 5	2
		3. Rata-rata jumlah murid sekolah menengah atas/sekolah menengah	≤32 = 1 32-35 = 2	1

PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		kejuruan (SMA/SMK) pada setiap ruang belajar SMA/SMK di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	36-39 = 3 40-42 = 4 ≥43 = 5	
	17. Aksesibilitas Pelayanan Dasar Kesehatan	1. Rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	<2500 = 1 2500-2999 = 2 3000-3499 = 3 3500-3999 = 4 >4000 = 5	3
		2. Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit/puskesmas rawat inap terhadap jumlah penduduk di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan.	≤1000= 1 1001-1500 = 2 1501-2000 = 3 2001-2500 = 4 <2500= 5	2
	18. Aksesibilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur	1. Rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah pada calon Daerah Persiapan terhadap rata-rata panjang jalan dibandingkan rata-rata luas wilayah di kelompok pulau dan kepulauan.	0,80-100= 1 0,60-0,79 = 2 0,41-0,59 = 3 0,21-0,40 = 4 <0,20= 5	5
		2. Rasio jumlah pelabuhan yang menghubungkan antar pulau di Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan dibandingkan dengan rata-rata jumlah pelabuhan di kelompok pulau dan kepulauan, untuk wilayah kepulauan.	0,80-100= 1 0,60-0,79 = 2 0,41-0,59 = 3 0,21-0,40 = 4 <0,20= 5	5
	19. Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah Induk	1. Rasio jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) terhadap jumlah penduduk di Daerah induk terhadap rata-rata pegawai ASN berdasarkan kelompok pulau dan	0,80-100= 1 0,60-0,79 = 2 0,41-0,59 = 3 0,21-0,40 = 4 <0,20= 5	2

PARAMETER (1)	INDIKATOR (2)	SUBINDIKATOR (3)	SKOR SUBINDIKATOR (4)	BOBOT SUB INDIKATOR (5)
		kepulauan.		
		2. Rasio jumlah pegawai ASN pada calon Daerah Persiapan terhadap jumlah pegawai ASN di Daerah induk.	$0,80-100 = 1$ $0,60-0,79 = 2$ $0,41-0,59 = 3$ $0,21-0,40 = 4$ $<0,20 = 5$	2
	20. Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Calon Daerah Persiapan	Ketersediaan dokumen rancangan rencana tata ruang wilayah (RTRW) calon Daerah Persiapan.	- Sudah masuk dalam dokumen RTRW induk = 5 - Sudah ada kajian tapi belum masuk dalam dokumen RTRW induk = 3 - Belum ada kajian = 1	2
TOTAL BOBOT SUBINDIKATOR				100

Sumber: RPP Tentang Desain Besar Penataan Daerah

E. Kriteria Kelayakan

Dari hasil penjumlahan keseluruhan Nilai Subindikator, akan dapat diketahui Nilai Total Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah tiap Calon Daerah Persiapan. Sesuai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Daerah, Nilai Total tersebut kemudian digunakan sebagai acuan untuk mengkategorikan calon-calon Daerah Persiapan ke dalam dua kategori, yaitu **berkapasitas** dan **tidak berkapasitas**. Dimana selanjutnya kedua kategori tersebut menentukan kriteria Calon Daerah Persiapan yang terbagi menjadi **layak** dan **tidak layak**.

Tabel 4.8. Kriteria Kelayakan Calon Daerah Persiapan Berdasarkan Nilai Total Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah

No.	Nilai Total	Kategori	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	400-500	Berkapasitas	Layak
2.	Di bawah 400	Tidak Berkapasitas	Tidak Layak

4.1.2.4. TATA CARA PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Persyaratan administratif dibuat berdasarkan tata urutan yaitu pemenuhan persyaratan secara berurutan, artinya persyaratan kedua dan ketiga tidak dapat dilaksanakan sebelum persyaratan sebelumnya terpenuhi.

A. Keputusan Musyawarah Desa yang Akan Menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota

Berita acara persetujuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memuat:

- Persetujuan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan kabupaten/kota
- Persetujuan nama Daerah Persiapan kabupaten/kota
- Persetujuan calon ibu kota Daerah Persiapan

Keputusan musyawarah desa menjadi Lampiran Berita Acara persetujuan kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi Cakupan wilayah Daerah Persiapan kabupaten/kota.

B. Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota Daerah Induk dengan DPRD Kabupaten/Kota Induk

Berita acara persetujuan DPRD kabupaten/kota induk dan bupati/walikota kabupaten/kota induk memuat:

- a. Pembentukan Daerah Persiapan kabuapten/kota
- b. Cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten/kota
- c. Nama Daerah Persiapan kabupaten/kota
- d. Lokasi ibu kota Daerah Persiapan kabupaten dengan menunjuk kecamatan yang menjadi lokasi ibu kota dan menyebutkan koordinatnya yang tergambar dalam peta sebagai lampiran
- e. Dukungan dana dari kabupaten/kota induk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan kabupaten/Kota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah persiapan
- f. Penyerahan personel, sarana dan prasarana, serta dokumen yang dibutuhkan oleh Daerah Persiapan

C. Persetujuan Bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dari Daerah Provinsi yang Mencakup Daerah Persiapan Kabupaten/Kota yang akan Dibentuk

Berita acara persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD provinsi dan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakup Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk yang memuat:

- a. Pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota
- b. Cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten/kota
- c. Nama daerah persiapan kabupaten/kota
- d. Lokasi ibu kota Daerah Persiapan kabupaten/kota dengan menunjuk kecamatan yang menjadi lokasi ibu kota dan menyebutkan koordinat pendekatan lokasi kantor bupati/walikota yang tergambar dalam peta sebagai lampiran
- e. Pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah Persiapan kabupaten/kota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak peresmian sebagai Daerah Persiapan

Tabel 4.9. Parameter dan Indikator Penilaian Persyaratan Administratif

No	PARAMETER	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
1.	Keputusan Musyawarah Desa yang Akan Menjadi Cakupan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan Daerah Persiapan kabuapten/kota
		Persetujuan nama Daerah Persiapam kabupaten/kota
		Persetujuan calon ibu kota Daerah Persiapan
2.	Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota Daerah Induk dengan DPRD Kabupaten/Kota Induk	Pembentukan Daerah Persiapan kabuapten/kota
		Cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten/kota
		Nama Daerah Persiapan kabupaten/kota
		Lokasi ibu kota Daerah Persiapan kabupaten dengan menunjuk kecamatan yang menjadi lokasi ibu kota dan menyebutkan koordinatnya yang tergambar dalam peta sebagai lampiran
		Dukungan dana dari kabupaten/kota induk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan kabupaten/Kota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah persiapan
		Penyerahan personel, sarana dan prasarana, serta dokumen yang dibutuhkan oleh Daerah Persiapan
3.	Persetujuan Bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dari Daerah Provinsi yang Mencakup Daerah Persiapan Kabupaten/Kota yang akan Dibentuk	Pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota
		Cakupan wilayah daerah persiapan kabupaten/kota
		Nama daerah persiapan kabupaten/kota

No	PARAMETER	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
		Lokasi ibu kota Daerah Persiapan kabupaten/kota dengan menunjuk kecamatan yang menjadi lokasi ibu kota dan menyebutkan koordinat pendekatan lokasi kantor bupati/walikota yang tergambar dalam peta sebagai lampiran
		Pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah Persiapan kabupaten/kota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak peresmian sebagai Daerah Persiapan

Sumber: RPP Desain Besar Penataan Daerah

4.1.3 METODE PERUMUSAN REKOMENDASI/KESIMPULAN/RENCANA

1. Perumusan rekomendasi yang menekankan tanggung jawab dan kemanfaatan bagi masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai yang mencakup efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Perumusan rekomendasi yang mempertimbangkan karakteristik regional dan tahapan-tahapan pelaksanaannya.
3. Perumusan rekomendasi yang mempertimbangkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
4. Perumusan rekomendasi untuk dilakukan studi secara mendalam terhadap faktor-faktor pemicu pemekaran maupun kelayakan pemekarannya (*feasibility*) sendiri.
5. Perumusan rekomendasi kerjasama antar pemerintah daerah
6. Perumusan upaya pengendalian pertambahan jumlah daerah baru dengan cara:
 - a. Mengusulkan untuk dilakukan revisi peraturan perundangan yang memperketat persyaratan teknis maupun persyaratan administratif dalam upaya pembentukan daerah baru.
 - b. Mengusulkan untuk dikeluarkan kebijakan yang bersifat disinsentif terhadap pemekaran daerah.

BAB V

HASIL ANALISIS

5.1. ANALISIS PENENTUAN JUMLAH DAERAH OTONOM BARU

Dalam menentukan jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dilakukan dengan mengidentifikasi kawasan perkotaan, kesamaan karakteristik fisik wilayah, kedekatan lokasi geografi, dan aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis akan menghasilkan berbagai alternatif jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Cianjur.

A. Analisis Kawasan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Analisis kawasan perkotaan dilakukan untuk mengetahui wilayah mana saja yang memenuhi kriteria sebagai kota. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai kota jika memiliki ciri-ciri seperti berikut ini:

Tabel 5.1 Indikator Kawasan Perkotaan

No (1)	Karakteristik (2)	Indikator (3)	Keterangan (4)
1	Fisik	Penggunaan Lahan	Penggunaan Lahan Pertanian <25%
		Ketersediaan Sarana dan Utilitas	Ketersediaan Sarana Pendidikan Tinggi
			Ketersediaan Sarana Kesehatan Tinggi
		Pelayanan Listrik	>67,2% terlayani listrik
2	Sosial Kependudukan	Kepadatan Listrik	Kepadatan penduduk tinggi
		Laju Pertumbuhan penduduk	>1,55
3	Ekonomi	Mata pencaharian	20%-40% penduduk bermata pencaharian sektor pertanian

Sumber: Kurnianingsih, 2016

Dari indikator kawasan perkotaan ini, kemudian dilakukan analisis skoring terhadap 32 Kecamatan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Berikut hasil analisis skoring identifikas kawasan perkotaan di Kabupaten Cianjur.

Tabel 5.2 Analisis Kawasan Perkotaan

No	Kecamatan	Indikator Perkotaan											Ket
		Penggunaan Lahan Pertanian <25%		Ketersediaan Sarana Pendidikan Sangat Tinggi		Ketersediaan Sarana Kesehatan Sangat Tinggi		>67,2% Terlayani Listrik	Kepadatan Penduduk Tinggi (Jiwa/Ha)		Laju Pertumbuhan Penduduk >1,55	Penduduk Petani 20%-40%	
		Penggunaan Lahan Pertanian (Ha)	Lahan (%)	Sarana	Kelas	Sarana	Kelas	Listrik (%)	KePadatan Penduduk	Kelas			
		Skor 1		Skor 1		Skor 1		Skor 1	Skor 1		Skor 1	Skor 1	
1	Agrabinta	15302,50	77,77%	81	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	53,36	2	Rendah	0,95	20%	1
2	Bojongpicung	4104,04	46,23%	407	Sedang	8	Rendah	76,22	9	Rendah	1,58	3%	3
3	Campaka	1417,86	9,90%	140	Sangat Rendah	6	Rendah	82,76	5	Rendah	0,86	7%	3
4	Campaka Mulya	877,76	11,86%	36	Sangat Rendah	4	Sangat Rendah	65,63	3	Rendah	0,11	18%	1
5	Cianjur	96,22	3,65%	653	Sangat Tinggi	13	Tinggi	127,58	66	Tinggi	0,89	0%	5
6	Cibeber	1707,93	13,74%	460	Sedang	9	Sedang	47,38	11	Rendah	1,4	3%	1
7	Cibinong	16614,31	69,84%	217	Rendah	8	Rendah	75,09	3	Rendah	1,01	12%	2
8	Cidaun	20621,57	69,50%	238	Rendah	6	Rendah	83,56	2	Rendah	0,78	13%	2
9	Cijati	4352,80	89,19%	233	Rendah	8	Rendah	89,83	7	Rendah	0,5	6%	2
10	Cikadu	12656,57	67,25%	65	Sangat Rendah	4	Sangat Rendah	72,95	2	Rendah	0,64	12%	2
11	Cikalongkulon	4112,68	30,16%	537	Tinggi	7	Rendah	80,73	7	Rendah	1,31	3%	2
12	Cilaku	1,34	0,03%	322	Rendah	10	Sedang	112,87	22	Rendah	1,9	2%	4
13	Cipanas	371,28	5,72%	564	Tinggi	9	Sedang	122,09	17	Rendah	0,87	2%	3
14	Ciranjang	2552,47	80,78%	523	Tinggi	8	Rendah	88,44	25	Sedang	1,72	1%	3
15	Cugenang	299,97	3,95%	299	Rendah	5	Sangat Rendah	104,33	15	Rendah	1,58	3%	4
16	Gekbrong	461,59	9,25%	173	Sangat Rendah	3	Sangat Rendah	72,96	12	Rendah	1,73	3%	4
17	Haurwangi	2755,54	60,49%	155	Sangat Rendah	4	Sangat Rendah	68,65	14	Rendah	1,69	2%	3
18	Kadupandak	8935,38	85,83%	85	Sangat Rendah	5	Sangat Rendah	75,45	5	Rendah	0,8	10%	2
19	Karangtengah	302,95	6,31%	801	Sangat Tinggi	17	Sangat Tinggi	91,81	34	Sedang	1,97	1%	6
20	Leles	8884,62	78,90%	65	Sangat Rendah	3	Sangat Rendah	79,83	3	Rendah	0,1	17%	2

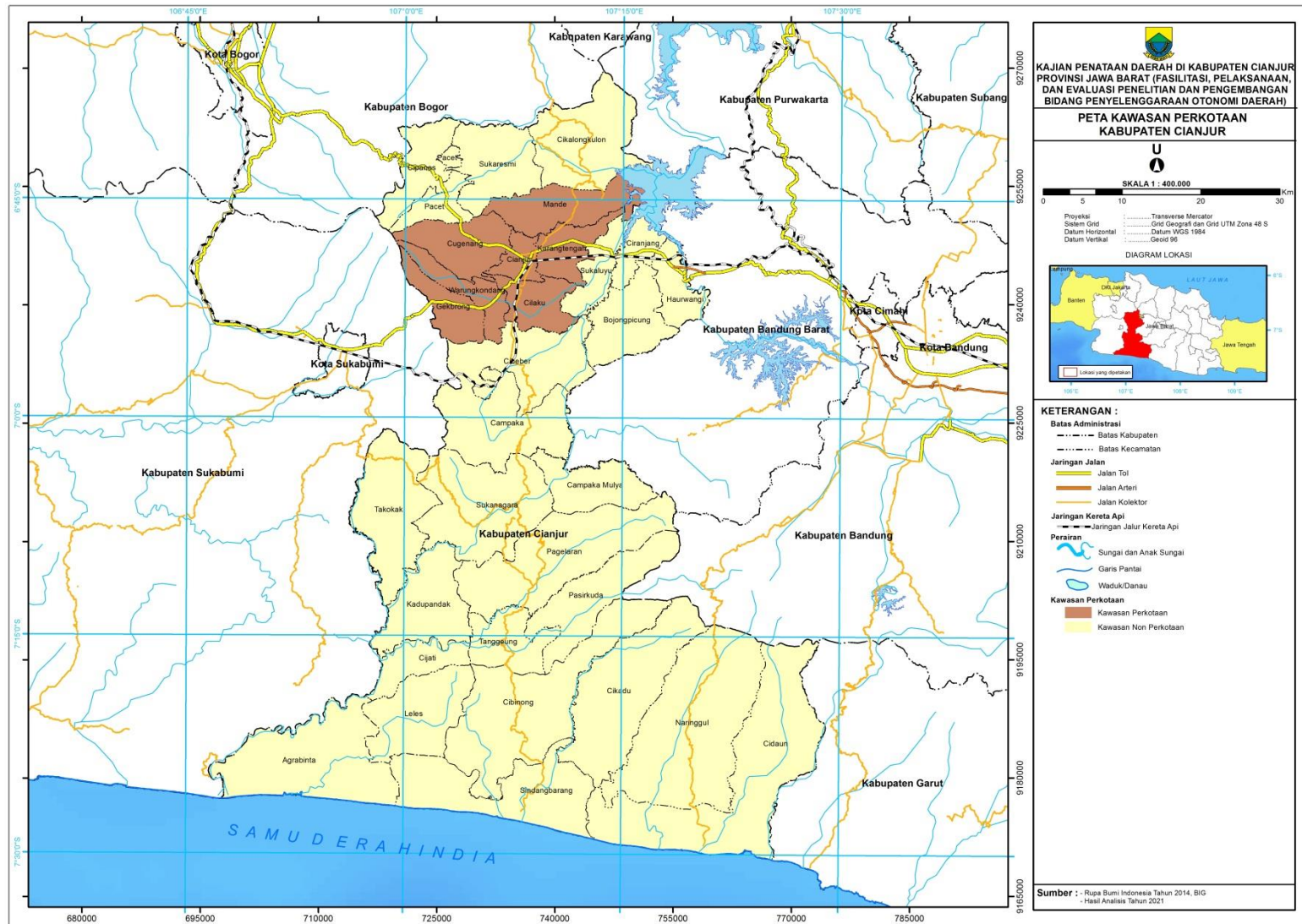
No	Kecamatan	Indikator Perkotaan											Ket
		Penggunaan Lahan Pertanian <25%		Ketersediaan Sarana Pendidikan Sangat Tinggi		Ketersediaan Sarana Kesehatan Sangat Tinggi		>67,2% Terlayani Listrik	Kepadatan Penduduk Tinggi (Jiwa/Ha)		Laju Pertumbuhan Penduduk >1,55	Penduduk Petani 20%-40%	
		Penggunaan Lahan Pertanian (Ha)	Lahan (%)	Sarana	Kelas	Sarana	Kelas	Listrik (%)	KePadatan Penduduk	Kelas			
		Skor 1		Skor 1		Skor 1		Skor 1	Skor 1		Skor 1	Skor 1	
21	Mande	1788,45	21,20%	314	Rendah	6	Rendah	74,92	8	Rendah	1,61	2%	4
22	Naringgul	16621,05	58,65%	80	Sangat Rendah	5	Sangat Rendah	76,32	2	Rendah	0,59	19%	2
23	Pacet	1091,55	26,80%	551	Tinggi	9	Sedang	79,46	27	Sedang	1,34	2%	2
24	Pagelaran	9107,38	45,81%	86	Sangat Rendah	6	Rendah	70,95	4	Rendah	1,02	5%	2
25	Pasirkuda	3940,01	36,22%	76	Sangat Rendah	3	Sangat Rendah	52,69	3	Rendah	0,97	9%	1
26	Sindangbarang	10750,34	65,81%	99	Sangat Rendah	4	Sangat Rendah	76,34	4	Rendah	1,19	11%	2
27	Sukaluyu	33,76	0,73%	112	Sangat Rendah	5	Sangat Rendah	78,04	19	Rendah	2,4	2%	3
28	Sukanagara	1533,29	8,83%	143	Sangat Rendah	6	Rendah	85	3	Rendah	1,31	5%	3
29	Sukaresmi	6420,29	67,68%	59	Sangat Rendah	9	Sedang	70,75	10	Rendah	1,29	5%	2
30	Takokak	8160,10	57,61%	163	Sangat Rendah	5	Sangat Rendah	70,45	4	Rendah	0,22	13%	2
31	Tanggeung	4602,22	69,75%	232	Rendah	5	Sangat Rendah	77,37	8	Rendah	1,21	6%	2
32	Warungkondang	801,46	17,50%	133	Sangat Rendah	6	Rendah	96,12	17	Rendah	1,77	2%	4

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis kawasan perkotaan, terdapat 7 (tujuh) Kecamatan yang memenuhi syarat sebagai kawasan perkotaan, yaitu:

1. Kecamatan Cianjur
2. Kecamatan Cilaku
3. Kecamatan Cugenang
4. Kecamatan Gekbrong
5. Kecamatan Karangtengah
6. Kecamatan Mande
7. Kecamatan Warungkondang

Sedangkan untuk 25 (dua puluh lima) kecamatan lainnya di Kabupaten Cianjur tidak memenuhi persyaratan sebagai kawasan perkotaan. Setelah dilihat berdasarkan letak geografis ketujuh Kecamatan yang memenuhi indikator perkotaan berada Pada lokasi yang berdekatan. Berikut peta kawasan perkotaan dan non perkotaan hasil analisis.



Gambar V.1. Peta Hasil Analisis Kawasan Perkotaan

Sumber: Analisis, 2021

B. Analisis Karakteristik Fisik Wilayah

Analisis karakteristik fisik wilayah dilakukan untuk mengetahui wilayah mana saja yang memiliki kemiripan dan kesetaraan secara fisik. Dengan adanya kesamaan karakteristik wilayah akan memudahkan dalam melakukan pengembangan wilayah kedepannya. Pada analisis karakteristik ini menggunakan beberapa indikator, antara lain:

1. Lokasi administrasi
2. Infrastruktur Jalan
3. Sarana Pendidikan
4. Sarana Kesehatan
5. Sarana Peribadatan
6. Penggunaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Analisis ini juga menggunakan analisis skoring, dimana setiap indikator memiliki bobot. Skor untuk penilaian skoring antara 1-3, skor 1 menunjukkan rendah, skor 2 menunjukkan sedang, dan skor 3 menunjukkan tinggi. Kemudian setiap skor dan bobot indikator dikalikan dan jumlahkan. Hasil akhir dari penjumlahan akan dikelaskan menjadi 2 kelas atau 2 kelompok wilayah. Untuk lebih jelasnya, perhitungan analisis karakteristik fisik dapat dilihat Pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Analisis Karakteristik Fisik Wilayah

Kecamatan	Indikator												Nilai	Kelas
	Lokasi	Jalan	Pendidikan	Kesehatan	Sarana Ibadah	Pertanian Tanaman Pangan	Lokasi	Jalan	Pendidikan	Kesehatan	Sarana Ibadah	Pertanian Tanaman Pangan		
	45	15	10	10	10	10	Skor (bobot x skor)							
Argabinta	1	1	1	1	1	3	45	15	10	10	10	30	120	II
Bojongpicung	3	1	2	2	1	2	135	15	20	20	10	20	220	I
Campaka	3	2	1	1	2	3	135	30	10	10	20	30	235	I
Campakamulya	3	1	1	1	1	3	135	15	10	10	10	30	210	I
Cianjur	3	1	3	3	1	2	135	15	30	30	10	20	240	I
Cibeber	3	3	2	2	3	3	135	45	20	20	30	30	280	I
Cibinong	2	2	1	1	1	2	90	30	10	10	10	20	170	II
Cidaun	1	1	1	1	1	2	45	15	10	10	10	20	110	II
Cijati	2	1	1	1	1	1	90	15	10	10	10	10	145	II
Cikadu	1	1	1	1	1	3	45	15	10	10	10	30	120	II
Cikalongkulon	3	2	2	1	2	1	135	30	20	10	20	10	225	I
Cilaku	3	2	2	2	2	1	135	30	20	20	20	10	235	I
Cipanas	3	3	3	2	1	1	135	45	30	20	10	10	250	I
Ciranjang	3	1	2	2	1	3	135	15	20	20	10	30	230	I
Cugenang	3	2	2	1	2	2	135	30	20	10	20	20	235	I
Gekbrong	3	1	1	1	1	2	135	15	10	10	10	20	200	I
Haurwangi	3	1	1	1	1	2	135	15	10	10	10	20	200	I
Kadupandak	2	1	1	1	1	2	90	15	10	10	10	20	155	II
Karangtengah	3	3	3	3	2	2	135	45	30	30	20	20	280	I
Leles	2	1	1	1	1	2	90	15	10	10	10	20	155	II
Mande	3	2	2	1	1	2	135	30	20	10	10	20	225	I

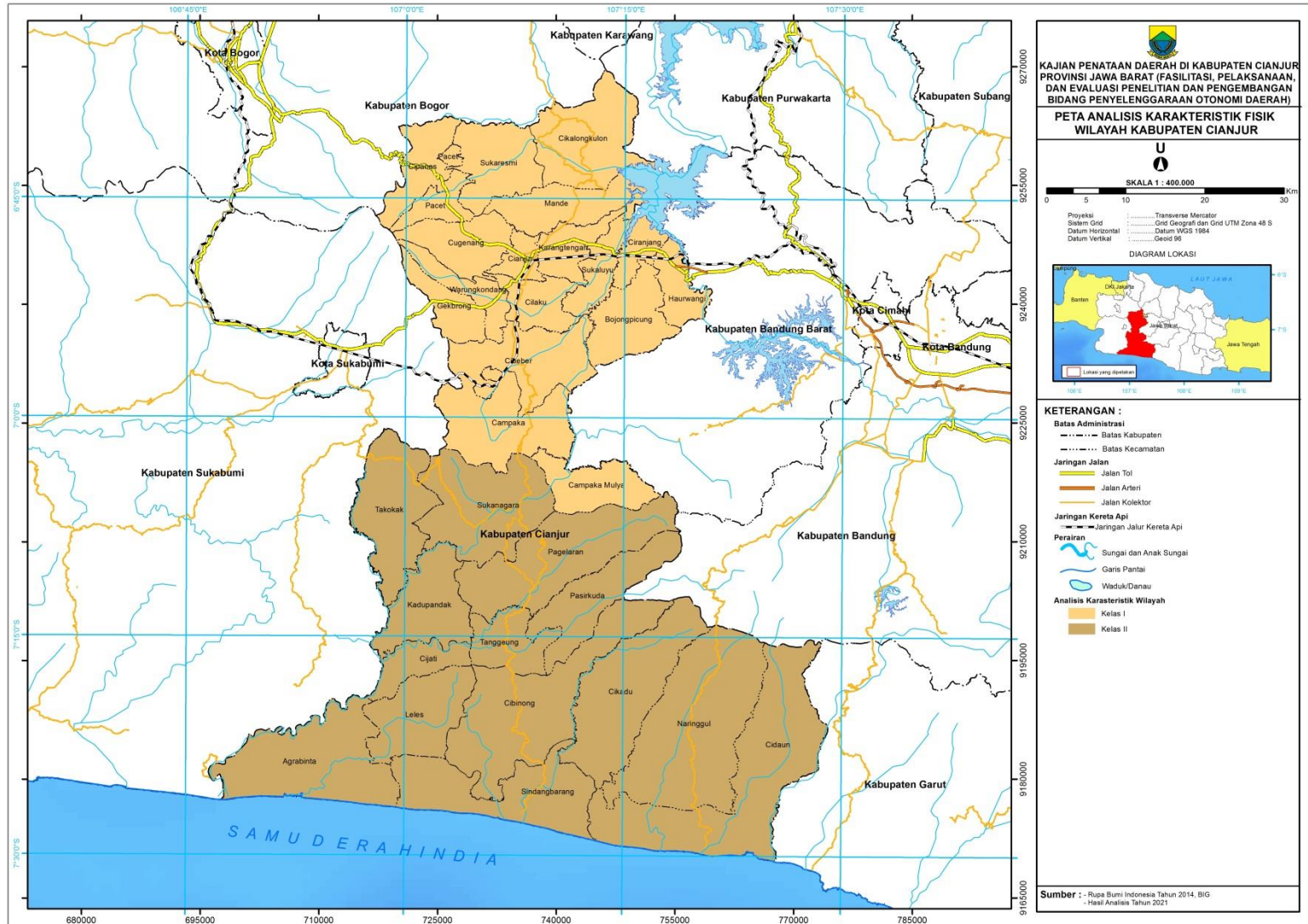
Kecamatan	Indikator												Nilai	Kelas
	Lokasi	Jalan	Pendidikan	Kesehatan	Sarana Ibadah	Pertanian Tanaman Pangan	Lokasi	Jalan	Pendidikan	Kesehatan	Sarana Ibadah	Pertanian Tanaman Pangan		
	45	15	10	10	10	10	Skor (bobot x skor)							
Naringgul	1	1	1	1	1	2	45	15	10	10	10	20	110	II
Pacet	3	2	3	2	1	1	135	30	30	20	10	10	235	I
Pagelaran	1	3	1	1	2	2	45	45	10	10	20	20	150	II
Pasirkuda	2	2	1	1	1	2	90	30	10	10	10	20	170	II
Sindangbarang	1	1	1	1	1	2	45	15	10	10	10	20	110	II
Sukaluyu	3	2	1	1	2	1	135	30	10	10	20	10	215	I
Sukanagara	2	2	1	1	1	2	90	30	10	10	10	20	170	II
Sukaresmi	3	3	1	2	1	1	135	45	10	20	10	10	230	I
Takokak	2	3	1	1	2	1	90	45	10	10	20	10	185	II
Tanggeung	2	1	1	1	1	2	90	15	10	10	10	20	155	II
Warungkondang	3	1	1	1	2	2	135	15	10	10	20	20	210	I

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis karakteristik fisik wilayah, didapatkan hasil 18 (delapan belas) Kecamatan termasuk kedalam kelas I dan 14 (empat belas) kecamatan lainnya masuk kedalam kelas II. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Hasil Analisis Karakteristik Fisik Wilayah

Kelas I (1)	Kelas II (2)
1. Kecamatan Bojongpicung	1. Kecamatan Agrabinta
2. Kecamatan Campaka	2. Kecamatan Cibinong
3. Kecamatan Campaka Mulya	3. Kecamatan Cidaun
4. Kecamatan Cianjur	4. Kecamatan Cijati
5. Kecamatan Cibeber	5. Kecamatan Cikadu
6. Kecamatan Cikalongkulon	6. Kecamatan Kadupandak
7. Kecamatan Cilaku	7. Kecamatan Leles
8. Kecamatan Cipanas	8. Kecamatan Naringgul
9. Kecamatan Ciranjang	9. Kecamatan Pagelaran
10. Kecamatan Cugenang	10. Kecamatan Pasirkuda
11. Kecamatan Gekbrong	11. Kecamatan Sindangbarang
12. Kecamatan Haurwangi	12. Kecamatan Sukanagara
13. Kecamatan Karangtengah	13. Kecamatan Takokak
14. Kecamatan Mande	14. Kecamatan Tanggeung
15. Kecamatan Pacet	
16. Kecamatan Sukaluyu	
17. Kecamatan Sukaresmi	
18. Kecamatan Warungkondang	



Gambar V.2. Peta Hasil Analisis Karakteristik Wilayah

Sumber: Analisis, 2021

C. Aspirasi Masyarakat

1. Usulan Pembentukan Kota Cipanas oleh masyarakat

Prakarsa pembentukan Kota Cipanas sebenarnya telah mulai berkembang sejak tahun 1985, yang bersumber dari aspirasi masyarakat 5 kecamatan (Cipanas, Pacet, Cugenang, Sukaresmi, dan Cikalongkulon). Tahun 2001 muncul kembali gagasan tersebut yang ditindaklanjuti oleh pembentkan Forum Masyarakat Peduli Cipanas (FMPC) dan tahun 2003 oleh Panitia Persiapan Pembentukan Kota Cipanas (P3KC) dan terakhir Panitia Pembentukan Kota Cipanas (P2KC). Kemudian P2KC menunjuk LPPMI untuk melakukan studi terkait kelayakan Kota Cipanas. Hasil studi tersebut berhasil memetakan aspirasi dan harapan masyarakat, yang menghendaki pembentukan Kota Cipanas agar dapat mewujudkan kemandirian di berbagai bidang, meningkatkan pelayanan dan proses pembangunan serta perekonomian masyarakat, memperoleh keadilan sosial, serta meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat.

Hingga sekarang, wacana pembentukan Kota Cipanas masih tetap diperdebatkan. Bulan Maret 2008, Bupati Cianjur mengadakan dialog tentang pemekaran Kota Cipanas dengan 11 OKP, Ormas, serta LSM di wilayah Cipanas. Kesebelas organisasi tersebut intinya menyatakan bahwa pemekaran Kota Cipanas sebagai kota mandiri belum waktunya dilakukan saat ini. Menguatnya wacana pembentukan Kota Cipanas pascapemilihan kepala daerah ditindaklanjuti oleh DPRD dengan membentuk panitia khusus pemekaran Kota Cipanas.

Tahun 2019 perkumpulan masyarakat pengawasan pembangunan dan percepatan pembentukan kota Cipanas (PMP4) bersurat ke Bupati terkait permohonan persetujuan bersama pembentukan calon daerah persiapan Kota Cipanas. Sampai saat ini PMP4 mengingatkan Bupati mengenai pembentukan Kota Cipanas dan juga mendaatangi DPRD untuk melanjutkan pembahasan tentang pemekaran Kota Cipanas.

2. Usulan Pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan oleh masyarakat

Tahun 2009 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada setiap Desa di Kecamatan Kabupaten Cianjur selatan sudah membuat keputusan isinya Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur Selatan. Kemudian tahun 2013 DPRD Kabupaten Cianjur melakukan verifikasi dengan dibentuknya panitia khusus DPRD Kabupaten Cianjur Pembahasan Rencana

Pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan. Kesimpulan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Cianjur bahwa aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh camat, Kepala Desa, dan BPD dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

Kabupaten Cianjur Selatan terdiri dari 14 Kecamatan yaitu: Kecamatan Sukanagara, Takokak, Kadupandak, Tanggeung, Cijati, Leles, Cibinong, Cikadu, Naringgul, Pagelaran, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, dan Pasirkuda. Keempatbelas wilayah tersebut diaspirasikan oleh berbagai tokoh forum jabar dan Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK). Aspirasi mengenai pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan ini sampai saat ini masih berlangsung. Dengan dibuka kembali keran pemekaran wilayah ini memberikan peluang ntuk dapat menjalankan pemerintahannya sendiri.

Berdasarkan hasil analisis kawsan perkotaan, analisis karakteristik fisik wilayah, kedekatan geografis dan juga aspirasi masyarakat didapatkan 8 (delapan) alternatif pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Berikut ini merupakan alternatif pembentukan DOB di Kabupaten Cianjur.

Tabel 5.5 Alternatif 1 Pembentukan DOB di Kabupaten Cianjur

DOB 1 (1)	DOB 2 (2)	DOB 3 (3)
1. Kecamatan Cipanas 2. Kecamatan Cikalongkulon 3. Kecamatan Cugenang 4. Kecamatan Pacet 5. Kecamatan Sukaresmi	1. Kecamatan Bojongpicung 2. Kecamatan Campaka 3. Kecamatan Campakamulya 4. Kecamatan Cianjur 5. Kecamatan Cibeber 6. Kecamatan Cilaku 7. Kecamatan Ciranjang 8. Kecamatan Gekbrong 9. Kecamatan Haurwangi 10. Kecamatan Karangtengah 11. Kecamatan Mande 12. Kecamatan Sukaluyu 13. Kecamatan Warungkondang	1. Kecamatan Agrabinta 2. Kecamatan Cidaun 3. Kecamatan Cibinong 4. Kecamatan Cijati 5. Kecamatan Cikadu 6. Kecamatan Kadupandak 7. Kecamatan Leles 8. Kecamatan Naringgul 9. Kecamatan Pagelaran 10. Kecamatan Pasir Kuda 11. Kecamatan Sindangbarang 12. Kecamatan Sukanagara 13. Kecamatan Takokak 14. Kecamatan Tanggeung

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.6 Alternatif 2 Pembentukan DOB di Kabupaten Cianjur

DOB 1 (1)	DOB 2 (2)	DOB 3 (3)
1. Kecamatan Cipanas 2. Kecamatan Cikalongkulon 3. Kecamatan Pacet 4. Kecamatan Sukaresmi	1. Kecamatan Bojongpicung 2. Kecamatan Campaka 3. Kecamatan Campakamulya 4. Kecamatan Cianjur 5. Kecamatan Cibeber 6. Kecamatan Cugenang 7. Kecamatan Cilaku 8. Kecamatan Ciranjang 9. Kecamatan Gekbrong 10. Kecamatan Haurwangi 11. Kecamatan Karangtengah 12. Kecamatan Mande 13. Kecamatan Sukaluyu 14. Kecamatan Warungkondang	1. Kecamatan Agrabinta 2. Kecamatan Cidaun 3. Kecamatan Cibinong 4. Kecamatan Cijati 5. Kecamatan Cikadu 6. Kecamatan Kadupandak 7. Kecamatan Leles 8. Kecamatan Naringgul 9. Kecamatan Pagelaran 10. Kecamatan Pasir Kuda 11. Kecamatan Sindangbarang 12. Kecamatan Sukanagara 13. Kecamatan Takokak 14. Kecamatan Tanggeung

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.7 Alternatif 3 Pembentukan DOB di Kabupaten Cianjur

DOB 1 (1)	DOB 2 (2)	DOB 3 (3)
1. Kecamatan Cipanas 2. Kecamatan Cugenang 3. Kecamatan Pacet 4. Kecamatan Sukaresmi	1. Kecamatan Bojongpicung 2. Kecamatan Campaka 3. Kecamatan Campakamulya 4. Kecamatan Cianjur 5. Kecamatan Cibeber 6. Kecamatan Cikalongkulon 7. Kecamatan Cilaku 8. Kecamatan Ciranjang 9. Kecamatan Gekbrong 10. Kecamatan Haurwangi 11. Kecamatan Karangtengah 12. Kecamatan Mande 13. Kecamatan Sukaluyu 14. Kecamatan Warungkondang	1. Kecamatan Agrabinta 2. Kecamatan Cidaun 3. Kecamatan Cibinong 4. Kecamatan Cijati 5. Kecamatan Cikadu 6. Kecamatan Kadupandak 7. Kecamatan Leles 8. Kecamatan Naringgul 9. Kecamatan Pagelaran 10. Kecamatan Pasir Kuda 11. Kecamatan Sindangbarang 12. Kecamatan Sukanagara 13. Kecamatan Takokak 14. Kecamatan Tanggeung

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.8 Alternatif 4 Pembentukan DOB di Kabupaten Cianjur

DOB 1 (1)	DOB 2 (2)	DOB 3 (3)
- Kecamatan Cianjur - Kecamatan Cilaku - Kecamatan Cugenang - Kecamatan Gekbrong - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Mande - Kecamatan Warungkondang	- Kecamatan Cipanas - Kecamatan Pacet - Kecamatan Sukaresmi - Kecamatan Cikalongkulon	- Kecamatan bojongpicung - Kecamatan Campaka - Kecamatan Campakamulya - Kecamatan Cibeber - Kecamatan Ciranjang - Kecamatan Haurwangi - Kecamatan Kadupandak - Kecamatan Pagelaran - Kecamatan Sukaluyu - Kecamatan Sukanagara - Kecamatan Takokak - Kecamatan Agrabinta - Kecamatan Cibirong - Kecamatan Cidaun - Kecamatan Cijati - Kecamatan Cikadu - Kecamatan Leles - Kecamatan Naringgul - Kecamatan Pasirkuda - Kecamatan Sindangbarang - Kecamatan Tanggeung

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.9 Alternatif 5 Pembentukan DOB di Kabupaten Cianjur

DOB 1 (1)	DOB 2 (2)
- Kecamatan Agrabinta - Kecamatan Cidaun - Kecamatan Cibirong - Kecamatan Cijati - Kecamatan Cikadu - Kecamatan Kadupandak - Kecamatan Leles - Kecamatan Naringgul - Kecamatan Pagelaran	- Kecamatan Bojongpicung - Kecamatan Campaka - Kecamatan Campakamulya - Kecamatan Cianjur - Kecamatan Cibeber - Kecamatan Cikalongkulon - Kecamatan Cilaku - Kecamatan Cipanas - Kecamatan Ciranjang

DOB 1 (1)	DOB 2 (2)
10. Kecamatan Pasir Kuda	10. Kecamatan Cugenang
11. Kecamatan Sindangbarang	11. Kecamatan Gekbrong
12. Kecamatan Sukanagara	12. Kecamatan haurwangi
13. Kecamatan Takokak	13. Kecamatan Karangtengah
14. Kecamatan Tanggeung	14. Kecamatan Mande
	15. Kecamatan Pacet
	16. Kecamatan Sukaluyu
	17. Kecamatan Sukaresmi
	18. Kecamatan Warungkondang

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.10 Alternatif 6 Pembentukan DOB di Kabupaten Cianjur

DOB 1 (1)	DOB 2 (2)	DOB 3 (3)	DOB 4 (4)
1. Kecamatan Cianjur	1. Kecamatan Cipanas	1. Kecamatan Bojongpicung	1. Kecamatan Agrabinta
2. Kecamatan Cilaku	2. Kecamatan Pacet	2. Kecamatan Campaka	2. Kecamatan Cibirong
3. Kecamatan Cugenang	3. Kecamatan Sukaresmi	3. Kecamatan Campakamulya	3. Kecamatan Cidaun
4. Kecamatan Gekbrong	4. Kecamatan Cikalongkulon	4. Kecamatan Cibeber	4. Kecamatan Cijati
5. Kecamatan Karangtengah		5. Kecamatan Ciranjang	5. Kecamatan Cikadu
6. Kecamatan Mande		6. Kecamatan Haurwangi	6. Kecamatan Leles
7. Kecamatan Warungkondang		7. Kecamatan Kadupandak	7. Kecamatan Naringul
		8. Kecamatan Pagelaran	8. Kecamatan Pasirkuda
		9. Kecamatan Sukaluyu	9. Kecamatan Sindangbarang
		10. Kecamatan Sukanagara	10. Kecamatan Tanggeung
		11. Kecamatan Takokak	

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.11 Alternatif 7 Pembentukan DOB di Kabupaten Cianjur

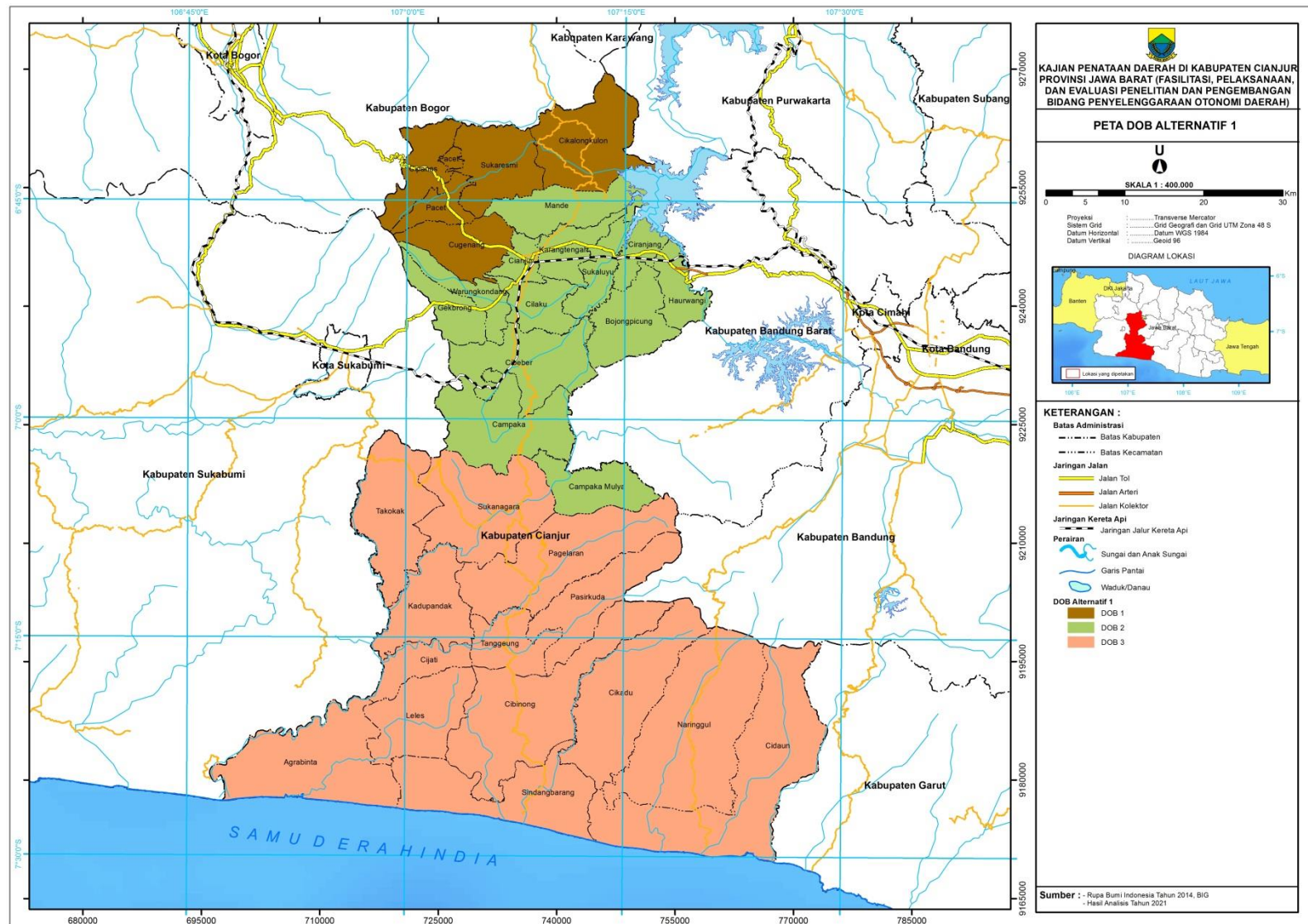
DOB 1 (1)	DOB 2 (2)	DOB 3 (3)	DOB 4 (4)	DOB 5 (5)	DOB 6 (6)
1. Kecamatan Cianjur	1. Kecamatan Cipanas	1. Kecamatan Agrabinta	1. Kecamatan Cibirong	1. Kecamatan Campakamulya	1. Kecamatan Cibeber
2. Kecamatan Cilaku	2. Kecamatan Pacet	2. Kecamatan Cidaun	2. Kecamatan Cijati	2. Kecamatan Kadupandak	2. Kecamatan Bojongpicung
3. Kecamatan Cugenang	3. Kecamatan Sukaresmi	3. Kecamatan Cikadu	3. Kecamatan Leles	3. Kecamatan Pagelaran	3. Kecamatan Campaka
4. Kecamatan Gekbrong	4. Kecamatan Cikalongkulon	4. Kecamatan Naringgul	4. Kecamatan Pasirkuda	4. Kecamatan Sukanagara	4. Kecamatan Ciranjang
5. Kecamatan Karangtengah		5. Kecamatan Sindangbarang	5. Kecamatan Tanggeung	5. Kecamatan Takokak	5. Kecamatan Haurwangi
6. Kecamatan Mande					6. Kecamatan Sukaluyu
7. Kecamatan Warungcondang					

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.12 Alternatif 8 Pembentukan DOB Kabupaten Cianjur

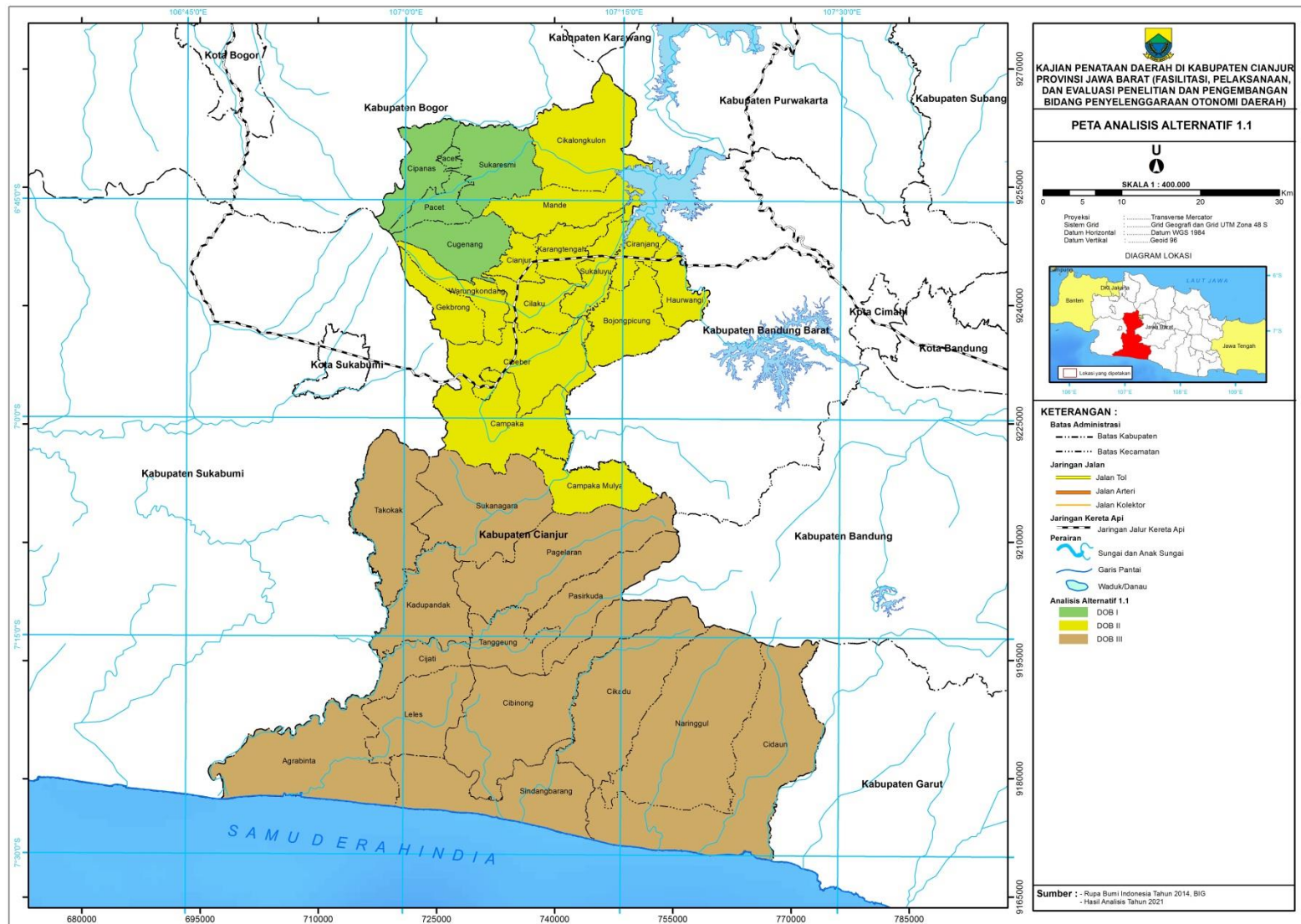
DOB 1 (1)	DOB 2 (2)	DOB 3 (3)	DOB 4 (4)	DOB 5 (5)	DOB 6 (6)
1. Kecamatan Cianjur	1. Kecamatan Cipanas	1. Kecamatan Agrabinta	1. Kecamatan Cibirong	1. Kecamatan Campakamulya	1. Kecamatan Cibeber
2. Kecamatan Cilaku	2. Kecamatan Pacet	2. Kecamatan Cidaun	2. Kecamatan Cijati	2. Kecamatan Kadupandak	2. Kecamatan Bojongpicung
3. Kecamatan Cugenang	3. Kecamatan Sukaresmi	3. Kecamatan Cikadu	3. Kecamatan Leles	3. Kecamatan Pagelaran	3. Kecamatan Campaka
4. Kecamatan Karangtengah	4. Kecamatan Cikalongkulon	4. Kecamatan Naringgul	4. Kecamatan Pasirkuda	4. Kecamatan Sukanagara	4. Kecamatan Ciranjang
5. Kecamatan Warungcondang	5. Kecamatan Gekbrong	5. Kecamatan Sindangbarang	5. Kecamatan Tanggeung	5. Kecamatan Takokak	5. Kecamatan Haurwangi
	6. Kecamatan Mande				6. Kecamatan Sukaluyu

Sumber: Analisis, 2021



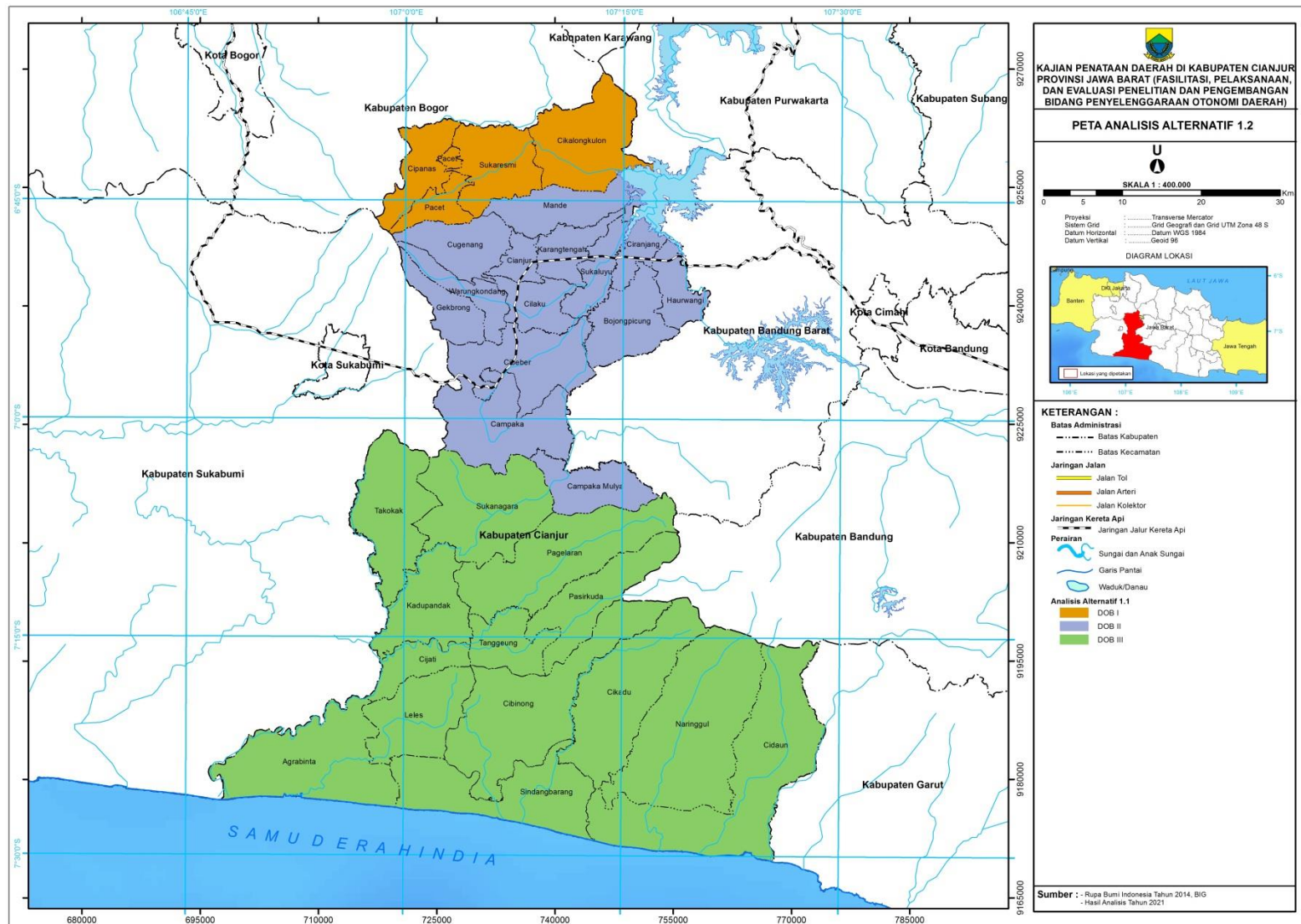
Gambar V.3. Peta Alternatif 1

Sumber: Analisis, 2021



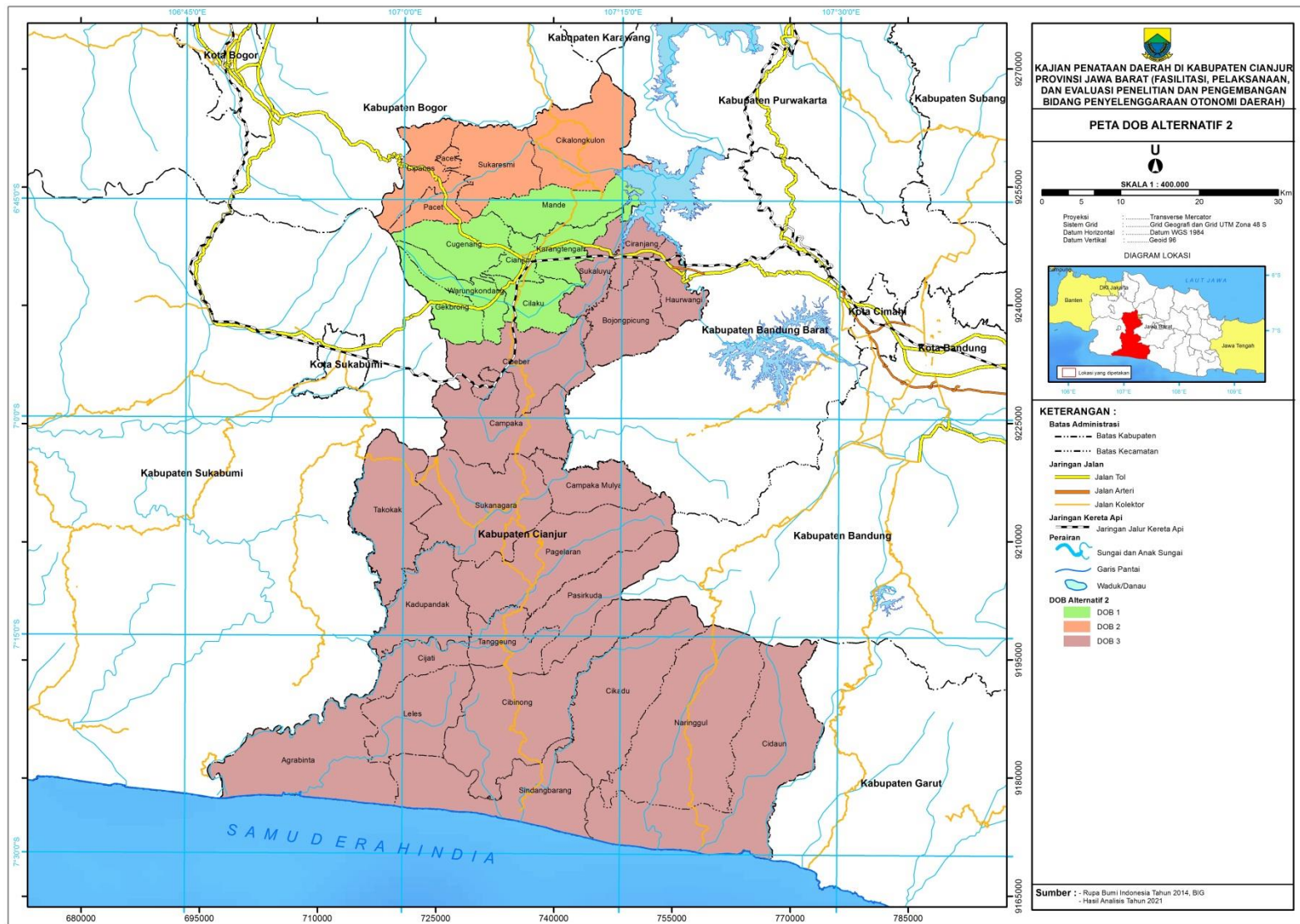
Gambar V.4. Peta Alternatif 2

Sumber: Analisis, 2021



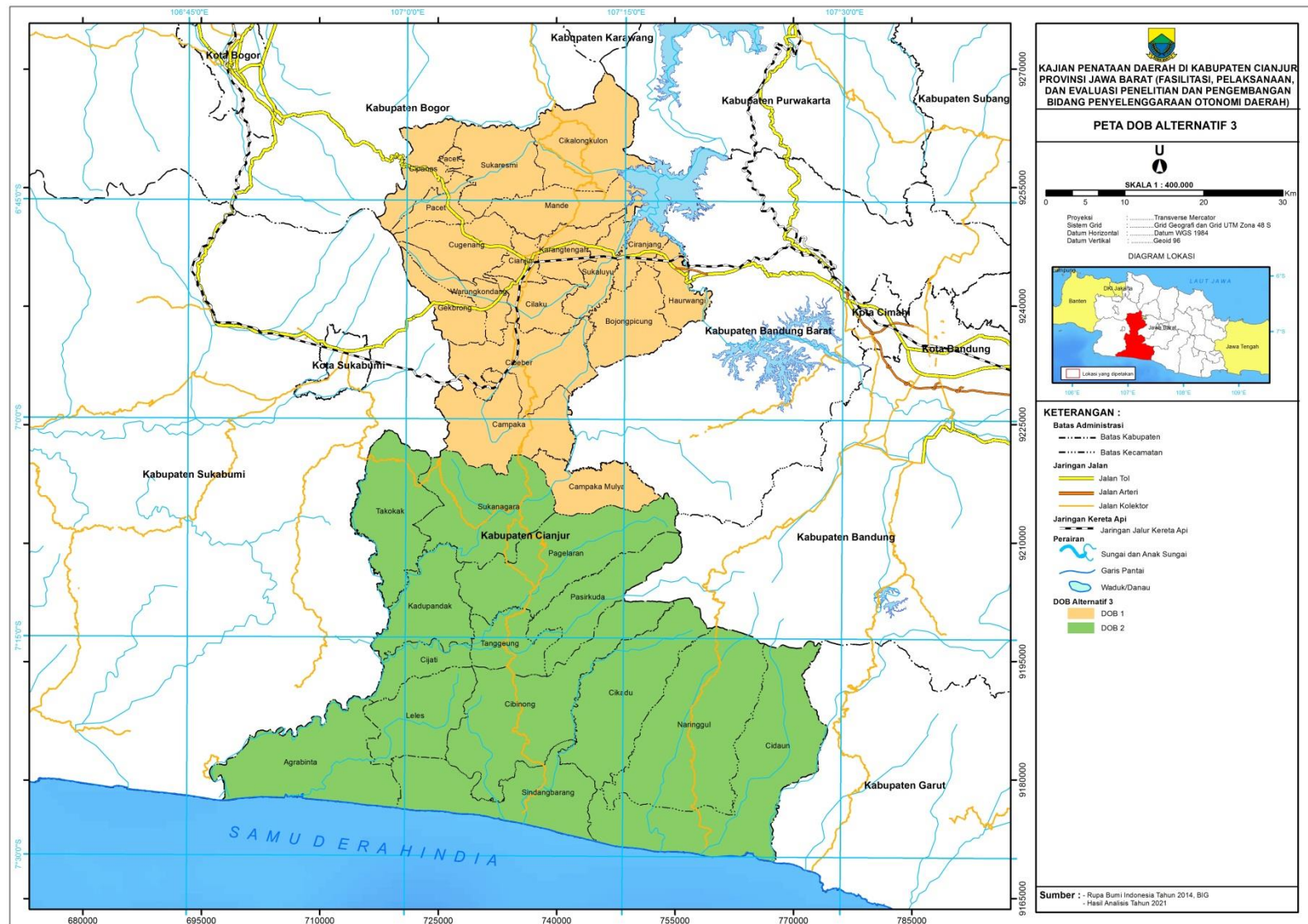
Gambar V.5. Peta Alternatif 3

Sumber: Analisis, 2021



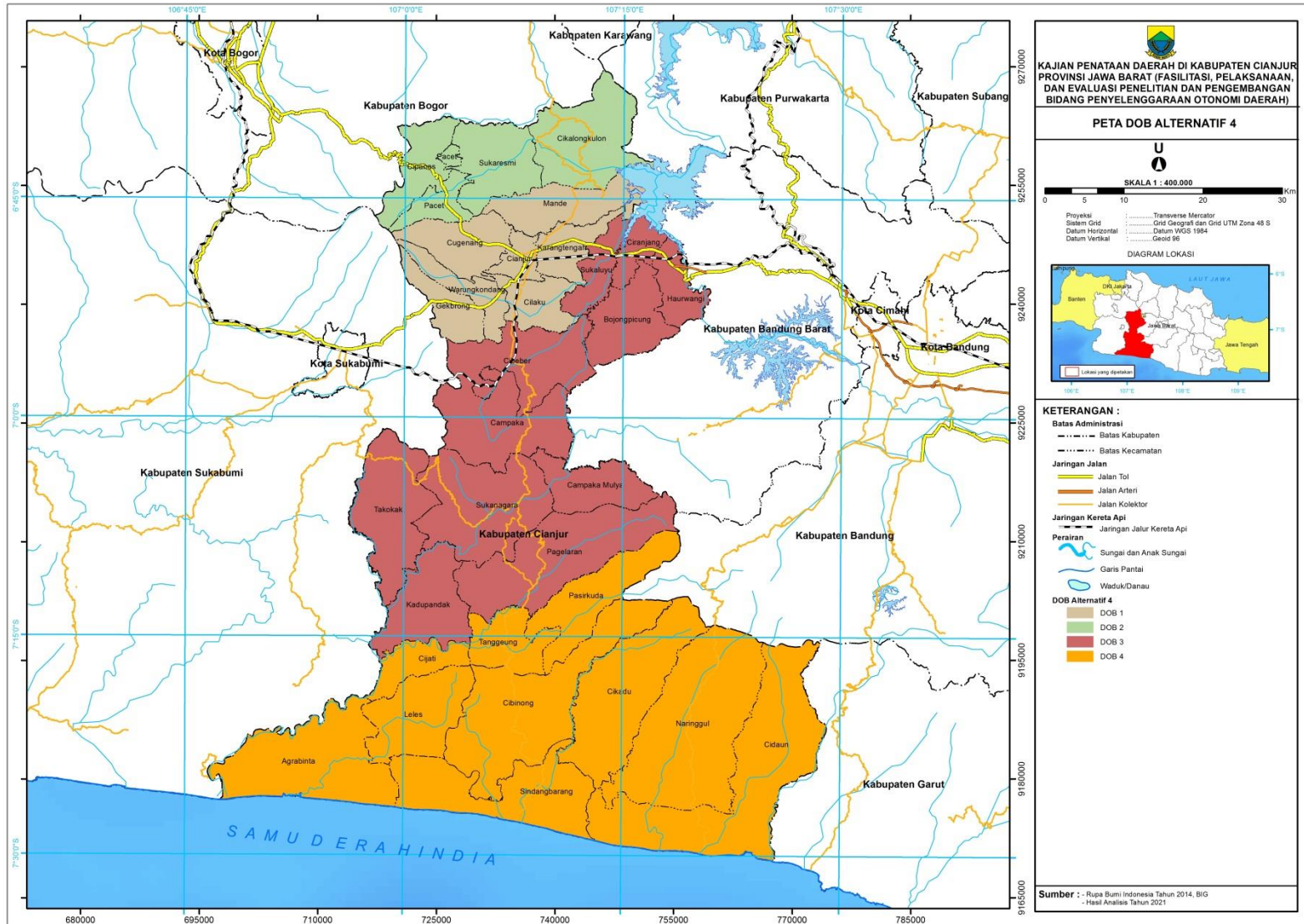
Gambar V.6. Peta Alternatif 4

Sumber: Analisis, 2021



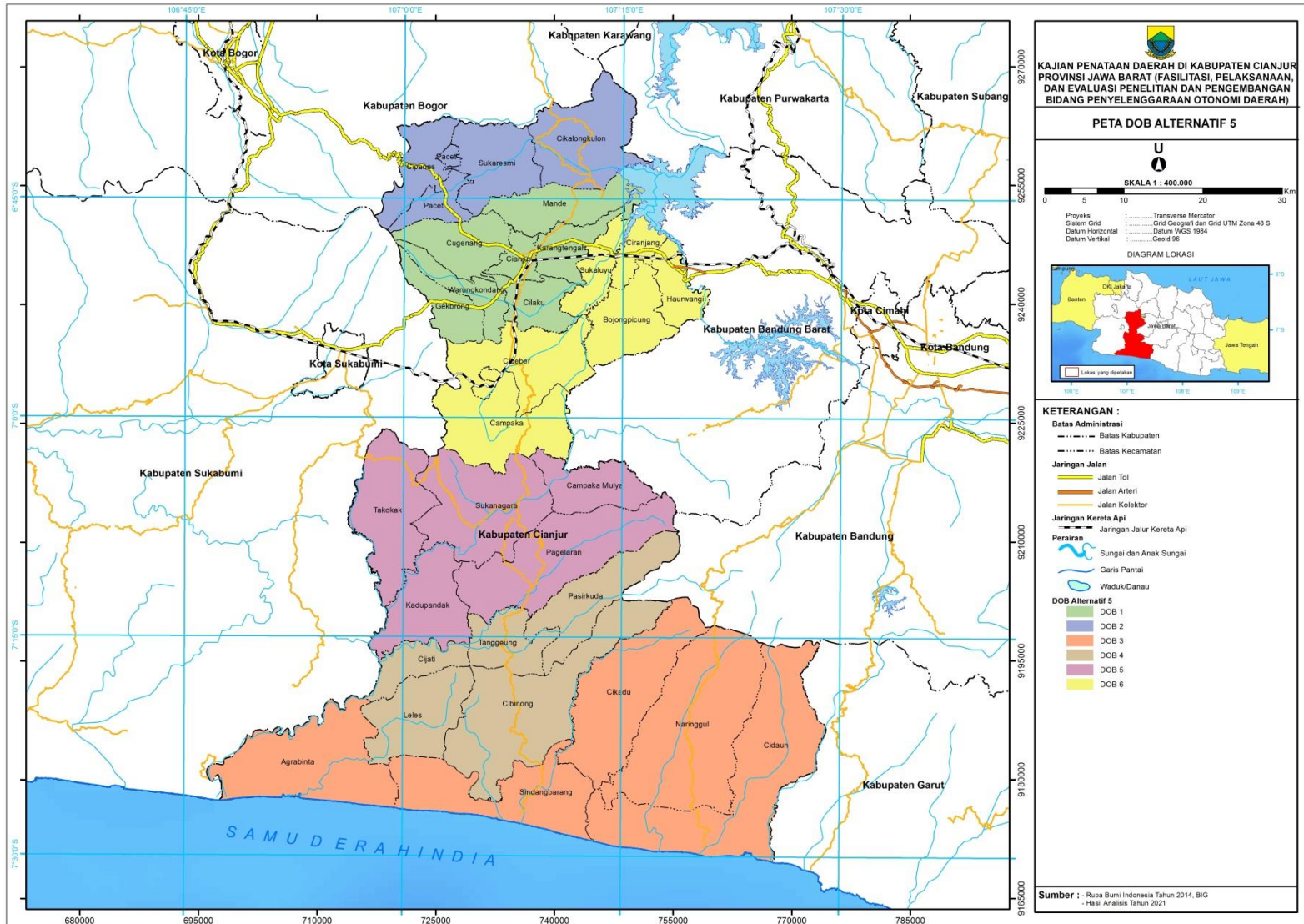
Gambar V.7. Peta Alternatif 5

Sumber: Analisis, 2021



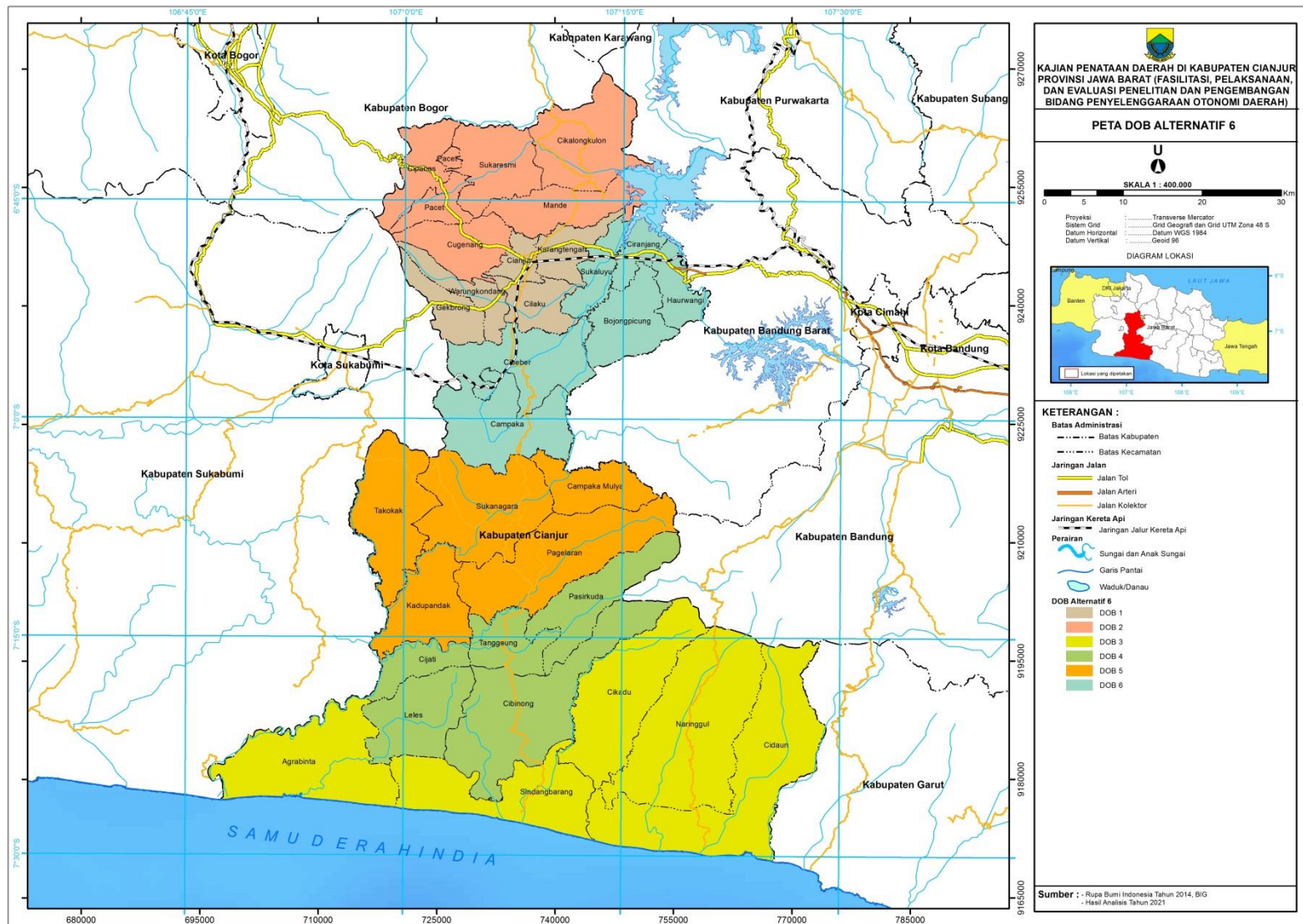
Gambar V.8. Peta Alternatif 6

Sumber: Analisis, 2021



Gambar V.9. Peta Alternatif 7

Sumber: Anlisis, 2021



Gambar V.10. Peta Alternatif 8

Sumber: Analisis, 2021

5.2. PENILAIAN KELAYAKAN DAERAH OTONOM BARU

5.2.1. PENILAIAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007

Pada kajian ini, acuan utama untuk menilai persyaratan teknis Calon Daerah Persiapan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Persyaratan teknis terdiri dari 11 Faktor, masing-masing faktor terdiri dari 1 (satu) atau lebih indikator, dan Pada masing-masing indikator.

Berikut merupakan hasil perhitungan penilaian persyaratan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007.

Tabel 5.13 Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 1

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (5 Kecamatan)			DOB 2 (13 Kecamatan)			DOB 3 (14 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kependudukan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	5	15	75	5	15	75	5	15	75
		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	5	5	25	5	5	25	3	5	15
2	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas Per Kapita	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Kontribusi PDRB Non Migas (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Rasio Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10000 Penduduk	5	2	10	2	2	4	1	2	2
3	Potensi Daerah	Rasio Kelompok Pertokoan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pasar Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia SD	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio SLTP Per Penduduk Usia SLTP	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Tenaga Medis Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan (%)	5	1	5	5	1	5	4	1	4
		Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga (%)	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Perahu Motor Atau Kapal Motor	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Keatas (%)	3	1	3	4	1	4	2	1	2
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (%)	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk	5	1	5	5	1	5	4	1	4
		Jumlah PDS (Juta)	5	5	25	5	5	25	4	5	20
4	Kemampuan Keuangan	Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas	5	5	25	5	5	25	5	5	25

No		Faktor	Indikator		DOB 1 (5 Kecamatan)			DOB 2 (13 Kecamatan)			DOB 3 (14 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
5	Sosial Budaya	Rasio Sarana Peribadatan Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10		
		Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10		
		Jumlah Balai Pertemuan	5	1	5	2	1	2	3	1	3		
6	Sosial Politik	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk Yang Mempunyai Hak Pilih	5	3	15	5	3	15	5	3	15		
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	3	2	6	5	2	10	1	2	2		
7	Luas Daerah	Luas Wilayah Keseluruhan (Km2)	2	2	4	5	2	10	5	2	10		
		Luas Wilayah Efektif Yang Dapat Dimanfaatkan (Ha)	3	3	9	5	3	15	5	3	15		
8	Pertahanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	5	3	15	5	3	15	5	3	15		
		Karakteristik Wilayah		2	0		2	0		2	0		
9	Keamanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	2	5	10	3	5	15		
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	5	5	25	5	5	25	5	5	25		
11	Rentang Kendali	Rata-Rata Jarak Ke Pusat Pemerintahan (Km)	5	2	10	5	2	10	5	2	10		
		Rata-Rata Waktu Perjalanan Ke Pusat Pemerintahan (Menit)	5	3	15	5	3	15	5	3	15		
Total Nilai					472			465			442		

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.14 Rekap Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 1

No	Faktor	DOB 1	DOB 2	DOB 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kependudukan	100	100	90
2	Kemampuan Ekonomi	75	75	75
3	Potensi Daerah	73	68	62
4	Kemampuan Keuangan	75	75	70
5	Sosial Budaya	25	22	23
6	Sosial Politik	21	25	17
7	Luas Daerah	13	25	25
8	Pertahanan	15	15	15
9	Keamanan	25	10	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	25
11	Rentang Kendali	25	25	25
TOTAL		472	465	442
KETERANGAN		Sangat Mampu	Sangat Mampu	Sangat Mampu

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa alternatif 1 dengan pembagian menjadi 3 wilayah, ketiga wilayah tersebut termasuk kedalam kelas sangat mampu dan direkomendasikan untuk menjadi Daerah Otonom Baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Diantara ketiga DOB tersebut, DOB 1 memiliki nilai paling tinggi sebesar 472, kemudian disusul oleh DOB 2 dengan nilai 465, dan yang terakhir DOB 3 dengan nilai 442.

Didalam PP No.78 Tahun 2007, juga menyebutkan bahwa nilai faktor kependudukan (80-100), kemampuan ekonomi (60-75), potensi daerah (60-75), dan kemampuan keuangan (60-75). Jika dilihat Pada hasil penilaian untuk alternatif 1 ini, seluruh DOB memenuhi syarat nilai Pada faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan.

Tabel 5.15 Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 2

No	Faktor	Indikator	DOB I (5 Kecamatan)			DOB II (13 Kecamatan)			DOB III (14 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
1	Kependudukan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	3	15	45	5	15	75	5	15	75
		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	5	5	25	5	5	25	3	5	15
2	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas Per Kapita	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Kontribusi PDRB Non Migas (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25
3	Potensi Daerah	Rasio Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10000 Penduduk	5	2	10	2	2	4	1	2	2
		Rasio Kelompok Pertokoan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pasar Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia SD	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio SLTP Per Penduduk Usia SLTP	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah Slta Per Penduduk Usia Slta	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Tenaga Medis Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan (%)	3	1	3	5	1	5	4	1	4
		Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga (%)	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Perahu Motor Atau Kapal Motor	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal Slta Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Keatas (%)	3	1	3	4	1	4	2	1	2
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (%)	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk	5	1	5	5	1	5	4	1	4
4	Kemampuan Keuangan	Jumlah Pds (Juta)	5	5	25	5	5	25	4	5	20
		Rasio Pds Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Rasio Pds Terhadap PDRB Non Migas	5	5	25	5	5	25	5	5	25
5	Sosial Budaya	Rasio Sarana Peribadatan Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10000	5	2	10	5	2	10	5	2	10

No	Faktor	Indikator	DOB I (5 Kecamatan)			DOB II (13 Kecamatan)			DOB III (14 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
6	Sosial Politik	Penduduk									
		Jumlah Balai Pertemuan	1	1	1	2	1	2	3	1	3
		Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk Yang Mempunyai Hak Pilih	2	3	6	5	3	15	5	3	15
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	2	2	4	5	2	10	1	2	2
7	Luas Daerah	Luas Wilayah Keseluruhan (Km2)	2	2	4	5	2	10	5	2	10
		Luas Wilayah Efektif Yang Dapat Dimanfaatkan (Ha)	3	3	9	5	3	15	5	3	15
8	Pertahanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Karakteristik Wilayah		2	0		2	0		2	0
9	Keamanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	2	5	10	3	5	15
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	5	5	25	5	5	25	5	5	25
11	Rentang Kendali	Rata-Rata Jarak Ke Pusat Pemerintahan (Km)	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rata-Rata Waktu Perjalanan Ke Pusat Pemerintahan (Menit)	5	3	15	5	3	15	5	3	15
Total Nilai					425			465			442

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.16 Rekap Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 2

No	Faktor	DOB 1	DOB 2	DOB 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kependudukan	70	100	90
2	Kemampuan Ekonomi	75	75	75
3	Potensi Daerah	71	68	62
4	Kemampuan Keuangan	75	75	70
5	Sosial Budaya	21	22	23
6	Sosial Politik	10	25	17
7	Luas Daerah	13	25	25
8	Pertahanan	15	15	15
9	Keamanan	25	10	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	25
11	Rentang Kendali	25	25	25
TOTAL		425	465	442
KETERANGAN		Sangat Mampu	Sangat Mampu	Sangat Mampu

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa alternatif 1 dengan pembagian menjadi 3 wilayah, ketiga wilayah tersebut termasuk kedalam kelas sangat mampu dan direkomendasikan untuk menjadi Daerah Otonom Baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Diantara ketiga DOB tersebut, DOB 2 memiliki nilai paling tinggi sebesar 465, kemudian disusul oleh DOB 3 dengan nilai 442, dan yang terakhir DOB 1 dengan nilai 425.

Didalam PP No.78 Tahun 2007, juga menyebutkan bahwa nilai faktor kependudukan (80-100), kemampuan ekonomi (60-75), potensi daerah (60-75), dan kemampuan keuangan (60-75). Jika dilihat Pada hasil penilaian untuk alternatif 1 ini, DOB 1 tidak memenuhi syarat nilai Pada faktor kependudukan.

Tabel 5.17 Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 3

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (4 Kecamatan)			DOB 2 (14 Kecamatan)			DOB 3 (14 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
1	Kependudukan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	5	15	75	5	15	75	5	15	75
		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	5	5	25	5	5	25	3	5	15
2	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas Per Kapita	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Kontribusi PDRB Non Migas (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25
3	Potensi Daerah	Rasio Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10000 Penduduk	5	2	10	2	2	4	1	2	2
		Rasio Kelompok Pertokoan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pasar Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia SD	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio SLTP Per Penduduk Usia SLTP	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Tenaga Medis Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan (%)	5	1	5	5	1	5	4	1	4
		Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga (%)	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Perahu Motor Atau Kapal Motor	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Keatas (%)	3	1	3	4	1	4	2	1	2
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (%)	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk	5	1	5	5	1	5	4	1	4
4	Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS (Juta)	5	5	25	5	5	25	4	5	20
		Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas	5	5	25	5	5	25	5	5	25
5	Sosial Budaya	Rasio Sarana Peribadatan Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10000	5	2	10	5	2	10	5	2	10

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (4 Kecamatan)			DOB 2 (14 Kecamatan)			DOB 3 (14 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
6	Sosial Politik	Penduduk									
		Jumlah Balai Pertemuan	5	1	5	2	1	2	3	1	3
		Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk Yang Mempunyai Hak Pilih	2	3	6	5	3	15	5	3	15
7	Luas Daerah	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	3	2	6	5	2	10	1	2	2
		Luas Wilayah Keseluruhan (Km2)	2	2	4	5	2	10	5	2	10
		Luas Wilayah Efektif Yang Dapat Dimanfaatkan (Ha)	3	3	9	5	3	15	5	3	15
8	Pertahanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	5	3	15	2	3	6	5	3	15
		Karakteristik Wilayah		2	0		2	0		2	0
9	Keamanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	5	5	25	5	5	25	5	5	25
11	Rentang Kendali	Rata-Rata Jarak Ke Pusat Pemerintahan (Km)	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rata-Rata Waktu Perjalanan Ke Pusat Pemerintahan (Menit)	5	3	15	5	3	15	5	3	15
Total Nilai					463			471			442

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.18 Rekap Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 3

No (1)	Faktor (2)	DOB 1 (3)	DOB 2 (4)	DOB 3 (5)
1	Kependudukan	100	100	90
2	Kemampuan Ekonomi	75	75	75
3	Potensi Daerah	73	68	62
4	Kemampuan Keuangan	75	75	70
5	Sosial Budaya	25	22	23
6	Sosial Politik	12	25	17
7	Luas Daerah	13	25	25
8	Pertahanan	15	6	15
9	Keamanan	25	25	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	25
11	Rentang Kendali	25	25	25
TOTAL		463	471	442
KETERANGAN		Sangat Mampu	Sangat Mampu	Sangat Mampu

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 3, seluruh DOB termasuk kedalam kategori sangat mampu dan direkomendasikan. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 471, kemudian disusul oleh DOB 1 dengan nilai 463, dan DOB 3 dengan nilai terendah sebesar 442.

Didalam PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, juga menyebutkan bahwa nilai faktor kependudukan (80-100), kemampuan ekonomi (60-75), potensi daerah (60-75), dan kemampuan keuangan (60-75). Jika dilihat Pada hasil penilaian untuk alternatif 3 ini, seluruh DOB memenuhi syarat nilai Pada faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan kemampuan keuangan.

Tabel 5.19 Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 4

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (4 Kecamatan)			DOB 2 (14 Kecamatan)			DOB 3 (14 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kependudukan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	5	15	75	5	15	75	5	15	75
		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	5	5	25	5	5	25	3	5	15
2	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas Per Kapita	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Kontribusi PDRB Non Migas (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Rasio Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	1	2	2
3	Potensi Daerah	Rasio Kelompok Pertokoan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pasar Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia SD	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio SLTP Per Penduduk Usia SLTP	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Tenaga Medis Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan (%)	3	1	3	5	1	5	4	1	4
		Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga (%)	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Perahu Motor Atau Kapal Motor	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Keatas (%)	3	1	3	4	1	4	2	1	2
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (%)	4	1	4	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk	5	1	5	5	1	5	4	1	4
		Jumlah PDS (Juta)	5	5	25	5	5	25	4	5	20
4	Kemampuan Keuangan	Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas	5	5	25	5	5	25	5	5	25

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (4 Kecamatan)			DOB 2 (14 Kecamatan)			DOB 3 (14 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Sosial Budaya	Rasio Sarana Peribadatan Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Balai Pertemuan	5	1	5	2	1	2	3	1	3
6	Sosial Politik	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk Yang Mempunyai Hak Pilih	4	3	12	5	3	15	5	3	15
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	2	2	4	5	2	10	1	2	2
7	Luas Daerah	Luas Wilayah Keseluruhan (Km2)	2	2	4	5	2	10	5	2	10
		Luas Wilayah Efektif Yang Dapat Dimanfaatkan (Ha)	3	3	9	5	3	15	5	3	15
8	Pertahanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Karakteristik Wilayah		2	0		2	0		2	0
9	Keamanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	5	5	25	5	5	25	5	5	25
11	Rentang Kendali	Rata-Rata Jarak Ke Pusat Pemerintahan (Km)	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rata-Rata Waktu Perjalanan Ke Pusat Pemerintahan (Menit)	5	3	15	5	3	15	5	3	15
Total Nilai					464			486			442

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.20 Rekap Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 4

No (1)	Faktor (2)	DOB 1 (3)	DOB 2 (4)	DOB 3 (5)
1	Kependudukan	100	100	90
2	Kemampuan Ekonomi	75	75	75
3	Potensi Daerah	70	74	62
4	Kemampuan Keuangan	75	75	70
5	Sosial Budaya	25	22	23
6	Sosial Politik	16	25	17
7	Luas Daerah	13	25	25
8	Pertahanan	15	15	15
9	Keamanan	25	25	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	25
11	Rentang Kendali	25	25	25
TOTAL		464	486	442
KETERANGAN		Sangat Mampu	Sangat Mampu	Sangat Mampu

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 4, seluruh DOB termasuk kedalam kategori sangat mampu dan direkomendasikan. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 486, kemudian disusul oleh DOB 1 dengan nilai 464, dan DOB 3 dengan nilai terendah sebesar 442.

Didalam PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, juga menyebutkan bahwa nilai faktor kependudukan (80-100), kemampuan ekonomi (60-75), potensi daerah (60-75), dan kemampuan keuangan (60-75). Jika dilihat Pada hasil penilaian untuk alternatif 4 ini, seluruh DOB memenuhi syarat nilai Pada faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan kemampuan keuangan.

Tabel 5.21 Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 5

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (7 Kecamatan)			DOB 2 (4 Kecamatan)			DOB 3 (21 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
1	Kependudukan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	5	15	75	5	15	75	4	15	60
		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	5	5	25	4	5	20	3	5	15
2	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas Per Kapita	1	5	5	1	5	5	5	5	25
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	5	25	5	5	25	2	5	10
		Kontribusi PDRB Non Migas (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25
3	Potensi Daerah	Rasio Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10000 Penduduk	3	2	6	2	2	4	1	2	2
		Rasio Kelompok Pertokoan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pasar Per 10000 Penduduk	3	1	3	2	1	2	5	1	5
		Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia SD	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio SLTP Per Penduduk Usia SLTP	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk	4	1	4	3	1	3	4	1	4
		Rasio Tenaga Medis Per 10000 Penduduk	2	1	2	1	1	1	1	1	1
		Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan (%)	5	1	5	2	1	2	5	1	5
		Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga (%)	5	1	5	5	1	5	4	1	4
		Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Perahu Motor Atau Kapal Motor	2	1	2	5	1	5	5	1	5
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Keatas (%)	3	1	3	3	1	3	2	1	2
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (%)	5	1	5	5	1	5	5	1	5
4	Kemampuan Keuangan	Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk	5	1	5	3	1	3	4	1	4
		Jumlah PDS (Juta)	5	5	25	5	5	25	4	5	20
		Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25
5	Sosial Budaya	Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas	5	5	25	5	5	25	2	5	10
		Rasio Sarana Peribadatan Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10000	5	2	10	5	2	10	5	2	10

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (7 Kecamatan)			DOB 2 (4 Kecamatan)			DOB 3 (21 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
6	Sosial Politik	Penduduk									
		Jumlah Balai Pertemuan	5	1	5	5	1	5	4	1	4
		Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk Yang Mempunyai Hak Pilih	5	3	15	2	3	6	5	3	15
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	5	2	10	2	2	4	1	2	2
7	Luas Daerah	Luas Wilayah Keseluruhan (Km2)	3	2	6	5	2	10	5	2	10
		Luas Wilayah Efektif Yang Dapat Dimanfaatkan (Ha)	3	3	9	3	3	9	4	3	12
8	Pertahanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Karakteristik Wilayah	0	2	0		2	0		2	0
9	Keamanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	5	5	25	5	5	25	5	5	25
11	Rentang Kendali	Rata-Rata Jarak Ke Pusat Pemerintahan (Km)	4	2	8	5	2	10	5	2	10
		Rata-Rata Waktu Perjalanan Ke Pusat Pemerintahan (Menit)	5	3	15	5	3	15	5	3	15
Total Nilai					443			422			400

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.22 Rekap Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 5

No (1)	Faktor (2)	DOB 1 (3)	DOB 2 (4)	DOB 3 (5)
1	Kependudukan	100	100	75
2	Kemampuan Ekonomi	75	75	60
3	Potensi Daerah	70	60	57
4	Kemampuan Keuangan	75	75	55
5	Sosial Budaya	25	25	24
6	Sosial Politik	16	25	17
7	Luas Daerah	13	15	22
8	Pertahanan	15	15	15
9	Keamanan	25	25	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	25
11	Rentang Kendali	25	23	25
TOTAL		464	463	400
KETERANGAN		Sangat Mampu	Sangat Mampu	Sangat Mampu

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 4, seluruh DOB termasuk kedalam kategori sangat mampu dan direkomendasikan. DOB 1 memiliki nilai tertinggi yaitu 464, kemudian disusul oleh DOB 2 dengan nilai 463, dan DOB 3 dengan nilai terendah sebesar 400.

Didalam PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, juga menyebutkan bahwa nilai faktor kependudukan (80-100), kemampuan ekonomi (60-75), potensi daerah (60-75), dan kemampuan keuangan (60-75). Jika dilihat Pada hasil penilaian untuk alternatif 4 ini, DOB 3 tidak memenuhi syarat nilai Pada faktor kependudukan, potensi daerah, dan kemampuan keuangan.

Tabel 5.23 Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 6

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (18 Kecamatan)			DOB 2 (14 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
1	Kependudukan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	5	15	75	5	15	75
		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	5	5	25	3	5	15
2	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas Per Kapita	5	5	25	5	5	25
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	5	25	5	5	25
		Kontribusi PDRB Non Migas (%)	5	5	25	5	5	25
3	Potensi Daerah	Rasio Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10000 Penduduk	5	2	10	1	2	2
		Rasio Kelompok Pertokoan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pasar Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia SD	5	1	5	5	1	5
		Rasio SLTP Per Penduduk Usia SLTP	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	5	1	5	5	1	5
		Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5
		Rasio Tenaga Medis Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5
		Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan (%)	5	1	5	4	1	4
		Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga (%)	5	1	5	5	1	5
		Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Perahu Motor Atau Kapal Motor	5	1	5	5	1	5
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Keatas (%)	5	1	5	2	1	2
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (%)	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk	5	1	5	4	1	4
4	Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS (Juta)	5	5	25	4	5	20
		Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25
		Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas	5	5	25	5	5	25
5	Sosial Budaya	Rasio Sarana Peribadatan Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10
		Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Balai Pertemuan	3	1	3	3	1	3
6	Sosial Politik	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk Yang Mempunyai Hak Pilih	5	3	15	5	3	15
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	5	2	10	1	2	2

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (18 Kecamatan)			DOB 2 (14 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
7	Luas Daerah	Luas Wilayah Keseluruhan (Km2)	5	2	10	5	2	10
		Luas Wilayah Efektif Yang Dapat Dimanfaatkan (Ha)	5	3	15	5	3	15
8	Pertahanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	5	3	15	5	3	15
		Karakteristik Wilayah		2	0		2	0
9	Keamanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	5	5	25	5	5	25
11	Rentang Kendali	Rata-Rata Jarak Ke Pusat Pemerintahan (Km)	5	2	10	5	2	10
		Rata-Rata Waktu Perjalanan Ke Pusat Pemerintahan (Menit)	5	3	15	5	3	15
Total Nilai					488			442

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.24 Rekap Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 6

No (1)	Faktor (2)	DOB 1 (3)	DOB 2 (4)
1	Kependudukan	100	90
2	Kemampuan Ekonomi	75	75
3	Potensi Daerah	75	62
4	Kemampuan Keuangan	75	70
5	Sosial Budaya	23	23
6	Sosial Politik	25	17
7	Luas Daerah	25	25
8	Pertahanan	15	15
9	Keamanan	25	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25
11	Rentang Kendali	25	25
TOTAL		488	442
KETERANGAN		Sangat Mampu	Sangat Mampu

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 6, seluruh DOB termasuk kedalam kategori mampu dan direkomendasikan. DOB 1 memiliki nilai tertinggi yaitu 488, dan DOB 2 dengan nilai terendah sebesar 442.

Didalam PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, juga menyebutkan bahwa nilai faktor kependudukan (80-100), kemampuan ekonomi (60-75), potensi daerah (60-75), dan kemampuan keuangan (60-75). Jika dilihat Pada hasil penilaian untuk alternatif 3 ini, seluruh DOB memenuhi syarat nilai Pada faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan.

Tabel 5.25 Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 7

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (7 Kecamatan)			DOB 2 (4 Kecamatan)			DOB 3 (11 Kecamatan)			DOB 4 (10 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
1	Kependudukan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	5	15	75	5	15	75	5	15	75	3	15	45
		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
2	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas Per Kapita	1	5	5	1	5	5	5	5	25	5	5	25
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Kontribusi PDRB Non Migas (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
3	Potensi Daerah	Rasio Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10000 Penduduk	3	2	6	2	2	4	2	2	4	1	2	2
		Rasio Kelompok Pertokoan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pasar Per 10000 Penduduk	3	1	3	2	1	2	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia SD	5	1	5	5	1	5	4	1	4	5	1	5
		Rasio SLTP Per Penduduk Usia SLTP	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk	4	1	4	3	1	3	3	1	3	4	1	4
		Rasio Tenaga Medis Per 10000 Penduduk	2	1	2	1	1	1	3	1	3	2	1	2
		Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan (%)	5	1	5	5	1	5	5	1	5	3	1	3
		Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga (%)	5	1	5	5	1	5	4	1	4	4	1	4
		Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Perahu Motor	2	1	2	5	1	5	5	1	5	5	1	5

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (7 Kecamatan)			DOB 2 (4 Kecamatan)			DOB 3 (11 Kecamatan)			DOB 4 (10 Kecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
		Atau Kapal Motor												
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Keatas (%)	3	1	3	3	1	3	2	1	2	2	1	2
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (%)	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk	5	1	5	3	1	3	4	1	4	4	1	4
4	Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS (Juta)	5	5	25	5	5	25	4	5	20	4	5	20
		Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas	5	5	25	5	5	25	2	5	10	2	5	10
5	Sosial Budaya	Rasio Sarana Peribadatan Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Balai Pertemuan	5	1	5	5	1	5	2	1	2	2	1	2
6	Sosial Politik	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk Yang Mempunyai Hak Pilih	5	3	15	4	3	12	5	3	15	5	3	15
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	5	2	10	3	2	6	1	2	2	1	2	2
7	Luas Daerah	Luas Wilayah Keseluruhan (Km2)	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Luas Wilayah Efektif Yang Dapat Dimanfaatkan (Ha)	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
8	Pertahanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (7 Kecamatan)			DOB 2 (4 Kecamatan)			DOB 3 (11 Kecamatan)			DOB 4 (10 Ecamatan)		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
		Wilayah												
		Karakteristik Wilayah	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0
9	Keamanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
11	Rentang Kendali	Rata-Rata Jarak Ke Pusat Pemerintahan (Km)	4	2	8	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rata-Rata Waktu Perjalanan Ke Pusat Pemerintahan (Menit)	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
Total Nilai					453			444			443			410

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.26 Rekap Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 7

No (1)	Faktor (2)	DOB 1 (3)	DOB 2 (4)	DOB 3 (5)	DOB 4 (6)
1	Kependudukan	100	100	100	70
2	Kemampuan Ekonomi	55	55	75	75
3	Potensi Daerah	60	56	59	56
4	Kemampuan Keuangan	75	75	55	55
5	Sosial Budaya	25	25	22	22
6	Sosial Politik	25	18	17	17
7	Luas Daerah	25	25	25	25
8	Pertahanan	15	15	15	15
9	Keamanan	25	25	25	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	25	25
11	Rentang Kendali	23	25	25	25
TOTAL		453	444	443	410
KETERANGAN		Sangat Mampu	Sangat Mampu	Sangat Mampu	Mampu

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 7, terdapat 3 DOB termasuk kedalam kategori sangat mampu dan direkomendasikan, sedangkan 1 DOB termasuk kedalam kategori mampu dan direkomendasikan. DOB 1 memiliki nilai tertinggi yaitu 453, kemudian disusul oleh DOB 2 dengan nilai 444, DOB 3 memiliki nilai 443, dan DOB 4 dengan nilai terendah sebesar 410.

Didalam PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, juga menyebutkan bahwa nilai faktor kependudukan (80-100), kemampuan ekonomi (60-75), potensi daerah (60-75), dan kemampuan keuangan (60-75). Jika dilihat Pada hasil penilaian untuk alternatif 7 ini, DOB 4 tidak memenuhi syarat nilai Pada faktor kependudukan.

Tabel 5.27 Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 8

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (7 Kecamatan)			DOB 2 (4 Kecamatan)			DOB 3 (5 Kecamatan)			DOB 4 (5 Kecamatan)			DOB 5 (5 Kecamatan)			DOB 6 (6 Kecamatan)		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
1	Kependudukan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	5	15	75	5	15	75	2	15	30	2	15	30	2	15	30	3	15	45
		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
2	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas Per Kapita	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Kontribusi PDRB Non Migas (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
3	Potensi Daerah	Rasio Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10000 Penduduk	3	2	6	2	2	4	1	2	2	1	2	2	2	2	4	2	2	4
		Rasio Kelompok Pertokoan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5	4	1	4	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pasar Per 10000 Penduduk	3	1	3	2	1	2	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia SD	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	3	1	3
		Rasio SLTP Per Penduduk Usia SLTP	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk	4	1	4	3	1	3	3	1	3	4	1	4	4	1	4	3	1	3
		Rasio Tenaga Medis Per 10000 Penduduk	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2	4	1	4	2	1	2
		Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan (%)	5	1	5	5	1	5	1	1	1	2	1	2	2	1	2	4	1	4
		Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga (%)	5	1	5	5	1	5	4	1	4	4	1	4	2	1	2	4	1	4
		Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Perahu Motor Atau Kapal Motor	2	1	2	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Keatas (%)	3	1	3	3	1	3	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (%)	5	1	5	5	1	5	4	1	4	5	1	5	4	1	4	5	1	5
		Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk	5	1	5	3	1	3	3	1	3	4	1	4	3	1	3	5	1	5

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (7 Kecamatan)			DOB 2 (4 Kecamatan)			DOB 3 (5 Kecamatan)			DOB 4 (5 Kecamatan)			DOB 5 (5 Kecamatan)			DOB 6 (6 Kecamatan)		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
4	Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS (Juta)	5	5	25	5	5	25	4	5	20	4	5	20	3	5	15	5	5	25
		Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
5	Sosial Budaya	Rasio Sarana Peribadatan Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Balai Pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Sosial Politik	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk Yang Mempunyai Hak Pilih	5	3	15	4	3	12	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	5	2	10	5	2	10	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
7	Luas Daerah	Luas Wilayah Keseluruhan (Km2)	5	2	10	5	2	10	5	2	10	3	2	6	4	2	8	3	2	6
		Luas Wilayah Efektif Yang Dapat Dimanfaatkan (Ha)	5	3	15	5	3	15	4	3	12	2	3	6	5	3	15	4	3	12
8	Pertahanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Karakteristik Wilayah	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0
9	Keamanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
11	Rentang Kendali	Rata-Rata Jarak Ke Pusat Pemerintahan (Km)	4	2	8	5	2	10	5	2	10	5	2	10	4	2	8	2	2	4
		Rata-Rata Waktu Perjalanan Ke Pusat Pemerintahan (Menit)	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	2	3	6
Total Nilai					469			464			394			388			393			402

Sumber: Analisis, 2021

Keterangan:

S = Skor

B = Bobot

N = Nilai (Skor x Bobot)

Tabel 5.28 Rekap Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 5

No (1)	Faktor (2)	DOB 1 (3)	DOB 2 (4)	DOB 3 (5)	DOB 4 (6)	DOB 5 (7)	DOB 6 (8)
1	Kependudukan	100	100	55	55	55	70
2	Kemampuan Ekonomi	75	75	75	75	75	75
3	Potensi Daerah	60	56	50	54	55	57
4	Kemampuan Keuangan	75	75	70	70	65	75
5	Sosial Budaya	21	21	21	21	21	21
6	Sosial Politik	25	22	11	11	11	11
7	Luas Daerah	25	25	22	12	23	18
8	Pertahanan	15	15	15	15	15	15
9	Keamanan	25	25	25	25	25	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	25	25	25	25
11	Rentang Kendali	25	25	25	23	25	10
TOTAL		469	464	394	388	393	402
KETERANGAN		Sangat Mampu	Sangat Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 8, terdapat 2 DOB termasuk kedalam kategori sangat mampu dan direkomendasikan, sedangkan 4 DOB termasuk kedalam kategori mampu dan direkomendasikan. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 469, kemudian disusul oleh DOB 2 dengan nilai 464, DOB 6 memiliki nilai 402, DOB 4 memiliki nilai 394, DOB 5 dengan nilai 393 dan DOB 4 dengan nilai terendah sebesar 388.

Didalam PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, juga menyebutkan bahwa nilai faktor kependudukan (80-100), kemampuan ekonomi (60-75), potensi daerah (60-75), dan kemampuan keuangan (60-75). Jika dilihat Pada hasil penilaian untuk alternatif 5 ini, DOB 3, DOB 4, DOB 5 dan DOB 6 tidak memenuhi syarat nilai Pada faktor kependudukan.

Tabel 5.29 Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 9

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (5 Kecamatan)			DOB 2 (6 Kecamatan)			DOB 3 (5 Kecamatan)			DOB 4 (5 Kecamatan)			DOB 5 (5 Kecamatan)			DOB 6 (6 Kecamatan)		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
1	Kependudukan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	4	15	60	4	15	60	2	15	30	2	15	30	2	15	30	3	15	45
		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
2	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas Per Kapita	1	5	5	1	5	5	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Kontribusi PDRB Non Migas (%)	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
3	Potensi Daerah	Rasio Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Per 10000 Penduduk	3	2	6	2	2	4	1	2	2	1	2	2	2	2	4	2	2	4
		Rasio Kelompok Pertokoan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5	4	1	4	5	1	5	5	1	5
		Rasio Pasar Per 10000 Penduduk	4	1	4	2	1	2	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SD Per Penduduk Usia SD	5	1	5	4	1	4	5	1	5	5	1	5	5	1	5	3	1	3
		Rasio SLTP Per Penduduk Usia SLTP	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Sekolah SLTA Per Penduduk Usia SLTA	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Rasio Tenaga Medis Per 10000 Penduduk	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Kendaraan (%)	4	1	4	4	1	4	1	1	1	2	1	2	2	1	2	3	1	3
		Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga (%)	5	1	5	5	1	5	4	1	4	4	1	4	2	1	2	4	1	4
		Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Perahu Motor Atau Kapal Motor	1	1	1	1	1	1	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Penduduk Usia 18 Tahun Keatas (%)	3	1	3	3	1	3	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2
		Persentase Pekerja Yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (%)	5	1	5	5	1	5	4	1	4	5	1	5	4	1	4	5	1	5
		Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penduduk	5	1	5	4	1	4	3	1	3	4	1	4	3	1	3	5	1	5

No	Faktor	Indikator	DOB 1 (5 Kecamatan)			DOB 2 (6 Kecamatan)			DOB 3 (5 Kecamatan)			DOB 4 (5 Kecamatan)			DOB 5 (5 Kecamatan)			DOB 6 (6 Kecamatan)		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
4	Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS (Juta)	5	5	25	5	5	25	4	5	20	4	5	20	3	5	15	5	5	25
		Rasio PDS Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
		Rasio PDS Terhadap PDRB Non Migas	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
5	Sosial Budaya	Rasio Sarana Peribadatan Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Balai Pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Sosial Politik	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Penduduk Yang Mempunyai Hak Pilih	2	3	6	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	5	2	10	2	2	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
7	Luas Daerah	Luas Wilayah Keseluruhan (Km2)	2	2	4	3	2	6	5	2	10	3	2	6	4	2	8	3	2	6
		Luas Wilayah Efektif Yang Dapat Dimanfaatkan (Ha)	3	3	9	4	3	12	4	3	12	2	3	6	5	3	15	4	3	12
8	Pertahanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Karakteristik Wilayah	0	2	0		2	0		2	0		2	0		2	0		2	0
9	Keamanan	Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25	5	5	25
11	Rentang Kendali	Rata-Rata Jarak Ke Pusat Pemerintahan (Km)	3	2	6	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rata-Rata Waktu Perjalanan Ke Pusat Pemerintahan (Menit)	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
Total Nilai					414			414			399			392			397			421

Sumber: Analisis, 2021

Keterangan:

S = Skor

B = Bobot

N = Nilai (Skor x Bobot)

Tabel 5.30 Rekap Penilaian Persyaratan Teknis Alternatif 9

No (1)	Faktor (2)	DOB 1 (3)	DOB 2 (4)	DOB 3 (5)	DOB 4 (6)	DOB 5 (7)	DOB 6 (8)
1	Kependudukan	85	85	55	55	55	70
2	Kemampuan Ekonomi	55	55	75	75	75	75
3	Potensi Daerah	63	57	57	58	57	61
4	Kemampuan Keuangan	75	75	70	70	65	75
5	Sosial Budaya	21	21	21	21	21	21
6	Sosial Politik	16	13	11	11	11	11
7	Luas Daerah	13	18	22	12	23	18
8	Pertahanan	15	15	15	15	15	15
9	Keamanan	25	25	25	25	25	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	25	25	25	25
11	Rentang Kendali	21	25	25	25	25	25
TOTAL		414	414	399	392	397	421
KETERANGAN		Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Mampu	Sangat Mampu

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 9, terdapat 5 DOB termasuk kedalam kategori mampu dan direkomendasikan, serta terdapat 1 DOB yang termasuk kedalam kategori sangat mampu dan direkomendasikan. DOB 6 memiliki nilai tertinggi yaitu 421, kemudian disusul oleh DOB 1 dan DOB 2 dengan nilai 414, DOB 3 memiliki nilai 399, DOB 5 memiliki nilai 397, dan DOB 4 dengan nilai terendah sebesar 392.

Didalam PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, juga menyebutkan bahwa nilai faktor kependudukan (80-100), kemampuan ekonomi (60-75), potensi daerah (60-75), dan kemampuan keuangan (60-75). Jika dilihat Pada hasil penilaian untuk alternatif 9 ini, terdapat DOB tidak memenuhi syarat nilai Pada faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan.

5.2.2. PENILAIAN BERDASARKAN RPP PENATAAN DAERAH (PEMBANDING JAWA BARAT)

Pada kajian ini, acuan utama untuk menilai Kapasitas daerah Calon Daerah Persiapan adalah Rancangan Peraturan Pemerintah. Persyaratan kapasitas daerah terdiri dari 7 parameter, masing-masing faktor terdiri dari 1 (satu) atau lebih indikator, dan Pada masing-masing indikator memiliki sub indikator. Untuk data pembandingan dalam perhitungan berdasarkan RPP Penataan Ruang ini menggunakan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Berikut ini, merupakan hasil penilaian berdasarkan RPP Penataan Daerah dengan pembandingan data seluruh kabupaten dan kota Jawa Barat:

Tabel 5.31 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 1

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 1		
		DOB 1	DOB 2	DOB 3
1	Jumlah Penduduk DOB	522.688	1.195.733	669.320
2	Jumlah Penduduk Minimal	670.122	1.346.160	1.346.160
3	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	42.127	88.203	231.105
5	Luas WilayahMinimal	7.997	138.740	138.740
6	KETERANGAN	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.32 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 1

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	3	2	6
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	1	4	4	5	4	20	5	4	20
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	1	3	3	5	3	15	1	3	3
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	2	3	6
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Pendapatan Per Kapita	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Indeks Pembangunan Manusia	3	3	9	4	3	12	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	5	3	15	4	3	12	4	3	12
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	4	2	8	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan	2	1	2	3	1	3	3	1	3

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)	Skor	Bobot	Nilai (Skor X Bobot)
		Batubara									
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	5	5	25	4	5	20	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	5	8	40	4	8	32	1	8	8
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	2	2	4	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	5	5	25	1	5	5	1	5	5
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	4	2	8	1	2	2	2	2	4
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Induk	4	2	8	4	2	8	4	2	8
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2
TOTAL NILAI					318			308			252

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.33 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 1

No	Faktor	Skor		
		5 Kecamatan	13 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Geografi	14	14	15
2	Demografi	27	55	43
3	Keamanan	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	27	27	19
5	Ekonomi	96	99	99
6	Keuangan	81	68	29
7	Pemerintahan	61	33	35
Jumlah		318	308	252
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 1, seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 1 memiliki nilai tertinggi yaitu 318, kemudian disusul oleh DOB 2 dengan nilai 308, dan DOB 3 dengan nilai terendah sebesar 252.

Tabel 5.34 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 2

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF2		
		DOB 1	DOB 2	DOB 3
1	Jumlah Penduduk DOB	522.688	1.195.733	669.320
2	Jumlah Penduduk Minimal	1.346.160	1.346.160	1.346.160
3	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	42.127	88.202	231.106
5	Luas WilayahMinimal	130.801	130.801	130.801
6	KETERANGAN	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.35 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 2

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	3	2	6
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	5	2	10	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	1	4	4	5	4	20	5	4	20
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	1	3	3	5	3	15	1	3	3
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	2	3	6
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	5	3	15

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
		Pendapatan Per Kapita	1	3	3	5	3	15	5	3	15
		Indeks Pembangunan Manusia	3	3	9	4	3	12	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	5	3	15	4	3	12	4	3	12
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	4	2	8	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	3	1	3	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	4	2	8	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	4	1	4	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	2	1	2	3	1	3	3	1	3
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	5	5	25	4	5	20	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	5	8	40	4	8	32	1	8	8
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	5	5	25	1	5	5	1	5	5
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	3	2	6	1	2	2	2	2	4
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhada Induk	3	2	6	4	2	8	4	2	8
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2
TOTAL NILAI					303			308			252

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.36 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 2

No	Faktor	Skor		
		5 Kecamatan	13 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Geografi	22	14	15
2	Demografi	27	55	43
3	Keamanan	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	27	27	19
5	Ekonomi	79	99	99
6	Keuangan	81	68	29
7	Pemerintahan	55	33	35
JUMLAH		303	308	252
KETERANGAN		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 2 seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 308, kemudian disusul oleh DOB 1 dengan nilai 303, dan DOB 3 dengan nilai terendah sebesar 252.

Tabel 5.37 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alernatif 3

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 3		
		DOB 1	DOB 2	DOB 3
1	Jumlah Penduduk DOB	418.069	1.300.352	669.320
2	Jumlah Penduduk Minimal	670.122	1.346.160	1.346.160
3	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	27.725	102.604	231.106
5	Luas Wilayah Minimal	7.997	130.801	130.801
6	KETERANGAN	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi

Tabel 5.38 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 3

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	3	2	6
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	5	4	20	5	4	20	5	4	20
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	2	4	8	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	2	4	8	4	4	16	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	5	3	15	5	3	15	1	3	3
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	1	2	2	1	2	2	5	2	10
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	2	3	6

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Pendapatan Per Kapita	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Indeks Pembangunan Manusia	2	3	6	5	3	15	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	3	3	9	5	3	15	4	3	12
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	4	1	4	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	4	1	4	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	4	2	8	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	2	1	2	5	1	5	3	1	3
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	5	5	25	5	5	25	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	1	8	8	1	8	8	1	8	8
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	2	2	4	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	3	2	6	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	5	5	25	5	5	25	1	5	5
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	3	2	6	3	2	6	2	2	4
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhada Induk	5	2	10	5	2	10	4	2	8
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					285			325			252

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.39 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 3

No	Faktor	Skor		
		4 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Geografi	14	14	15
2	Demografi	47	59	43
3	Keamanan	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	19	19	19
5	Ekonomi	85	100	99
6	Keuangan	71	81	29
7	Pemerintahan	37	40	35
Jumlah		285	325	252
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 2 seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 325, kemudian disusul oleh DOB 1 dengan nilai 285, dan DOB 3 dengan nilai terendah sebesar 252.

Tabel 5.40 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 4

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 4		
		DOB 1	DOB 2	DOB 3
1	Jumlah Penduduk DOB	409.564	1.308.857	669.320
2	Jumlah Penduduk Minimal	670.122	1.346.160	1.346.160
3	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	34.512	95.817	231.106
5	Luas Wilayah Minimal	7.997	130.801	130.801
6	KETERANGAN	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi

Tabel 5.41 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 4

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	3	2	6	3	2	6
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	5	4	20	5	4	20	5	4	20
		Apk Sekolah Menengan Atas	3	4	12	4	4	16	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	5	4	20	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	5	3	15	5	3	15	1	3	3
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	1	2	2	1	2	2	5	2	10
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	2	3	6
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	5	3	15

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
		Pendapatan Per Kapita	4	3	12	5	3	15	5	3	15
		Indeks Pembangunan Manusia	2	3	6	5	3	15	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	4	3	12	5	3	15	4	3	12
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	2	1	2	3	1	3	3	1	3
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	5	5	25	5	5	25	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	5	8	40	5	8	40	1	8	8
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	2	2	4	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	3	2	6	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	1	5	5	1	5	5	1	5	5
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	3	2	6	2	2	4	2	2	4
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhada Induk	4	2	8	4	2	8	4	2	8
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					315			339			252

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.42 Rekapitulasi Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 4

No	Faktor	Skor		
		4 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Geografi	14	14	15
2	Demografi	63	71	43
3	Keamanan	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	19	19	19
5	Ekonomi	89	100	99
6	Keuangan	81	81	29
7	Pemerintahan	37	42	35
Jumlah		315	339	252
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 2 seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 339, kemudian disusul oleh DOB 1 dengan nilai 315, dan DOB 3 dengan nilai terendah sebesar 252.

Tabel 5.43 Hasil Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 5

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 5		
		7 Kecamatan	4 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	770.004	409.564	1.208.173
2	Jumlah Penduduk Minimal	670.122	670.122	1.346.160
3	KETERANGAN	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	39.808	34.512	287.116
5	Luas Wilayah Minimal	7.997	7.997	130.801
6	KETERANGAN	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.44 Hasil Analisis Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 5

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	4	2	8
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Demografi	Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Angka Lama Bersekolah	1	4	4	1	4	4	4	4	16
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	5	3	15	1	3	3	1	3	3
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	5	3	15
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Pendapatan Per Kapita	5	3	15	5	3	15	5	3	15

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
		Indeks Pembangunan Manusia	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Presentase Angka Kemiskinan	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	4	1	4	3	1	3	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	3	2	6	3	2	6	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	3	1	3	3	1	3	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	4	2	8	4	2	8	4	2	8
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	4	1	4	4	1	4	3	1	3
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	4	1	4	2	1	2
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	1	5	5	4	5	20	2	5	10
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	1	8	8	4	8	32	2	8	16
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	1	5	5	2	5	10	1	5	5
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	5	2	10	5	2	10	4	2	8
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Induk	4	2	8	4	2	8	3	2	6
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					255			285			271

Tabel 5.45 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 5

No	Faktor	Skor		
		7 Kecamatan	4 Kecamatan	21 Kecamatan
1	Geografi	14	14	17
2	Demografi	39	27	39
3	Keamanan	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	27	27	28
5	Ekonomi	93	91	96
6	Keuangan	29	68	42
7	Pemerintahan	41	46	37
Jumlah		255	285	271
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 5 seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 285, DOB 3 dengan nilai sebesar 271, dan DOB 1 memiliki nilai 255.

Tabel 5.46 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 6

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 6	
		14 Kecamatan	18 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	669.320	1.718.421
2	Jumlah Penduduk Minimal	1.346.160	1.346.160
3	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	231.106	130.329
5	Luas Wilayah Minimal	130.801	130.801
6	KETERANGAN	Memenuhi	Tidak Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.47 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 6

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	3	2	6	3	2	6
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	5	4	20	4	4	16

No	Parameter	Indikator	Skor	DOB 1		DOB 2		
				Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	5	4	20
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	5	4	20
		Kepadatan Penduduk	1	3	3	5	3	15
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	4	2	8
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	5	2	10	1	2	2
		Jumlah Organisasi Terdaftar	2	3	6	4	3	12
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	2	3	6
		Pendapatan Per Kapita	5	3	15	5	3	15
		Indeks Pembangunan Manusia	4	3	12	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	4	3	12	4	3	12
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	1	5	1	1	1
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	3	1	3	5	1	5

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
6	Keuangan	Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	4	1	4
		Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	1	5	5	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	1	8	8	1	8	8
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	2	2	4
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	2	2	4
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	1	5	5	2	5	10
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	2	2	4	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Induk	4	2	8	5	2	10
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2
TOTAL NILAI					246			281

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.48 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 6

No	Faktor	Skor	
		14 Kecamatan	18 Kecamatan
1	Geografi	9	15
2	Demografi	43	71
3	Keamanan	12	10
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	19	17
5	Ekonomi	99	87
6	Keuangan	29	29
7	Pemerintahan	35	52
Jumlah		246	281
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 6 seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 281, dan DOB 1 memiliki nilai sebesar 246.

Tabel 5.49 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 7

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 7			
		7 Kecamatan	4 Kecamatan	11 Kecamatan	10 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	770.004	409.564	768.246	439.927
2	Jumlah Penduduk Minimal	670.122	670.122	1.346.160	1.346.160
3	KETERANGAN	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	39.808	34.512	118.016	169.100
5	Luas Wilayah Minimal	7.997	7.997	130.801	130.801
6	KETERANGAN	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.50 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 7

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	5	2	10	3	2	6
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0		1	0

No	Parameter	Indikator	Skor	DOB 1 Bobot	Nilai	Skor	DOB 2 Bobot	Nilai	Skor	DOB 3 Bobot	Nilai	Skor	DOB 4 Bobot	Nilai
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	1	4	4	1	4	4	4	4	16	4	4	16
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	1	3	3	1	3	3	2	3	6	1	3	3
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik		2	0		2	0		2	0		2	0
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	5	3	15	1	3	3
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Pendapatan Per Kapita	1	3	3	1	3	3	5	3	15	5	3	15
		Indeks Pembangunan	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
		Manusia												
		Presentase Angka Kemiskinan	5	3	15	5	3	15	4	3	12	4	3	12
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	1	1	1	1	1	1	2	1	2	4	1	4
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	3	5	15	5	5	25	3	5	15	3	5	15
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	3	8	24	5	8	40	3	8	24	3	8	24

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	1	2	2	2	2	4	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	4	5	20	5	5	25	1	5	5	2	5	10
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	1	2	2	3	2	6	2	2	4	2	2	4
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Induk	5	2	10	3	2	6	4	2	8	4	2	8
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					261			292			273			265

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.51 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 7

No	Faktor	Skor			
		7 Kecamatan	4 Kecamatan	11 Kecamatan	10 Kecamatan
1	Geografi	14	14	14	17
2	Demografi	39	27	37	29
3	Keamanan	12	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	29	29	29	29
5	Ekonomi	94	96	96	94
6	Keuangan	29	68	42	41
7	Pemerintahan	44	46	43	43
Jumlah		261	292	273	265
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 7 seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 292, kemudian disusul oleh DOB 3 dengan nilai 273, DOB 4 dengan nilai 265, dan DOB 1 dengan nilai terendah sebesar 261.

Tabel 5.52 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 8

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 8					
		7 Kecamatan	4 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	6 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	770.004	409.564	234.631	205.296	252.564	515.682
2	Jumlah Penduduk Minimal	670.122	670.122	1.346.160	1.346.160	1.346.160	1.346.160
3	KETERANGAN	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	39.808	34.512	111.723	57.377	69.432	48.583
5	Luas Wilayah Minimal	7.997	7.997	130.801	130.801	130.801	130.801
6	KETERANGAN	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.53 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 8

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4			DOB 5			DOB 6		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	2	2	4	3	2	6	4	2	8	5	2	10
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	3	2	6

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4			DOB 5			DOB 6		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	1	4	4	1	4	4	4	4	16	4	4	16	4	4	16	5	4	20
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	3	4	12
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	5	4	20
		Kepadatan Penduduk	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	5	3	15
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4			DOB 5			DOB 6		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	1	3	3	1	3	3	1	3	3	5	3	15
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Pendapatan Per Kapita	3	3	9	3	3	9	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Indeks Pembangunan Manusia	3	3	9	3	3	9	4	3	12	4	3	12	4	3	12	5	3	15
		Presentase Angka Kemiskinan	5	3	15	5	3	15	4	3	12	4	3	12	4	3	12	5	3	15
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	4	1	4	4	1	4	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	3	1	3	5	1	5	5	1	5	5	1	5	4	1	4	2	1	2
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	2	2	4	3	2	6	5	2	10	5	2	10	4	2	8	2	2	4

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4			DOB 5			DOB 6		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	2	1	2	2	1	2	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	4	1	4	4	1	4	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	2	1	2	1	1	1	3	1	3	3	1	3	1	1	1	2	1	2
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	2	5	10	4	5	20	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	4	8	32	3	8	24	4	8	32	3	8	24	3	8	24	4	8	32
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	4
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	3	2	6

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4			DOB 5			DOB 6		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	4	3	2	6
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	4	5	20	5	5	25	4	5	20	1	5	5	2	5	10	1	5	5
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Induk	3	2	6	4	2	8	2	2	4	2	2	4	3	2	6	4	2	8
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					263			275			268			246			252			315

Tabel 5.54 Rekap Penilaian Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 8

No	Faktor	Skor					
		7	4	5	5	5	6
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Keamatan	Kecamatan
1	Geografi	14	14	14	17	14	14
2	Demografi	39	31	36	28	29	53
3	Keamanan	12	12	12	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	29	28	28	25	28	26
5	Ekonomi	93	85	96	86	84	87
6	Keuangan	30	68	42	40	40	81
7	Pemerintahan	46	37	40	38	45	42
	Jumlah	263	275	268	246	252	315
	Keterangan	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 8, seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 6 memiliki nilai tertinggi yaitu 315, kemudian disusul oleh DOB 2 dengan nilai 275, DOB 3 memiliki nilai 268, DOB 1 memiliki nilai 263, DOB 5 memiliki nilai 252, dan DOB 4 dengan nilai terendah sebesar 246.

Tabel 5.55 PENILAIAN PERSYARATAN DASAR KEWILAYAHAN ALTERNATIF 9

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 9					
		5 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	6 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	632.959	601.253	234.631	205.296	252.564	515.682
2	Jumlah Penduduk Minimal	1.346.160	1.346.160	1.346.160	1.346.160	1.346.160	1.346.160
3	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	24.851	52.007	111.723	57.377	69.432	48.583
5	Luas Wilayah Minimal	130.801	130.801	130.801	130.801	130.801	130.801
6	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.56 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 9

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4			DOB 5			DOB 6		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	3	2	6	3	2	6	4	2	8	5	2	10
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	0	2	0	3	2	6	0	2	0	0	2	0
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4			DOB 5			DOB 6		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	5	3	15	5	3	15	1	3	3	1	3	3	1	3	3	5	3	15
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	3	2	6	3	2	6	3	2	6	3	2	6	3	2	6	3	2	6
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	1	3	3	1	3	3	1	3	3	5	3	15
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Pendapatan Per Kapita	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Indeks Pembangunan Manusia	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	2	1	2	2	1	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4			DOB 5			DOB 6		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	1	5	5	5	5	25	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	3	8	24	4	8	32	3	8	24	3	8	24	3	8	24	3	8	24
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	4	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	3	5	15	3	5	15	4	5	20	3	5	15	3	5	15	2	5	10
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	1	2	2	2	2	4	3	2	6	2	2	4	3	2	6	2	2	4
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Induk	4	2	8	3	2	6	2	2	4	3	2	6	2	2	4	3	2	6
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					286			314			264			263			261			282

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.57 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 9

No	Faktor	Skor					
		5 Kecamatan	6 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Keamatan	6 Kecamatan
1	Geografi	14	14	14	15	14	14
2	Demografi	58	59	39	39	39	50
3	Keamanan	12	12	12	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	24	24	12	12	12	24
5	Ekonomi	96	93	97	97	96	96
6	Keuangan	33	68	45	45	44	42
7	Pemerintahan	49	44	45	43	44	44
Jumlah		286	314	264	263	261	282
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 9, seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi sebesar 314, DOB 1 memiliki nilai 286, DOB 6 memiliki nilai 282, DOB 3 memiliki nilai 264, DOB 4 memiliki nilai 263, dan DOB 5 memiliki nilai 261.

5.2.3. PENILAIAN BERDASARKAN RPP PENATAAN DAERAH (PEMBANDING JAWA BARAT, JAWA TENGAH DAN BANTEN)

Pada kajian ini, acuan utama untuk menilai Kapasitas daerah Calon Daerah Persiapan adalah Rancangan Peraturan Pemerintah. Persyaratan kapasitas daerah terdiri dari 7 parameter, masing-masing faktor terdiri dari 1 (satu) atau lebih indikator, dan Pada masing-masing indikator memiliki sub indikator. Untuk data pembandingan dalam perhitungan berdasarkan RPP Penataan Ruang ini menggunakan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Banten.

Berikut ini, merupakan hasil penilaian berdasarkan RPP Penataan Daerah dengan pembandingan data seluruh kabupaten dan kota Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten:

Tabel 5.58 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 1

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 1		
		5 Kecamatan	13 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	522.688	1.195.733	669.320
2	Jumlah Penduduk Minimal	469.606	1.026.342	1.026.342
3	KETERANGAN	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	42.127	88.203	231.105
5	Luas Wilayah Minimal	7.184	138.740	138.740
6	KETERANGAN	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.59 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 1

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	3	2	6
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	1	4	4	4	4	16	4	4	16
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	1	3	3	5	3	15	1	3	3
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	5	2	10	5	2	10	5	2	10

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	2	3	6
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	1	3	3	1	3	3
		Pendapatan Per Kapita	1	3	3	3	3	9	3	3	9
		Indeks Pembangunan Manusia	3	3	9	4	3	12	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	5	3	15	3	3	9	3	3	9
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	4	2	8	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	3	1	3	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	2	1	2	3	1	3	3	1	3
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	5	5	25	4	5	20	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	5	8	40	4	8	32	1	8	8
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	2	2	4	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	5	5	25	1	5	5	2	5	10
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	4	2	8	1	2	2	2	2	4
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhada Induk	4	2	8	4	2	8	4	2	8
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					304			283			232

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.60 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 1

No	Faktor	Skor		
		5 Kecamatan	13 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Geografi	15	15	17
2	Demografi	26	37	39
3	Keamanan	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	26	26	17
5	Ekonomi	87	87	78
6	Keuangan	79	69	29
7	Pemerintahan	59	37	40
Jumlah		304	283	232
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 1, seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 1 memiliki nilai tertinggi yaitu 304, kemudian disusul oleh DOB 2 dengan nilai 283, dan DOB 3 dengan nilai terendah sebesar 232.

Tabel 5.61 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 2

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF2		
		4 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	522.688	1.195.733	669.320
2	Jumlah Penduduk Minimal	1.026.342	1.026.342	1.026.342
3	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	42.127	88.202	231.106
5	Luas Wilayah Minimal	92.834	92.834	92.834
6	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.62 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 2

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	3	2	6
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	5	2	10	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	1	4	4	5	4	20	4	4	16
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	1	3	3	5	3	15	1	3	3
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	5	2	10	5	2	10	5	2	10

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	2	3	6
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	1	3	3
		Pendapatan Per Kapita	1	3	3	5	3	15	3	3	9
		Indeks Pembangunan Manusia	3	3	9	4	3	12	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	5	3	15	4	3	12	3	3	9
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	4	2	8	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	3	1	3	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	4	2	8	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	4	1	4	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	2	1	2	3	1	3	3	1	3
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	5	5	25	4	5	20	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	5	8	40	4	8	32	1	8	8
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	5	5	25	1	5	5	2	5	10
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	3	2	6	1	2	2	2	2	4
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhada Induk	3	2	6	4	2	8	4	2	8
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					303			308			232

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.63 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 2

No	Faktor	Skor		
		5 Kecamatan	13 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Geografi	21	14	17
2	Demografi	27	55	39
3	Keamanan	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	26	26	17
5	Ekonomi	79	99	78
6	Keuangan	81	68	29
7	Pemerintahan	57	34	40
Jumlah		303	308	232
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 2 seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 308, kemudian disusul oleh DOB 1 dengan nilai 303, dan DOB 3 dengan nilai terendah sebesar 232.

Tabel 5.64 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alernatif 3

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 3		
		4 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	418.069	1.300.352	669.320
2	Jumlah Penduduk Minimal	469.606	1.026.342	1.026.342
3	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	27.725	102.604	231.106
5	Luas Wilayah Minimal	7.184	92.834	92.834
6	KETERANGAN	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Tabel 5.65 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 3

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	3	2	6
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	2	4	8	5	4	20	4	4	16
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	2	4	8	5	4	20	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	5	3	15	5	3	15	1	3	3
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	1	2	2	1	2	2	5	2	10
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	2	3	6

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Pendapatan Per Kapita	1	3	3	4	3	12	3	3	9
		Indeks Pembangunan Manusia	2	3	6	5	3	15	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	2	3	6	4	3	12	3	3	9
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	3	1	3	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	2	1	2	5	1	5	3	1	3
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	5	5	25	5	5	25	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	1	8	8	1	8	8	1	8	8
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	2	2	4	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	3	2	6	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	2	5	10	5	5	25	2	5	10
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	3	2	6	3	2	6	2	2	4
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhada Induk	5	2	10	5	2	10	4	2	8
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					233			307			232

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.66 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 3

No	Faktor	Skor		
		4 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Geografi	15	15	17
2	Demografi	36	59	39
3	Keamanan	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	18	18	17
5	Ekonomi	66	80	78
6	Keuangan	49	81	29
7	Pemerintahan	37	42	40
Jumlah		233	307	232
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 2 seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 3075, kemudian disusul oleh DOB 1 dengan nilai 233, dan DOB 3 dengan nilai terendah sebesar 232.

Tabel 5.67 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 4

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 4		
		4 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	409.564	1.308.857	669.320
2	Jumlah Penduduk Minimal	469.606	1.026.342	1.026.342
3	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	34.512	95.817	231.106
5	Luas Wilayah Minimal	7.184	92.834	92.834
6	KETERANGAN	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Tabel 5.68 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 4

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	3	2	6
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Demografi	Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Angka Lama Bersekolah	2	4	8	5	4	20	4	4	16
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	2	4	8	5	4	20	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	5	3	15	5	3	15	1	3	3
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	1	2	2	1	2	2	5	2	10
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	2	3	6

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	1	3	3
		Pendapatan Per Kapita	1	3	3	4	3	12	3	3	9
		Indeks Pembangunan Manusia	2	3	6	5	3	15	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	2	3	6	4	3	12	3	3	9
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	3	1	3	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	2	1	2	3	1	3	3	1	3
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	5	5	25	5	5	25	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	5	8	40	5	8	40	1	8	8
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	2	2	4	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	3	2	6	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	1	5	5	1	5	5	2	5	10
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	3	2	6	2	2	4	2	2	4
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhada Induk	4	2	8	4	2	8	4	2	8
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					270			325			232

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.69 Rekapitulasi Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 4

No	Faktor	Skor		
		4 Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Geografi	15	15	17
2	Demografi	49	67	39
3	Keamanan	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	18	18	17
5	Ekonomi	65	90	78
6	Keuangan	74	81	29
7	Pemerintahan	37	42	40
Jumlah		270	325	232
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 2 seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 325, kemudian disusul oleh DOB 1 dengan nilai 270, dan DOB 3 dengan nilai terendah sebesar 232.

Tabel 5.70 Hasil Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 5

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 5		
		7 Kecamatan	4 Kecamatan	14 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	770.004	409.564	1.208.173
2	Jumlah Penduduk Minimal	469.606	469.606	1.026.342
3	KETERANGAN	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	39.808	34.512	287.116
5	Luas Wilayah Minimal	7.184	7.184	92.834
6	KETERANGAN	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.71 Hasil Analisis Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 5

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	4	2	8	5	2	10	4	2	8
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	1	4	4	1	4	4	4	4	16
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	5	3	15	3	3	9	1	3	3
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	5	2	10	5	2	10	5	2	10

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
5	Ekonomi	Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	3	3	9	1	3	3
		Pendapatan Per Kapita	5	3	15	5	3	15	1	3	3
		Indeks Pembangunan Manusia	5	3	15	5	3	15	1	3	3
		Presentase Angka Kemiskinan	5	3	15	5	3	15	1	3	3
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	1	1	1	1	1	1	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	1	2	2	1	2	2	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	1	1	1	1	1	1	3	1	3
6	Keuangan	Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	1	1	1	1	1	1	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	1	5	5	4	5	20	2	5	10
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	1	8	8	4	8	32	2	8	16
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16
		Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	1	2	2	1	2	2
7	Pemerintahan	Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	1	5	5	2	5	10	4	5	20
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	5	2	10	5	2	10	4	2	8
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Induk	4	2	8	4	2	8	3	2	6
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Total Nilai			231			265			231

Tabel 5.72 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 5

No	Faktor	Skor		
		7 Kecamatan	4 Kecamatan	21 Kecamatan
1	Geografi	14	14	15
2	Demografi	39	33	39
3	Keamanan	12	14	14
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	25	25	26
5	Ekonomi	71	65	41
6	Keuangan	29	68	42
7	Pemerintahan	41	46	54
Jumlah		231	265	231
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 5 seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 265, DOB 3 dengan nilai sebesar 231, dan DOB 1 memiliki nilai 231.

Tabel 5.73 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 6

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 6	
		14 Kecamatan	18 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	669.320	1.718.421
2	Jumlah Penduduk Minimal	1.026.342	1.026.342
3	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	231.106	130.329
5	Luas Wilayah Minimal	92.834	92.834
6	KETERANGAN	Memenuhi	Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.74 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 6

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	3	2	6	3	2	6
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	4	4	16	4	4	16
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	1	3	3	5	3	15
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	5	2	10	1	2	2
		Jumlah Organisasi Terdaftar	2	3	6	4	3	12
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	1	3	3	1	3	3
		Pendapatan Per Kapita	3	3	9	3	3	9
		Indeks Pembangunan Manusia	4	3	12	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	3	3	9	4	3	12
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	3	1	3	5	1	5
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	4	1	4
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	1	5	5	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	1	8	8	1	8	8
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	2	2	4
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	2	2	4
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	2	5	10	1	5	5
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	2	2	4	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Induk	4	2	8	5	2	10
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					226			257

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.75 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 6

No	Faktor	Skor	
		14 Kecamatan	18 Kecamatan
1	Geografi	15	15
2	Demografi	37	51
3	Keamanan	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	17	17
5	Ekonomi	78	86
6	Keuangan	29	29
7	Pemerintahan	38	47
Jumlah		226	257
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 6 seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 257, dan DOB 1 memiliki nilai sebesar 226.

Tabel 5.76 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 7

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 7			
		7 Kecamatan	4 Kecamatan	11 Kecamatan	10 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	770.004	409.564	768.246	439.927
2	Jumlah Penduduk Minimal	469.606	469.606	1.026.342	1.026.342
3	KETERANGAN	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	39.808	34.512	118.016	169.100
5	Luas Wilayah Minimal	7.184	7.184	92.834	92.834
6	KETERANGAN	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.77 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 7

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	5	2	10	2	2	4
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	1	4	4	1	4	4	4	4	16	4	4	16
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16
		Kepadatan Penduduk	1	3	3	1	3	3	3	3	9	1	3	3
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik		2	0		2	0		2	0		2	0
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	5	3	15	1	3	3
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Pendapatan Per Kapita	1	3	3	1	3	3	5	3	15	5	3	15
		Indeks Pembangunan Manusia	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	5	3	15	5	3	15	4	3	12	4	3	12
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4		
			Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai	Skor	Bobot	Nilai
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	1	1	1	1	1	1	2	1	2	4	1	4
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	3	5	15	5	5	25	3	5	15	3	5	15
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	3	8	24	5	8	40	3	8	24	3	8	24
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	1	2	2	2	2	4	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	4	5	20	5	5	25	1	5	5	2	5	10
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10	4	2	8
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	1	2	2	3	2	6	2	2	4	2	2	4
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Induk	5	2	10	3	2	6	4	2	8	4	2	8
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
TOTAL NILAI					261			292			276			261

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.78 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 7

No	Faktor	Skor			
		7 Kecamatan	4 Kecamatan	11 Kecamatan	10 Kecamatan
1	Geografi	14	14	14	13
2	Demografi	27	27	45	39
3	Keamanan	12	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	17	17	17	6
5	Ekonomi	86	86	96	98
6	Keuangan	55	81	55	55
7	Pemerintahan	50	55	37	38
Jumlah		261	292	276	261
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 7 seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 292, kemudian disusul oleh DOB 3 dengan nilai 276, DOB 4 dengan nilai 261, dan DOB 1 dengan nilai terendah sebesar 261.

Tabel 5.79 Penilaian Persyaratan Dasar Kewilayahan Alternatif 8

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 8					
		7 Kecamatan	4 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	6 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	770.004	409.564	234.631	205.296	252.564	515.682
2	Jumlah Penduduk Minimal	469.606	469.606	1.026.342	1.026.342	1.026.342	1.026.342
3	KETERANGAN	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	39.808	34.512	111.723	57.377	69.432	48.583
5	Luas Wilayah Minimal	7.184	7.184	92.834	92.834	92.834	92.834
6	KETERANGAN	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.80 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 8

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4			DOB 5			DOB 6		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
1	Geografi	Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	3	2	6	3	2	6	4	2	8	5	2	10
		Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	3	2	6
		Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0
		Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0
		Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
2	Demografi	Angka Lama Bersekolah	1	4	4	1	4	4	4	4	16	4	4	16	4	4	16	5	4	20
		Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	5	4	20
		Kepadatan Penduduk	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	5	3	15
3	Keamanan	Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	1	3	3	1	3	3	1	3	3	5	3	15
5	Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4			DOB 5			DOB 6		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
		Pendapatan Per Kapita	3	3	9	3	3	9	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Indeks Pembangunan Manusia	3	3	9	3	3	9	4	3	12	4	3	12	4	3	12	5	3	15
		Presentase Angka Kemiskinan	5	3	15	5	3	15	4	3	12	4	3	12	4	3	12	5	3	15
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	4	1	4	4	1	4	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	3	1	3	5	1	5	5	1	5	5	1	5	4	1	4	2	1	2
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	2	2	4	3	2	6	5	2	10	5	2	10	4	2	8	2	2	4
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	2	1	2	2	1	2	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	4	1	4	4	1	4	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	2	1	2	1	1	1	3	1	3	3	1	3	1	1	1	2	1	2
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	2	5	10	4	5	20	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	4	8	32	3	8	24	4	8	32	3	8	24	3	8	24	4	8	32
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	4
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	3	2	6
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	4	3	2	6
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	4	5	20	5	5	25	4	5	20	1	5	5	2	5	10	1	5	5
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Induk	3	2	6	4	2	8	2	2	4	2	2	4	3	2	6	4	2	8
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					264			276			271			247			253			308

Tabel 5.81 Rekap Penilaian Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 8

No	Faktor	Skor					
		7 Kecamatan	4 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	6 Kecamatan
1	Geografi	13	13	9	9	11	15
2	Demografi	27	27	39	39	39	59
3	Keamanan	12	12	12	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	19	19	7	7	7	19
5	Ekonomi	80	83	98	97	92	96
6	Keuangan	58	60	53	45	45	53
7	Pemerintahan	55	63	53	38	47	54
Jumlah		264	277	271	247	253	308
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 8, seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 6 memiliki nilai tertinggi yaitu 308, kemudian disusul oleh DOB 2 dengan nilai 277, DOB 3 memiliki nilai 271, DOB 1 memiliki nilai 264, DOB 5 memiliki nilai 253, dan DOB 4 dengan nilai terendah sebesar 247.

Tabel 5.82 PENILAIAN PERSYARATAN DASAR KEWILAYAHAN ALTERNATIF 9

No	Dasar Kewilayahan	ALTERNATIF 9					
		5 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	6 Kecamatan
1	Jumlah Penduduk DOB	632.959	601.253	234.631	205.296	252.564	515.682
2	Jumlah Penduduk Minimal	1.026.342	1.026.342	1.026.342	1.026.342	1.026.342	1.026.342
3	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi
4	Luas Wilayah DOB	24.851	52.007	111.723	57.377	69.432	48.583
5	Luas Wilayah Minimal	92.834	92.834	92.834	92.834	92.834	92.834
6	KETERANGAN	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Memenuhi

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.83 Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 9

No	Parameter		Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4			DOB 5			DOB 6		
				S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
1	Geografi		Rata Rata Jarak Terhadap Calon Ibukota	5	2	10	5	2	10	3	2	6	3	2	6	4	2	8	5	2	10
			Ketersediaan Lahan Untuk Pusat Pemerintahan	0	2	0	0	2	0	0	2	0	3	2	6	0	2	0	0	2	0
			Potensi Air Permukaan Dan Air Tanah Di Cakupan Wilayah (Tinggi, Sedang, Rendah)		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0
			Ketersediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Sehari Hari		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0		1	0
			Jumlah Dan Jenis Bencana Yang Diukur Dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Kejadian Bencana Dalam 10 Tahun Terakhir	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
2	Demografi		Angka Lama Bersekolah	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16
			Apk Sekolah Menengan Atas	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
			Apk Sekolah Dasar	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16
			Kepadatan Penduduk	5	3	15	5	3	15	1	3	3	1	3	3	1	3	3	5	3	15
3	Keamanan		Tindak Pidana Kriminal Umum Per 10000 Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
			Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi		Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Legislatif Tdh Penduduk Dgn Hak Pilih	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
			Jumlah Etnik Dan Sub Etnik	3	2	6	3	2	6	3	2	6	3	2	6	3	2	6	3	2	6
			Jumlah Organisasi Terdaftar	5	3	15	5	3	15	1	3	3	1	3	3	1	3	3	5	3	15
5	Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi Selama 5 Tahun	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15

No	Parameter	Indikator	DOB 1			DOB 2			DOB 3			DOB 4			DOB 5			DOB 6		
			S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N	S	B	N
		Pendapatan Per Kapita	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15
		Indeks Pembangunan Manusia	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12
		Presentase Angka Kemiskinan	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12	4	3	12
		Kontribusi Pdrb Sektor Pertanian Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Industri Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Perdagangan, Hotelm Dan Restoran Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Sektor Pengankuran Dan Komunikasi Per Kapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Kontribusi Pdrb Sektor Keuangan Dan Persewaan Per Kapita	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Kontribusi Pdrb Jasa Perkapita	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5
		Jumlah Cadangan Tambang Minyak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Cadangan Tambang Mineral Dan Batubara	2	1	2	2	1	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3
		Jumlah Cadangan Panas Bumi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keuangan	Rasio Pad Induk Thd Total Pendapatan Daerah	1	5	5	5	5	25	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1	5	5
		Rasio Pad Calon Daerah Persiapan Thd Daerah Induk	3	8	24	4	8	32	3	8	24	3	8	24	3	8	24	3	8	24
		Opini Bpk Atas Lkpd Selama 5 Tahun Terakhir	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16	4	4	16
7	Pemerintahan	Rasio Jmlah Murid Sd Terhadap Ruang Belajar Sd	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Smp Terhadap Ruang Belajar Smp	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		Rasio Jmlah Murid Sma/K Terhadap Ruang Belajar Sma/K	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	4	1	2	2
		Rasio Jumlah Dokter Dengan Jumlah Penduduk		3	0		3	0		3	0		3	0		3	0		3	0
		Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk		2	0		2	0		2	0		2	0		2	0		2	0
		Rasio Panjang Jalan Dibanding Luas Wilayah	1	5	5	1	5	5	4	5	20	1	5	5	3	5	15	1	5	5
		Jumlah Pelabuhan	5	2	10	5	2	10	4	2	8	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Jumlah Penduduk	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10	5	2	10
		Rasio Jumlah Pegawai Asn Terhadap Induk	4	2	8	3	2	6	2	2	4	3	2	6	2	2	4	3	2	6
		Ketersediaan Rancangan Rtrw	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Total Nilai					284			310			266			259			265			283

Sumber: Analisis, 2021

Tabel 5.84 Rekap Penilaian Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah Alternatif 9

No	Faktor	Skor					
		5 Kecamatan	6 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Keamatan	6 Kecamatan
1	Geografi	10	10	6	6	8	10
2	Demografi	51	51	39	39	39	51
3	Keamanan	12	12	12	12	12	12
4	Sosial Politik Adat Dan Tradisi	21	21	9	9	9	21
5	Ekonomi	98	98	99	97	97	99
6	Keuangan	45	73	45	45	45	45
7	Pemerintahan	41	39	50	39	49	39
Jumlah		278	304	260	247	259	277
Keterangan		Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak

Sumber: Analisis, 2021

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif 9, seluruh DOB termasuk kedalam kategori tidak layak. DOB 2 memiliki nilai tertinggi sebesar 304, DOB 1 memiliki nilai 278, DOB 6 memiliki nilai 277, DOB 3 memiliki nilai 260, DOB 4 memiliki nilai 247, dan DOB 5 memiliki nilai 259.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah didapatkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- Terdapat sembilan (9) alternatif pemekaran Kabupaten Cianjur
- Berdasarkan hasil analisis sesuai PP No.78 Tahun 2007 menunjukkan hasil Sangat Mampu dan Mampu .
- Berdasarkan hasil analisis sesuai RPP menunjukkan hasil Tidak Layak.
- Berdasarkan hasil analisis sesuai dengan PP No.78 Tahun 2007, menunjukkan bahwa alternatif 6 memiliki nilai tertinggi. Sedangkan alternatif 8 memiliki nilai terendah.
- Berdasarkan hasil analisis sesuai RPP, menunjukkan bahwa alternatif 4 memiliki nilai tertinggi. Sedangkan alternatif 3 memiliki nilai terendah.
- Hasil penilaian Dasar Wilayah dengan indikator luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal menunjukkan bahwa seluruh alternatif yang dibandingkan dengan Jawa Barat menunjukkan hasil tidak memenuhi

- Hasil penilaian Dasar Wilayah dengan indikator luas wilayah minimal menunjukkan bahwa alternatif 3,5,6, dan 7 yang dibandingkan dengan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten menunjukkan hasil memenuhi
- Hasil penilaian Dasar Wilayah dengan indikator jumlah penduduk minimal menunjukkan bahwa seluruh alternatif yang dibandingkan dengan Jawa Barat, Jawa tengah dan Banten menunjukkan hasil tidak memenuhi
- Nilai indikator jumlah balai pertemuan, jumlah sub etnik, dan jumlah organisasi masyarakat yang terdaftar memiliki nilai terendah
- Berdasarkan hasil analisis menurut PP 78 Tahun 2007 alternatif yang memiliki nilai terbaik yaitu Alternatif 6
- Berdasarkan hasil analisis menurut RPP dengan pembanding Jawa Barat alternatif yang memiliki nilai terbaik yaitu Alternatif 4
- Berdasarkan hasil analisis menurut RPP dengan pembanding Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten yang memiliki nilai terbaik yaitu Alternatif 4
- Semakin banyak pemekaran maka nilai kelayakan semakin kecil
- Semakin sedikit pemekaran maka nilai kelayakan semakin besar